

Buku ini merangkai secara konseptual dan kontekstual upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Tidak saja dengan program-program pengentasan kemiskinan, juga tidak hanya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, namun lebih lanjut lagi memotret berbagai kearifan lokal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat sebagai pijakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan sosial. Tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat (yang sebagian juga ada yang sudah memudar) direkonstruksi kembali sebagai bentuk jembatan pemberdayaan yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia kekinian, buku ini sangat relevan dalam menyodorkan alternatif kerangka pembangunan dengan menguak makna substantif kearifan lokal. Sebagai misal kelembagaan lokal seperti *Ana-ana Karaeng* di Makassar, *Awig-awig* di Bali, *Bodi Caniago* di Minangkabau dikembangkan menjadi entitas lokal yang memicu pembangunan. Budaya gotong royong seperti *Alang Tulung* di masyarakat Gayo, *Basiru* di Sumbawa, *Belalik* di Melayu Sambas diformulasikan sebagai kejujuran, kepedulian dan kerja sama tim. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan hanya sekadar identitas suatu suku atau masyarakat tertentu saja.

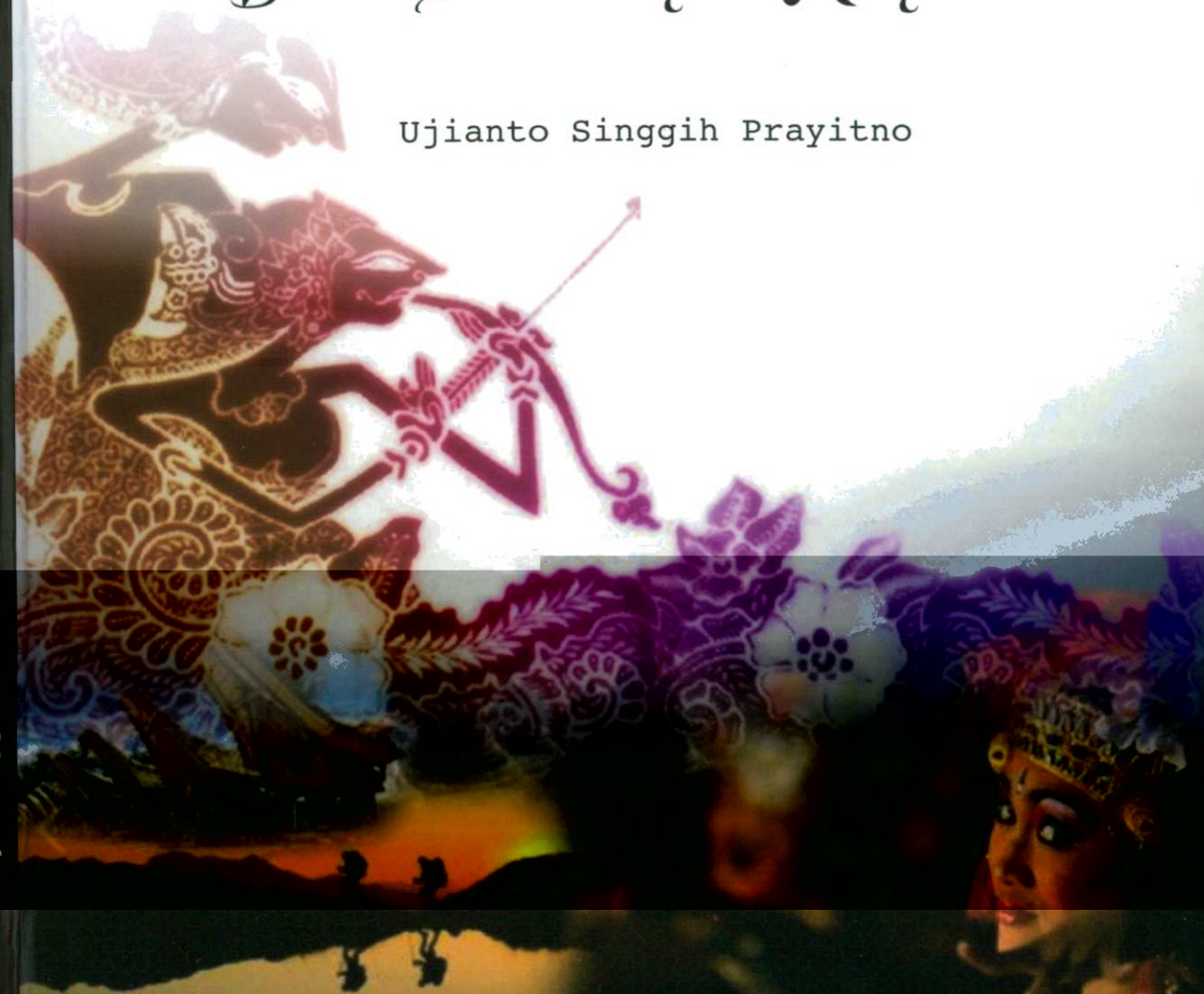
Kontekstualisasi

KEARIFAN LOKAL

Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ujianto Singgih Prayitno

Kontekstualisasi
KEARIFAN LOKAL
Dalam Pemberdayaan Masyarakat



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika



ISBN 978-979-9052-90-2



Ujianto Singgih Prayitno

KONTEKSTUALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika
2013



Judul:

Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

vi+152 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-979-9052-90-2

Cetakan Pertama, 2013

Penulis:

Ujianto Singgih Prayitno

Editor:

Anih Sri Suryani

Desain Sampul:

Fery C. Syifa

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR EDITOR

Telah lebih dari 8,5 windu Indonesia merdeka, pembukaan UUD menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Saat awal pembangunan nasional di mulai tahun 1970an, isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera. Namun sampai saat ini kemiskinan dan ketidaksejahteraan masih menjadi isu yang sentral di tanah air tercinta ini. Sebagaimana pada umumnya pemikiran di negara-negara belum berkembang selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu utamanya.

Ada beberapa perbedaan pendekatan dalam memandang kemiskinan, di satu pihak ada yang memahami bahwa kemiskinan itu karena kemalasan, sementara di pihak lain memahami bahwa kemiskinan itu karena ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sehingga pemikiran itu diterjemahkan menjadi ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar, kekurangan materi atau ketidakmampuan untuk menuntun dirinya menjadi manusia seutuhnya. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya dari segi moral dan *evaluative*. Sedangkan kaum akademisi memahaminya dari sudut ilmiah yang lebih mapan.

Berbagai upaya dan pendekatan telah diusulkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Begitu juga berbagai kebijakan pembangunan telah diimplementasikan. Pemerintah melalui berbagai program, namun sampai saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum juga mencapai level yang diharapkan. Lebih lanjut lagi, terminologi pemberdayaan merupakan strategi yang tengah diupayakan dalam rangka pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diharapkan dapat mendorong *community development*.

Di lain pihak, keanekaragaman adat istiadat dan budaya Indonesia merupakan aset bangsa sekaligus modal pembangunan yang patut untuk dijaga dan dikembangkan. Kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah menjadi kekhasan tersendiri yang mewarnai pembangunan yang muncul sebagai proses panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Buku ini merangkai secara konseptual dan kontekstual upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tidak saja dengan program-program pengentasan kemiskinan, tidak hanya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat,

namun lebih lanjut lagi memotret berbagai kearifan lokal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat sebagai pijakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan sosial. Tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat (yang sebagian juga ada yang sudah memudar) direkonstruksi kembali sebagai bentuk jembatan pemberdayaan yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia kekinian, buku ini sangat relevan dalam menyodorkan alternatif kerangka pembangunan dengan menguak makna *substantive* kearifan lokal. Sebagai misal kelembagaan lokal seperti *Ana-ana Karaeng* di Makassar, *Awig-awig* di Bali, *Bodi Caniago* di Minangkabau dikembangkan menjadi entitas lokal yang memicu pembangunan. Budaya gotong-royong seperti *Alang Tulung* di masyarakat Gayo, *Basiru* di Sumbawa, *Belalik* di Melayu Sambas, dsb diformulasikan sebagai kejujuran, kepedulian dan kerjasama tim. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan hanya sekedar identitas suatu suku atau masyarakat tertentu saja.

Akhir kata, buku ini layak dibaca dan dicermati oleh berbagai kalangan terutama para pelaku perencanaan pembangunan, pengambil keputusan dan berbagai kalangan yang peduli dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan agar turut menyelami konstruksi baru dalam konteks pembangunan. Semoga mendapat pencerahan. Selamat Membaca.

Jakarta, November 2013
Editor,

Anih Sri Suryani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERGULATAN TEORI PEMBANGUNAN	9
A. Pembangunan Sebagai Proses Perubahan	9
B. Modernitas:Sebuah Model Pembangunan.....	13
C. Teori Ketergantungan dan Sistem Dunia	16
D. Pergeseran Nilai Masyarakat.....	21
BAB III PENGEMBANGAN MASYARAKAT	25
A. Pembangunan Berpusat pada Rakyat	25
B. Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat	31
C. Proses Pengembangan Masyarakat.....	39
D. Pemberdayaan.....	45
BAB IV WUJUD KEARIFAN LOKAL	
 DALAM INTERAKSI SOSIAL.....	53
A. Ikatan Jaringan Sosial.....	53
B. Wujud Kearifan Lokal.....	58
BAB V KELEMBAGAAN LOKAL	73
A. Distorsi Kelembagaan Sosial	73
B. Wujud Kelembagaan Sosial.....	76
BAB VI MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT	
 DENGAN TRADISI LOKAL.....	95
A. Pembangunan dan Pertumbuhan Perkotaan	95
B. Pemberdayaan Masyarakat:	
Pengalaman Daerah	101
1. Kemiskinan di Perkotaan.....	101
2. Bangkit dari Bencana Alam:	
PengalamanYogyakarta	103
3. Subak dan Lembaga Perkreditan Desa:	

Pengalaman Bali	116
4. PNPM Mandiri:	
Pengalaman Sulawesi Selatan.....	123
5. Pengalaman Sumatera Barat:	
Arti Penting Organisasi Sosial	127
BAB VII PENUTUP	135
Daftar Pustaka.....	139
Indeks.....	148

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau *bhinneka tunggal ika*, yaitu sebuah negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini penekanan keanekaragaman adalah pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Dalam masyarakat Indonesia, setiap masyarakat suku bangsa secara turun-temurun mempunyai dan menempati wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan tempat sumber-sumber daya dimana warga masyarakat suku bangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Masyarakat majemuk seperti Indonesia, bukan hanya beranekaragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan sukubangsanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial-politik (Suparlan, 2003). Gejala sosial yang tidak terlihat secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari tetapi yang mendasar dan mendalam di dalam kehidupan anggota suku bangsa-suku bangsa di Indonesia adalah jati diri suku bangsa atau kesukubangsaan. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Indonesia suku bangsa adalah sebuah ide dan sebuah kenyataan, dan kesukubangsaan adalah sebuah ideologi yang mempunyai kekuatan sosial yang tidak bisa ditawar ataupun dibendung.

Dalam masyarakat Indonesia, suku bangsa dan kesukubangsaan adalah sebuah ide dan sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota-anggota masyarakatnya dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial kesukubangsannya. Dalam suasana askriptif kesukubangsaan tersebut pembedaan antara siapa 'saya' dan siapa 'kamu' dan antara siapa 'kami' dan siapa 'mereka' jelas batas-batasnya, dan selalu diulang dan dipertegas, yaitu batas-batas kesukubangsaan. Dalam ruang lingkup batas-batas kesukubangsaaan ini stereotip dan prasangka berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar-suku bangsa yang tidak terbatas. Akibatnya banyak saling salah pengertian di dalam komunikasi antar-suku bangsa, yang menyebabkan semakin lebarnya jarak dan mantapnya batas-batas atau pagar-pagar yang membatasi hubungan antara dua suku bangsa atau lebih. Akibat lebih lanjut dari stereotip dan

prasangka ini adalah terwujudnya tindakan-tindakan diskriminatif dalam hak dan kewajiban oleh suku bangsa yang dominan terhadap mereka yang tergolong lemah dan nonpribumi atau minoritas di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Kemajemukan bangsa ini merupakan tantangan bagi pemberdayaan masyarakat yang sekurang-kurangnya harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang demikian beragam. Tidak mudah memenuhi keinginan setiap kelompok masyarakat yang memang memiliki keinginan berbeda, namun setidaknya upaya-upaya pemberdayaan dapat memenuhi bagian terbesar masyarakat Indonesia sesuai dengan corak adat istiadat. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melahirkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan sebagian besar rakyat adalah dengan selalu berdasarkan pada koridor paradigma nasional yang terdiri atas Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional dan undang-undang yang terkait serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Latar belakang sosial budaya Indonesia yang heterogen dengan perbedaan suku, agama, ras serta berbeda tingkat pendidikan serta kesejahteraannya merupakan potensi untuk timbulnya konflik dengan segala akibat yang negatif. Untuk mengatasi hal ini sangat penting dipupuk wawasan kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, selaras dengan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara adalah suatu konsep yang sudah disepakati oleh komponen-komponen bangsa yang dikembangkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dengan mempertimbangkan pandangan geopolitik, sejarah perjuangan bangsa, dan kondisi budaya bangsa Indonesia.

Rasa dan sikap nasional yang tinggi di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita-cita nasional merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya rasa, paham dan semangat kebangsaan. Dengan demikian pertentangan dan konflik berkepanjangan dapat dihindari yang berpengaruh kepada terjaganya stabilitas, pembangunan yang berkelanjutan, terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Sebagai landasan visioner bangsa, Wawasan Nusantara yang mencakup astra gatra (geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) merupakan penjabaran

lebih lanjut dari pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara harus senantiasa menjadi latar belakang pemikiran dalam perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengkomodasi prinsip Ketahanan Nasional Indonesia tersebut, yaitu kondisi dinamik kehidupan bangsa yang meliputi aspek nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia sebagai prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, selaras dan serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu.

Ketahanan Nasional Indonesia sangat ditentukan oleh segenap aspek kehidupan nasional, juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan global dan regional. Sebagai landasan konsepsional, Ketahanan Nasional mengandung pengertian keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia serta kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Dengan demikian Ketahanan Nasional harus menjadi landasan konsepsional bagi setiap pelaku pemberdayaan masyarakat dalam mengerahkan sekaligus mengarahkan seluruh sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemampuan pelaku pemberdayaan masyarakat yang visioner dalam mewujudkan Ketahanan Nasional sangat penting karena keberhasilannya adalah termasuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan.

Dewasa ini, pluralitas bangsa secara serius mendapatkan tantangan, dengan makin terbatasnya daya berlakunya norma, agama, adat istiadat, tata-krama, dan sopan santun yang tidak lagi mampu mengendalikan interaksi sosial masyarakat. Secara sosiologis jarak sosial ini dapat disebabkan oleh adanya etnosentrisme yang berlebihan, meningkatnya intensitas prasangka dan *stereotype*, dapat menjadi penyebab keterbatasan hubungan sosial yang memunculkan faktor negatif. Intensitas prasangka ini muncul dalam bentuk diskriminasi yang terjadi ketika seseorang melakukan proses pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan perbedaan-perbedaan keyakinan agama, keyakinan politik, perbedaan gender ataupun karena adanya perbedaan latar belakang etnik. Jika hal ini dilakukan, maka akan menjadi pengingkaran terhadap sumpah pemuda yang memiliki makna yang sangat dalam bagi

bangsa Indonesia. Dari semangat sumpah pemuda itu, lahirlah kemerdekaan secara harfiah yang dapat dirasakan sebagai bangsa yang lepas dari tangan penjajah, menjadi bangsa yang memiliki harga diri, harkat dan martabat sebagai nilai-nilai budaya. Dalam proses pemberdayaan, sumpah pemuda semestinya dapat dijadikan dasar untuk membangun negeri ini agar tidak terpecah-pecah, dan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang mencakup segi-segi yang sangat kompleks.

Dalam kaitan itu, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan upaya mewujudkan sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dan menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Meminjam istilah yang dipergunakan oleh Parsudi Suparlan (2002), landasan dasar pemberdayaan masyarakat Indonesia adalah "masyarakat multikultural Indonesia" yang dibangun dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia dilihat sebagai bangsa yang mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, sehingga akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan masyarakat yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya, merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar bagi pelaku pemberdayaan masyarakat adalah mempersempit pertentangan antaretnik, golongan dan agama.

Meletakkan multikulturalisme sebagai dasar pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia, menjadikan demokrasi menjadi dasar bernegara.

Demokrasi merupakan salah satu sistem kenegaraan yang diselenggarakan oleh rakyat atau atas nama rakyat. Tataan Demokrasi yang ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir masyarakat dan kemampuan perekonomian nasional yang makin mampu mensejahterakan rakyat. Proses berdemokrasi, atau demokratisasi memerlukan beberapa persyaratan, antara lain (a) memiliki kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi; (b) memiliki kebesaran jiwa dan sportif; (c) konstitusional; (d) terjaminnya keamanan; dan (e) bebas dari campur tangan asing. Sebagai bangsa yang majemuk, baik dari aspek etnis, budaya, agama, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya, disatu pihak memiliki dimensi positif dalam meningkatkan kehidupan demokrasi. Namun dipihak lain apabila tidak dicermati secara hati-hati, arif dan bijaksana, pluralitas masyarakat berpotensi menjadi salah satu faktor timbulnya masalah. Pemahaman yang demikian amat penting untuk menjadi dasar dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan yang tepat. Oleh karena itu sangat tepat jika para pendiri dan petinggi politik bangsa berketetapan hati memilih sistem demokrasi.

Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut (Suparlan, 2000). Penekanan keanekaragaman dalam masyarakat majemuk terletak pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan tempat sumber-sumber daya dimana warga suku bangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka. Menurut Suparlan (2000), suku bangsa merupakan sebuah kategori atau golongan sosial askriptif, sehingga suku bangsa didefinisikan sebagai sebuah pengorganisasian sosial yang askriptif di mana warga suku bangsa mengaku dan diakui sebagai warga sesuatu suku bangsa karena dilahirkan oleh orang tua dari suku bangsa tertentu atau dilahirkan dan berasal dari sesuatu daerah tertentu. Karena sifatnya yang askriptif, maka jati dirisuku bangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang untuk diganti dengan sesuatu jati diri lain yang diperolehnya. Jati dirisuku bangsa atau asal yang askriptif ini tetap melekat dalam dirinya sejak kelahirannya.

Setiap interaksi yang terjadi antarindividu, dalam sebuah hubungan sosial akan memperlihatkan jati diri yang akan tampak karena adanya atribut-atribut yang digunakan oleh pelaku dalam mengekspresikan jati dirinya. Dalam hubungan antarsuku bangsa atribut dari jati diri suku bangsa adalah kebudayaan suku bangsanya. Kebudayaan suku bangsa juga bersifat askriptif dalam hal bahwa kebudayaan suku bangsa tersebut didapat seseorang melalui

suatu proses pembelajaran yang 'dipaksa'. Dalam arti ini, pembelajaran kebudayaan suku bangsa adalah pembelajaran sebagai sebuah keyakinan oleh masyarakatnya. Keyakinan menjadi nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari kebudayaan suku bangsa si anak yang primordial, atau yang pertama dipelajari dan diyakini serta yang utama dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, para pelaku pemberdayaan masyarakat perlu meningkatkan peranannya dengan menciptakan integrasi sosial antar berbagai golongan agama, etnik dan suku bangsa melalui program-programnya. Dalam analisis struktural integrasi dalam sistem sosial memiliki tiga sifat, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif, yang secara teoritik harus ada dan dipertahankan keseimbangannya. Dalam kaitan ini, kesimpulan diskusi Ilmu-ilmu Sosial AIPI, menjelaskan:

1. Integrasi normatif, yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar (*basic values and norms*). Dari dimensinya, integrasi ini dapat disebut sebagai integrasi budaya.
2. Integrasi fungsional, yaitu suatu ikatan sosial yang di dasarkan pada situasi saling ketergantungan fungsional antara unsur satu dan lainnya. Integrasi ini lebih berdimensi ekonomi.
3. Integrasi koersif, yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya kekuatan yang memaksa. Integrasi ini dapat dimasukkan dalam dimensi politik.

Tantangan terbesar para pelaku pemberdayaana dalah bagaimana menjaga keseimbangan ketiga sifat integrasi ini agar fungsional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini penting, karena esensi proses pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup dengan menjaga keseimbangan dan saling menghormati dalam kesetaraan. Kondisi sosial Indonesia sejak reformasi 1998 yang memperlihatkan ketidakharmonisan dan saling bertentangan, karena dari ketiga sifat integrasi itu, integrasi nasional Indonesia cenderung bersifat koersif. Akibatnya, integrasi yang terjadi adalah integrasi yang tidak harmonis, semu, dan bahkan rawan. Paling tidak, integrasi itu diciptakan dalam sebuah masyarakat majemuk untuk meredam potensi konflik yang terjadi menjadi sebuah interaksi sosial yang fungsional.

Pada umumnya, bentuk, arah dan akibat dari proses-proses konflik tergantung dari faktor-faktor yang bentuk konteksnya (Coleman, 1990; Simmel, 1964) sebagai berikut:

1. Jenis relasi sosial yang dimiliki atau dikembangkan oleh para individu, khususnya sejauh mana hubungan yang ditandai oleh kepentingan dan tanggung jawab bersama (*solidary relation*), jumlah, serta kekuatan hubungan kerja sama diantara mereka (*cooperative linkages*).

2. Konteks norma dan nilai dari suatu konflik, khususnya sejauh mana para aktor memiliki pandangan atau citra yang sama mengenai kerangka kelembagaan atau aturan yang selayaknya harus mereka gunakan untuk menyelesaikan konflik.
3. Matriks sosialnya, misalnya ciri-ciri penampang (*cross-cut*) masing-masing, kesetiaan bersama terhadap sesuatu serta keanggotaan dalam organisasi yang sama dan diatas segalanya.

Para pelaku pemberdayaanseयोगianya selalu menciptakan hubungan sosial yang mapan sebagai faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Para pelaku pemberdayaan, baik secara individu ataupun secara kolektif perlu menciptakan pilihan-pilihan barudengan merekayasa aturan permainan atau mengubah segi-segi kelembagaan tertentu yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jika setiap pemangku kepentingan mempunyai hubungan yang terkait pada kepentingan dan tanggung jawab bersama, cenderung untuk bekerja sama dalam mengubah kondisi lingkungan sosialnyauntuk memperoleh hasil yang menguntungkan semua pihak. Hal ini menjelaskan, bahwa individu yang mempunyai hubungan sosial yang terkait pada kepentingan dan tanggung jawab bersama memiliki kemampuan dan juga kecenderungan untuk mengubah kondisi lingkungan sosialnya dengan cara yang memuaskan dalam batas-batas tertentu.

Proses pemberdayaan akan berhasil jika semua pihak yang terlibat melakukan kesepakatan dalam perbedaan, persamaan dalam keanekaragaman atau *agree in disagreement*. Upaya pemberdayaan menempatkan perbedaan

kesatuan budaya yang lahir melalui gejala globalisasi? Permasalahan lainnya adalah bagaimana kearifan lokal akan dapat berkembang atau mungkin sekadar bertahan di tengah gencarnya serangan globalisasi? Pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokalitas sesungguhnya bukan sekadar menciptakan perbedaan, tetapi sebagai upaya merevitalisasi nilai budaya lokal untuk menciptakan ikatan emosional yang memperkaya upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan masyarakat melalui pengembangan kearifan lokal menunjukkan bahwa pembangunan daerah bukanlah “miniatur” pembangunan nasional, namun pembangunan di tiap-tiap daerah akan memiliki ciri dan watak tersendiri sesuai dengan potensi, nilai budaya daerah tersebut.

Oleh karena itu, nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat akan terpelihara dan berkembang menjadi modal yang tak ternilai dalam pembangunan. Model pemberdayaan memberikan peran yang sangat besar terhadap komunitas lokal untuk menentukan sendiri nasibnya. Pola pemberdayaan lebih menekankan pada aspek partisipasi komunitas lokal daripada introduksi dari luar. Pemberdayaan komunitas menjadi isu yang sangat penting yang berkembang dengan pesat, yang sangat peduli terhadap isu lingkungan, kesetaraan gender, keadilan serta keberlanjutan menjadikannya mudah diterima oleh komunitas yang mungkin sudah bosan dengan model pembangunan *top down* yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

BAB II

PERGULATAN TEORI PEMBANGUNAN

A. Pembangunan sebagai Proses Perubahan

Perubahan Sosial¹ terjadi di dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, yang antara lain meliputi perubahan dalam segi distribusi kelompok usia, tingkat pendidikan rata-rata, tingkat kelahiran penduduk, penurunan kadar rasa kekeluargaan dan informalitas antartetangga. Banyak ilmuwan yang menulis tentang teori perubahan sosial ini, antara lain Paul B. Horton dan Chester L. Hunt yang membagi teori perubahan sosial itu kedalam (1) teori evolusioner, (2) teori siklus, dan (3) teori fungsional dan teori konflik.²

Herakleitos (641-575 SM), seorang filsuf Yunani kuno menyatakan bahwa arus perubahan dalam kehidupan itu mengalir bagai air, *panta rhei kai uden menei*, segala sesuatu mengalir bagaikan arus sungai, dan tidak ada satu orangpun yang dapat masuk ke sungai yang sama untuk kedua kalinya. Perubahan sosial merupakan proses yang berlangsung dalam struktur, fungsi suatu sistem sosial, dan peranan institusi yang berlaku dalam suatu jangka waktu tertentu. Perubahan sosial yang berlangsung mengacu pada

¹ Teori-teori perubahan sosial sering dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu teori evolusioner, teori siklus, dan teori fungsional dan konflik. Pandangan semacam ini dikemukakan oleh: Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1990 halaman 208-211; Richard T. La Piere, Social Change, Mc Graw Hill Book, New York, 1965, halaman 1-39; Robert A. Nisbet, Social Change and History, Oxford University Press, Oxford, 1968, halaman 3-11; dan Soerjono Soekanto, Perubahan Sosial, Ghalia, Jakarta, 1983, halaman 9-22; Khusus untuk arti perkembangan positivisme Auguste Comte lihat Dr. Kuntowibisono, Arti Perkembangan: Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, halaman 10-21.

² Teori evolusioner menilai bahwa perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap, yang dilalui oleh setiap masyarakat, yang dimulai dari tahap perkembangan awal menuju ketahap perkembangan akhir. Sosiolog yang termasuk golongan ini adalah Auguste Comte, Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan, dan Karl Marx. Teori siklus berpendapat bahwa proses peralihan masyarakat itu bukannya berakhir pada tahap "terakhir" yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Tokoh yang menganut teori ini antara lain: Oswald Spengler, Pitrin Sorokin, Arnold J. Toynbee. Teori fungsional dan teori konflik, tidaklah termasuk dalam salah satu teori besar ini. Para penganut teori fungsional menerima perubahan itu sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan perubahan.

kemajuan masyarakat, dengan suatu pola tertentu. Atau dengan perkataan lain perubahan itu merupakan keadaan yang diinginkan, bersifat positif dan bermanfaat, ditimbulkan dan direncanakan. Proses perubahan ini harus dimulai dengan motivasi yang kuat untuk menerima dan bersedia melakukan perubahan-perubahan, serta tujuan perubahan itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Perubahan berencana harus merupakan proses rasional yang mempunyai dasar ilmiah dan berlangsung dalam suasana yang demokratis. Oleh karena itu perubahan berencana itu harus didasarkan atas keputusan dan tindakan yang tepat serta menelaah secara seksama berbagai konsekuensinya.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pada umumnya, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi. Modernisasi merupakan tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan pembangunan suatu negara membuat perkembangan teori pembangunan terus berubah. Evolusi pemikiran dalam teori pembangunan memang berlangsung demikian cepat, yang bisa dilihat dari begitu banyak temuan ilmiah baru.

Teori pembangunan terus berkembang pesat, mulai dari generasi peraih Nobel dekade 1960-an Jan Tinbergen dan dekade 1970-an Simon Kuznets, sampai generasi dekade 1990-an John Nash dan Amartya Sen. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendorong perubahan teori pembangunan, yaitu *pertama*, perubahan yang disebabkan oleh ideologi karena setiap pemikir pembangunan mempunyai basis ideologi sendiri-sendiri serta memiliki rujukan teoretis yang berbeda-beda. *Kedua*, perubahan yang sangat fundamental akibat keberhasilan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa. Revolusi teknologi yang berlangsung demikian masif membawa implikasi luas dan pengaruh kuat pada perkembangan teori pembangunan. *Ketiga*, perubahan teori pembangunan yang disebabkan oleh lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antarbangsa. Gejala integrasi ekonomi ini lazim disebut *borderless economy*, yang ditandai oleh: (i) liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antarnegara, (ii) meluasnya operasi perusahaan multinasional, dan (iii) pesatnya perkembangan bisnis finansial internasional (Robert Gilpin, 2001).

Ketiga faktor ini telah mempengaruhi premis dasar dan preposisi teoretis dalam perkembangan teori pembangunan dan menjadi daya dorong yang kuat untuk merumuskan ulang kerangka teoretis pembangunan yang telah mapan selama ini. Salah satu teori yang mendominasi kajian pembangunan adalah teori pembangunan manusia (*human development*). Teori ini merupakan koreksi teori pembangunan Barat yang sangat materialistik, yang kerap menjadi rujukan negara-negara berkembang. Teori pembangunan Barat yang materialistik mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik semata, yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, dan mengabaikan dimensi manusia sebagai subjek utama pembangunan dan menegaskan harkat dan martabat kemanusiaan yang paling hakiki.

Teori pembangunan manusia memiliki empat elemen dasar, yaitu pertama, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara yang mempersyaratkan: (a) distribusi aset-aset ekonomi produktif secara adil; (b) distribusi pendapatan melalui perbaikan kebijakan fiskal; (c) menata sistem kredit perbankan untuk memberi kesempatan bagi kelompok kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha; (d) menata sistem politik demokratis guna menjamin hak dan kebebasan politik; (e) menata sistem hukum guna menjamin tegaknya keadilan. Kedua produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang mensyaratkan adanya investasi di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial. Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan, yaitu manusia, pendanaan, fisik, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Teori pembangunan manusia ini telah menjadi tema sentral dalam wacana perdebatan mengenai isu-isu pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir, yang memungkinkan terjadinya pergeseran orientasi pembangunan dari hanya mencapai tujuan makroekonomi semata, menjadi upaya memantapkan pembangunan sosial. Kaushik Basu (2002) menengarai enam hal penting mengapa teori pembangunan manusia memiliki peran penting, yaitu: (a) pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (b) mengemban misi pemberantasan kemiskinan; (c) mendorong

peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (d) memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (e) memperkuat basis *civil society* dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (f) merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan.

Keberhasilan pembangunan berkaitan erat dengan peranan pemerintah sebagai suatu hal yang tak terelakkan bahkan bersifat imperatif, karena pembangunan tidak akan dapat terlaksana tanpa keterlibatan pemerintah. Peranan pemerintah itu dapat dilakukan pada tingkatan perumusan kebijakan, perencanaan program, rekayasa sosial ekonomi, manajemen dan administrasi, serta pengaturan dan pengawasan. Peranan pemerintah ini merupakan instrumen yang sangat efektif dalam implementasi pembangunan, bahkan tak sedikit pula yang meyakini bahwa institusi pemerintah diperlukan untuk mengendalikan pasar, terutama untuk menghindari agar mekanisme pasar tidak hanya dikuasai oleh para pemilik modal besar dengan memberikan proteksi bagi pemilik modal kecil agar dapat bertahan dalam kompetisi pasar bebas. Untuk itu, pemerintah harus berperan sebagai lembaga yang menstimulasi akumulasi kapital, mengalokasikan sumber daya, menyediakan dan mengelola tenaga kerja, dan mengontrol transaksi ekonomi.

Bagaimanapun, pembangunan telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan suatu bangsa yang mengantarkan negara-negara sedang berkembang memasuki tahapan modernisasi sebagai titik lompatan menuju kehidupan yang maju dan sejahtera, meskipun juga menciptakan ketimpangan dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Munculnya dampak pembangunan berupa kesenjangan dan ketimpangan kemudian melahirkan teori pembangunan yang lebih memusatkan perhatian pada empat isu fundamental yaitu: (a) distribusi pendapatan, (b) ketidakadilan, (c) kemiskinan, dan (d) kebebasan dan demokrasi. Setidaknya hal ini terungkap dalam *The Meaning of Development* karya Dudley Seers (1969), yang menyatakan, bahwa makna paling hakiki pembangunan itu bukan semata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan. Keempat isu ini jauh lebih mendasar yang harus diselesaikan dalam proses pembangunan, sebab semuanya itu menjadi problem kritical yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan yang hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak berarti sama sekali, bila di sebagian masyarakat yang lain justru dijumpai fakta kemiskinan dan ketidakadilan. Menurut pengalaman banyak negara berkembang, kesenjangan ekonomi yang tajam

justro menjadi faktor pemicu munculnya kekacauan sosial akibat gerakan protes, pertikaian etnis, dan konflik kelas yang sulit dikendalikan.

Wacana teori pembangunan dewasa ini telah memasukkan isu kebebasan dan demokrasi yang disuarakan oleh ahli-ahli sosiologi, politik, dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada isu pembangunan dan perkembangan demokrasi politik. Mereka berargumen, bahwa selain pertumbuhan, peningkatan pendapatan nasional, dan akumulasi kapital, pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis, yang tercermin pada adanya pengakuan apa yang disebut *civil rights and political liberty* (lihat Diamond (1995), Amartya Sen (1999), serta Meier dan Stiglitz (2002)). Hak asasi manusia dan kebebasan politik diperlukan untuk menjamin keamanan sosial dan memelihara stabilitas politik. Arus utama pemikiran pembangunan menunjukkan bahwa para pemikir ekonomi memiliki sensitivitas yang tinggi dalam merespons ide-ide baru yang berkembang dinamis. Isu-isu kritikal yang muncul mendapat apresiasi yang memadai, bahkan selalu muncul kecenderungan untuk merevisi premis-premis dasar pembangunan yang diajukan oleh pemikir teori pembangunan sebelumnya. Sehingga dalam perkembangannya, jika kita perhatikan secara mendalam, akan terlihat penyesuaian, perubahan, dan revisi atas teori dan paradigma pembangunan itu dari waktu ke waktu dengan menyerap gagasan-gagasan baru agar tetap relevan dan kontekstual dengan semangat zaman. Kemunculan sebuah teori niscaya akan diperdebatkan oleh pendukung dan penentangannya, untuk menguji tingkat validitasnya secara ilmiah.

B. Modernitas: Sebuah Model Pembangunan

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berkembang mengikuti wacana teori dan aksi secara berulang-ulang, yaitu (1) teori modernisasi yang muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan; (2) teori ketergantungan (*dependency theory*) sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pola pembangunan modernisasi yang memiliki sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju; dan (3) teori sistem dunia (*the world system theory*) yang dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme.

Pendekatan modernisasi dalam pembangunan oleh ahli-ahli ekonomi Barat diperkenalkan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an. Dalam berbagai literatur pembangunan, teori pembangunan ekonomi itu berfokus pada empat isu utama, yaitu: (a) pertumbuhan, (b) akumulasi kapital, (c) transformasi

struktural, dan (d) peran pemerintah. Isu-isu ini merupakan tema dasar yang menjadi kajian penting dan utama dalam evolusi pemikiran pembangunan pada kurun waktu tahun 1950-1975, yang perhatiannya dipusatkan pada empat isu tersebut sebagai topik perdebatan akademis. Pengenalan pendekatan modernisasi yang disampaikan oleh negara dunia Barat tersebut tidak ubahnya seperti imperialisme yang mereka lakukan pada waktu lampau. Imperialisme memberikan perhatian utama pada ekspansi dan dominasi kekuatan imperialis. Imperialis yang ada pada abad 20 pertama-tama melakukan ekspansi cara produksi kapitalis ke dalam cara produksi kapitalis (Roxborough, 1986). Tujuan ekspansi ke negara ketiga pada awalnya hanya untuk meluaskan pasar produknya yang sudah jenuh dalam negeri mereka sendiri, serta untuk pemenuhan bahan baku. Namun, pada perkembangan lebih jauh, ekspansi kapitalis ini sudah mencakup cara-cara produksi, sampai pada struktur ekonomi, dan bahkan ideologi.

Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara-negara yang telah maju, sehingga negara-negara berkembang diharapkan dapat mengikuti langkah negara maju melalui sentuhan modernisasi ala barat tersebut. Sebagai sebuah perubahan sosial, teori modernisasi dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer (1820-1903),³ yang menganalogikan masyarakat sebagai layaknya perkembangan makhluk hidup. Manusia dan masyarakat termasuk didalamnya kebudayaan mengalami perkembangan secara bertahap, yang berkembang dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks menuju tahap akhir yang sempurna. Bagi Spencer perubahan sosial itu mengikuti perkembangan sebuah organisme yang akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi dan integrasi antar organ-organnya. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara internal akan menjadi stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai.

Pemikiran Spencer tentang evolusi masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri yang harus dilalui melalui perubahan struktur dan fungsi serta kompleksitas organisasi ini merupakan salah satu dasar teori modernisasi. Selain itu, pemikir teori modernisasi lainnya adalah Schoorl (1980) yang menjelaskan bahwa modernisasi merupakan suatu

³ Spenser sangat dipengaruhi Charles Darwin pencetus ide evolusi sebagai proses seleksi alam. Charles Darwin menunjukkan bahwa perubahan sosial juga adalah proses seleksi. Masyarakat berkembang melalui proses seleksi di dalam masyarakat kita atas individu-individunya.

proses transformasi perubahan masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk dibidang ekonomi dengan tumbuhnya kompleks industri yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Perkembangan ekonomi ini berakibat pada pergeseran tempat tinggal sebagian penduduk ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern. Ciri penting manusia modern menurut Schoorl adalah masyarakat plural yang merupakan masyarakat yang telah mengalami perubahan struktur dan stratifikasi sosial. Menurut Schoorl (1988), modernisasi yang lahir di Barat akan cenderung ke arah Westernisasi, memiliki tekanan yang kuat meskipun unsur-unsur tertentu dalam kebudayaan asli negara berkembang dapat saja bertahan, namun setidaknya akan muncul ciri kebudayaan Barat dalam kebudayaannya. Schoorl membela modernisasi karena dengan gamblang menyatakan modernisasi lebih baik dari sekadar westernisasi.

Sementara itu, Dube (1988), mengemukakan tiga asumsi dasar konsep modernisasi yaitu (a) ketiadaan semangat pembangunan harus dilakukan melalui pemecahan masalah kemanusiaan dan pemenuhan standar kehidupan yang layak, (b) modernisasi membutuhkan usaha keras dari individu dan kerja sama dalam kelompok, dan (c) kemampuan kerja sama dalam kelompok sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi modern yang sangat kompleks, dan organisasi kompleks membutuhkan perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Manusia modern menurut Dube memiliki ciri yang ditentukan oleh struktur, institusi, sikap, dan perubahan nilai pada pribadi, sosial dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah, sehingga modernisasi sangat memerlukan hubungan yang selaras antara kepribadian dan sistem sosial budaya. Sifat terpenting dari modernisasi adalah rasionalitas, yaitu kemampuan berpikir dalam menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada. Rasionalitas ini menjadi dasar dan karakter pada hubungan antarindividu dan pandangan masyarakat terhadap masa depan mereka.

Lebih jauh, Dube (1988) dengan menggunakan pandangan Lerner menyatakan, bahwa kepribadian modern dicirikan oleh: (1) empati yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain; (2) mobilitas sebagai kemampuan untuk melakukan "gerak sosial" atau kemampuan "beradaptasi," yang memungkinkan individu untuk berpindah status melalui perubahan status, peran, peran ganda, dan stratifikasi sosial yang terbuka; dan (3) partisipasi yang membedakan masyarakat moderen dengan masyarakat

tradisional yang kurang memperhatikan partisipasi individunya. Pada masyarakat tradisional individu cenderung pasif pada keseluruhan proses sosial, sebaliknya pada masyarakat modern keaktifan individu sangat diperlukan sehingga dapat memunculkan gagasan baru dalam pengambilan keputusan.

Berbeda dengan Schroll yang membela modernisasi, Dube secara tegas mengungkapkan berbagai kelemahan modernisasi, antara lain keterlibatan negara berkembang diabaikan, konsep persamaan hak dan keadilan sosial tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Lebih lanjut Dube menjelaskan kelemahan modernisasi antara lain: (a) modernisasi yang didasarkan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara; (b) tidak adanya indikator sosial pada modernisasi; (c) keterlibatan negara berkembang diabaikan, konsep persamaan hak dan keadilan sosial antara negara maju dan berkembang tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan; (d) modernisasi yang didasarkan pada penggunaan iptek pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara; (e) tidak adanya indikator sosial pada modernisasi; dan (f) keberhasilan negara barat dalam melakukan modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk sumber daya alam dengan mudah dari negara berkembang dengan murah dan mudah. Keberhasilan negara Barat dalam melakukan modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk sumber daya alam dari negara berkembang dengan murah dan mudah, modernisasi tidak ubahnya seperti kolonialisme gaya baru.

C. Teori Ketergantungan dan Sistem Dunia

Berbagai kelemahan teori modernisasi memunculkan wacana baru dalam teori pembangunan sebagai sebuah alternatif teori yang dianggap merupakan antitesis dari teori modernisasi, yaitu teori dependensi. Teori dependensi merupakan analisis tandingan terhadap teori modernisasi. Teori ini didasari fakta lambatnya pembangunan dan adanya ketergantungan dari negara dunia ketiga, khususnya di Amerika Latin. Frank adalah pelopor kemunculan teori dependensi yang pada awalnya menyerang pendapat Rostow yang dinilai mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial.⁴ Pemikiran Frank ini disambut

⁴ Perspektif dependensi muncul setelah perspektif modernisasi diterapkan di banyak negara terbelakang. Pengamatan yang dilakukan oleh ahli sejarah telah memberikan gambaran serta dukungan bukti empirik terhadap kegagalan modernisasi. Sebagai sebuah kritik, dependensi harus dapat menguraikan kelemahan-kelemahan dari modernisasi dan mengeluarkan pendapat baru yang mampu menutup kelemahan tersebut. Penggunaan metode historis struktural telah memberikan bukti empirik yang sangat cukup untuk

oleh pemikir sosial lainnya seperti Santos, Roxborough, Cardoso dan Galtung. Teori dependensi memiliki saran yang radikal, karena teori ini berada dalam paradigma neo-Marxis yang analog dengan perkiraan Marx tentang akan adanya pemberontakan kaum buruh terhadap kaum majikan dalam industri yang bersistem kapitalisme. Marx mengungkapkan kegagalan kapitalisme dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat namun sebaliknya membawa kesengsaraan. Penyebab kegagalan kapitalisme adalah penguasaan akses terhadap sumber daya dan faktor produksi menyebabkan eksploitasi terhadap kaum buruh yang tidak memiliki akses. Eksploitasi ini harus dihentikan melalui proses kesadaran kelas dan perjuangan merebut akses sumber daya dan faktor produksi untuk menuju tatanan masyarakat tanpa kelas.

Asumsi dasar teori ketergantungan ini adalah adanya anggapan bahwa ketergantungan merupakan gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, yang disebabkan oleh faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global. Frank menyatakan bahwa pemahaman terhadap sejarah ekonomi, sosial dan politik menjadi suatu hal yang penting dalam menentukan kebijakan pembangunan pada suatu negara yang karakteristiknya dapat dikaji dari perspektif historis. Pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh negara terbelakang saat ini sebenarnya merupakan hasil pengalaman sejarah negara maju yang kapitalis seperti negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Terdapat perbedaan sejarah yang sangat mendasar antara negara maju dan negara bekas koloni atau daerah jajahan sehingga menyebabkan struktur sosial masyarakatnya berbeda. Frank juga menganggap adanya kegagalan penelitian sejarah dalam menganalisis hubungan ekonomi yang terjadi antara negara penjajah dan negara jajahannya selama masa perdagangan dan imperialisme.

Teori dependensi berbicara tentang kapitalisme dan eksploitasi sebagai penyebab kegagalan negara pinggiran. Frank menyajikan lima tesis tentang dependensi, yaitu:

1. Terdapat kesenjangan pembangunan antara negara sentral dan pinggiran, pembangunan pada negara satelit dibatasi oleh status negara satelit tersebut.
2. Kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara sentral sedang melemah.

memberikan kritik terhadap modernisasi. Sebagai sebuah proses perubahan sosial yang memakan waktu sangat lama, pembangunan erat kaitannya dengan sejarah perkembangan suatu negara. Oleh karena itu tidak salah apabila Frank menyatakan bahwa perkembangan ekonomi negara saat ini tidak lepas dari bagaimana keadaan sejarah ekonomi, politik dan sosialnya di masa lalu.

3. Negara yang terbelakang dan terlihat feodal saat ini merupakan negara yang memiliki kedekatan ikatan dengan negara sentral pada masa lalu.
4. Kemunculan perkebunan besar di negara satelit sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keuntungan ekonomi negara sentral.
5. Eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalisme menyebabkan menurunnya kemampuan memproduksi pertanian di negara satelit.

Selanjutnya, Frank memberikan alasan dari kegagalan negara pinggiran untuk maju seiring dengan negara sentral, yang disebabkan oleh adanya eksploitasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang dilakukan oleh negara sentral. Bagi teori dependensi kapitalisme selalu dituding sebagai penyebab kemiskinan dan kegagalan pembangunan di negara pinggiran, karena eksploitasi sumber daya alam serta proses pertukaran yang tidak seimbang antara negara sentral dan negara pinggiran menyebabkan tidak seimbangnya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing kelompok negara.

Sementara itu, Santos mengasumsikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri. Tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara pusat adalah kapitalisme sehingga menyebabkan timbulnya usaha melakukan ekspansi keluar, sedangkan tipe hubungan ekonomi pada negara periferi merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara pusat. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Tesis yang diajukan oleh Santos adalah pembagian ketergantungan menjadi tiga jenis yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan dan ketergantungan teknologi industri. Ketergantungan kolonial merupakan bentuk ketergantungan yang dialami oleh negara jajahan. Ketergantungan kolonial merupakan bentuk ketergantungan yang paling awal dan hingga kini telah dihapuskan. Pada ketergantungan kolonial, negara dominan, yang bekerja sama dengan elit negara tergantung, memonopoli pemilikan tanah, pertambangan, tenaga kerja, serta ekspor barang galian dan hasil bumi dari negara jajahan. Sedangkan pada ketergantungan industri keuangan, ekonomi negara tergantung lebih terpusat pada ekspor bahan mentah dan produk pertanian. Ekspor bahan mentah menyebabkan terkurasnya sumber daya negara, sementara nilai tambah yang diperoleh kecil. Pada bentuk ketergantungan teknologi industri terhadap dunia ketiga adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri.

Teori sistem dunia sesungguhnya merupakan analisi lanjutan dari teori dependensi yang memberikan penjelasan lebih lanjut dan merubah unit analisisnya kepada sistem dunia, sejarah kapitalisme dunia, serta spesifikasi sejarah lokal. Teori sistem dunia ini memandang bahwa dunia ini hanya memiliki satu sistem ekonomi saja yaitu sistem ekonomi kapitalis, sedangkan negara-negara sosialisanya merupakan satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia tersebut. Artinya, bagi teori sistem dunia ini, tidak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Kemunculan teori sistem dunia ini, disamping merupakan kelanjutan dari teori dependensi, juga lahir dari adanya pertentangan dua teori besar yang saling bertolak belakang, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Dari teori dependensi, teori sistem dunia mengadopsi konsep ketimpangan nilai tukar, eksploitasi negara pinggiran oleh negara pusat (*centre*) dan konsep pasar dunia.

Tesis yang disampaikan oleh teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semipinggiran dan negara pinggiran. Ketiganya terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semipinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran melaksanakan salah satu atau kombinasi dari strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri diatas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semipinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semipinggiran melakukan perluasan pasar serta introduksi teknologi modern.

Terdapat dua alasan menurut teori sistem dunia yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis dunia saat ini memerlukan kategori semipinggiran, yaitu (1) dibutuhkannya sebuah perangkat politik dalam mengatasi disintegrasi sistem dunia, dan (2) sarana pengembangan modal untuk industri dari negara sentral. Disintegrasi sistem dunia sangat mungkin terjadi sebagai akibat "kecemburuan" negara pinggiran dengan kemajuan yang dialami oleh negara sentral. Kekhawatiran akan timbulnya gejala disintegrasi ini adalah karena jumlah negara miskin yang sangat banyak harus berhadapan dengan sedikit negara maju. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengurangi disparitas antara negara maju dan negara miskin, mengingat secara ekonomi, negara maju akan mengalami kejenuhan investasi sehingga diperlukan perluasan atau ekspansi pada negara lain. Upaya perluasan investasi ini membutuhkan lokasi baru pada negara miskin, yang kemudian dikenal dengan istilah negara semipinggiran.

Teori sistem dunia yang melakukan analisis dunia secara global, berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia.⁵ Kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh-jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antarnegara, bahkan sampai ke tingkat antarindividu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.

Wallerstein sebagai tokoh utama yang menggagas teori sistem dunia mengajukan tesis tentang perlunya gerakan populis berskala nasional digantikan oleh perjuangan kelas berskala dunia. Dalam kaitan ini, Wallerstein menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan kebijakan yang merusak tata sistem ekonomi dunia, karena (a) impian tentang keadilan ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan bagi banyak negara; (b) keberhasilan pembangunan pada beberapa negara menyebabkan perubahan radikal dan global terhadap sistem ekonomi dunia; dan (c) strategi pertahanan surplus ekonomi yang dilakukan oleh produsen berbeda dengan perjuangan kelas yang berskala nasional.

Tabel 1.
Perbandingan antara Teori Dependensi
dan Teori Sistem Dunia

Elemen Perbandingan	Teori Dependensi	Teori Sistem Dunia
Unit Analisis	Negara-Bangsa	Sistem dunia
Metode Kajian	Historis struktural	Dinamika sejarah dunia
Struktur Teori	Dua kutub (sentral-pinggiran)	Tiga kutub (sentral-semipinggiran-pinggiran)
Arah Pembangunan	Deterministik	Peluang terjadinya mobilitas
Arena Kajian	Negara pinggiran	Negara pinggiran, negara semipinggiran dan sistem ekonomi dunia

Sumber: (Suwarsono dan So, 1991)

⁵ Teori sistem dunia memberikan penjelasan pembangunan ekonomi pada negara pinggiran dan semipinggiran. Negara-negara sosialis, yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Negara sosialis yang kemudian menerima dan masuk ke dalam pasar kapitalis dunia adalah China, khususnya ketika periode pengintegrasian kembali (Penelitian So dan Cho dalam Suwarsono dan So, 1991).

Kendatipun antara teori dependensi dan teori sistem dunia ini memiliki kesamaan, namun juga terdapat perbedaan, yaitu (1) pada unit analisis yang digunakan, pada teori dependensi unit analisisnya pada tingkat negara atau nasional, sedangkan teori sistem dunia unit analisisnya global atau sistem dunia yang merupakan gambaran dari hubungan antarnegara; (2) pada metode kajian, pada teori dependensi metodenya adalah historis struktural yang mempelajari masa pasang surut sebuah negara, sedangkan teori sistem dunia menggunakan dinamika sejarah sistem dunia secara global; (3) pada struktur teori, teori dependensi menggunakan struktur teori dua kutub, sedangkan teori sistem dunia menggunakan struktur teori tiga kutub; (4) pada arah pembangunan, yaitu teori dependensi menyatakan bahwa pembangunan bersifat searah dan deterministik dari negara sentral ke negara pinggiran, sedangkan teori sistem dunia menyatakan bahwa arah pembangunan lebih bersifat fleksibel dengan adanya peluang perpindahan status suatu negara dalam sistem dunia; dan (5) pada arena kajian, yaitu teori dependensi menjadikan negara pinggiran sebagai arena kajian, sedangkan teori sistem dunia menggunakan negara pinggiran, negara semipinggiran dan sistem ekonomi dunia sebagai arena kajiannya.

D. Pergeseran Nilai Masyarakat

Indonesia adalah salah satu negara yang selama ini tidak lepas dari pendekatan modernisasi yang dinilai sebagai jalan dalam mencapai kemakmuran. Penelitian tentang modernisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Dove (1988) menunjukkan dampak negatif modernisasi di daerah pedesaan. Dove mengulas lebih jauh kegagalan modernisasi sebagai akibat benturan dua budaya yang berbeda dan adanya kecenderungan penghilangan kebudayaan lokal dengan nilai budaya baru yang masuk bersama dengan modernisasi. Dove membagi dampak modernisasi menjadi empat aspek yaitu ideologi, ekonomi, ekologi dan hubungan sosial. Pada aspek ideologi, misalnya, penelitian Dove menunjukkan bahwa modernisasi telah mengakibatkan tergusurnya agama lokal dan digantikan oleh agama baru. Modernisasi seolah menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang mampu membelenggu kebebasan asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Demikian pula dengan pengetahuan lokal yang sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat digantikan oleh pengetahuan baru yang dianggap lebih superior. Hal ini membawa kita pada pertanyaan akhir yang layak untuk didiskusikan, yaitu apakah modernisasi masih layak dipertahankan sebagai perspektif pembangunan bangsa Indonesia. Modernisasi perlu didiskusikan lebih jauh dengan mengemukakan perbaikan-perbaikan konsep yang lebih diselaraskan dengan budaya serta pengetahuan lokal masyarakat, mengingat modernisasi

melahirkan globalisasi sebagai budaya dunia yang mempengaruhi bahkan pada batas tertentu menggantikan nilai dan pengetahuan lokal masyarakat setempat.

Globalisasi merupakan salah satu bentuk perkembangan kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang menghilangkan berbagai rintangan, sehingga membuat dunia ini menjadi semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi membawa perspektif baru bagi dunia yang saat ini diterima sebagai kenyataan masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Globalisasi berpengaruh di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. John Micklethwait dalam *A Future The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, menulis bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang terus menggilas masyarakat dunia ini, maka perlu pengkajian kebudayaan secara komprehensif. Globalisasi telah menjadi fenomena ekonomi, politik, dan budaya (2000: 23). Pandangan ini ada benarnya, mengingat banyak kasus anomie sosial dan alienasi kultural dengan segala konsekuensinya yang terjadi akhir-akhir ini, yang menyebabkan disorientasi norma dan nilai. Bagaimanapun, perubahan terjadi karena desakan dan kebutuhan pemenuhan hidup yang lebih baik, sehingga pola pikir berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dihadapi. Demikian pula dengan pola pikir manusia yang diwujudkan dalam tradisi, dengan adanya perubahan yang mengglobal, maka tradisi itu pun selalu berubah pula.

Globalisasi muncul sebagai konsekuensi dari paradigma modernisasi dalam pembangunan yang cenderung menimbulkan pergeseran budaya, tata nilai, adat istiadat, dan perubahan lain dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran budaya ini antara lain oleh pesatnya ilmu dan kemajuan teknologi yang membawa dampak perubahan dan pergeseran nilai di masyarakat. Pergeseran nilai merupakan perubahan yang menyebabkan tradisi lokal menjadi tidak bermakna yang ditinggalkan oleh penduduknya. Tradisi lokal sebagai peninggalan masa lalu merupakan warisan yang tak ternilai sebagai dasar norma dan moralitas, maka sudah semestinya semua bentuk peninggalan dilestarikan demi memperkaya dan memperkuat khasanah budaya. Budaya lokal perlu menjadi pertimbangan dalam menghadapi tantangan globalisasi, agar tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Budaya lokal merupakan nilai yang menjadi ciri atau identitas suatu budaya yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku hidup bermasyarakat dari masyarakat pendukung budaya lokal tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal perlu diaktualisasikan sebagai energi sosial dalam proses pembangunan, termasuk pemberdayaan masyarakat agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi *knowledge* atau *local wisdom* yang tersimpan ingatan sejarah masyarakat.

BAB III PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Pembangunan Berpusat pada Rakyat

Wacana model-model pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi, karena pilihannya berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang dipilih. Pembagian sistem ekonomi yang dilakukan oleh David C. Korten dengan mengutip Kenneth Boulding, yang membedakan dua sistem ekonomi, yaitu: *cowboy economic system* dan *space-ship economic system*. Dalam *cowboy economic system*, sumber daya alam tersedia secara alamiah dan melimpah, sehingga manusia dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebaliknya, dalam sistem kapal ruang angkasa, Korten mengatakan, bahwa “segalanya serba terbatas”, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan hati-hati, atau akan hancur binasa. Manusia telah berada mendekati batas tersebut, atau mungkin telah melampaui batas dibanyak bidang esensial. Tanpa restrukturisasi yang serius terhadap komposisi pertumbuhan untuk mengurangi beban lingkungan hidup, maka batas toleransi ekologi akan terlampaui, sehingga akan semakin sulit untuk melakukan koreksi. Oleh karena itu, menurut Korten, kita harus mengubah secara mendasar sistem perekonomian yang sekarang ada, karena yang menentukan dewasa ini adalah bukan pertumbuhan melainkan transformasi. Hal mendasar yang perlu diselesaikan adalah (a) masalah keadilan, (b) keseimbangan sumber daya alam, dan (c) masalah partisipasi.

Atau dengan perkataan lain, orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosial tersebut adalah (a) *social services*, (b) *social welfare services*, dan (c) *community development*. Paling tidak, meminjam asumsi Todaro, ada tiga sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu *pertama*, meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok. *Kedua*, meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri

sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa. Dan *ketiga*, memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional.

Dalam pelaksanaannya, setiap negara menerapkan teori pembangunan yang berbeda dan dengan paradigma yang berbeda pula, baik itu didasarkan atas teori modernisasi ataupun teori depedensi. Jika ditelaah lebih lanjut, terlihat bahwa selama ini Indonesia menganut strategi pembangunan yang berorientasi pada strategi *trickle down effect* yaitu pemerataan hasil pembangunan dilakukan dengan mempertinggi pertumbuhan. Fenomena yang terjadi dewasa ini memperlihatkan, bahwa strategi tersebut tidak memperlihatkan hasilnya, karena pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh konglomerasi selalu membuat wadah baru bagi setiap tetesan yang diharapkan mengucur.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa strategi pembangunan yang perlu dipertimbangkan untuk dapat diimplementasikan, yaitu *pertama*, strategi *growth with equity*. Strategi ini merupakan hasil perdebatan sengit antara kelompok "*growth*" dan kelompok "*equity*," yang memperlihatkan kekecewaan akibat pembangunan yang terlalu *GNP-oriented*. Pertumbuhan ekonomi tidak memberi pemecahan mengenai masalah kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang, justru memperlebar jurang perbedaan antara kaya dan miskin. *Kedua*, strategi pembangunan, yang diarahkan pada perbaikan "*human factor*," yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. Investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan "*physical capital stock*" tetapi juga "*human capital stock*" dengan mengambil prioritas kepada usaha peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi. Melalui perbaikan mutu sumber daya manusia dapat ditumbuhkan inisiatif-inisiatif dan sikap kewiraswastaan, dan lapangan-lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan meningkat. Dan *ketiga*, adalah strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Strategi pembangunan ini merupakan strategi yang berorientasi pada manusianya (*people centered development*), yaitu suatu proses yang memberikan atau memperluas pilihan bagi setiap orang. Sejalan dengan perkembangan pemikiran yang berorientasi memperbaiki kelemahan "*COR model*" atau "*production function approach*" tersebut, tetapi berlainan dengan titik tolak "teori pengembangan sumber

daya manusia" yang sasarannya diarahkan pada perbaikan mutu sumber daya manusia.

Konsep utama dari pembangunan berpusat rakyat adalah suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, sehingga terkesan pembangunan berdimensi rakyat ini bersifat sangat normatif. Kemunculan strategi ini adalah merupakan reaksi dari pola pembangunan konvensional yang dinilai terlalu berpusat pada produksi, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Selain itu pola pembangunan konvensional dinilai banyak berakibat terhadap martabat manusia, dan lingkungan. Alternatif teori pembangunan yang diperlukan adalah yang memberikan perhatian terhadap potensi manusiawi dan prinsip pembangunan swadaya.

Sebagian besar dari pemikiran alternatif tersebut cenderung untuk memberikan rekomendasi bagi kebijaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada prakarsa, permasalahan dan kebutuhan masyarakat sendiri. Pada umumnya pemikiran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk alternatif lain dari konsep-konsep pembangunan yang sudah banyak digunakan saat ini. David Korten (1984: 9) menyebut pendekatan yang ditawarkan tersebut dengan konsep pembangunan yang memihak rakyat atau pembangunan yang berorientasi kerakyatan (*people centered development*), sebagai sisi lain dari pembangunan yang mementingkan produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah pembangunan yang memihak rakyat dengan teguh berupaya agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat, sedangkan pembangunan yang mementingkan produksi terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem produksi. Robert Chambers (1992: 261) menyebutnya dengan PembangunanDesa yang mulai dari belakang atau proses belajar terbalik. Alternatif pendekatan pembangunan yang ditawarkan tersebut lebih menekankan pentingnya prakarsa dan perbedaan setiap lingkungan masyarakat desa yang akan dibangun. Menurut David Korten (1988: 240), secara lebih operasional pendekatan ini akan tergambar pada sistem swakelola sebagai sisi lain dari sistem komando atau pendekatan proses belajar sosial sebagai sisi lain dari pendekatan "cetak biru" (*blue print approach*).

Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan pemerintah dari yang semula berorientasi pada penyediaan (*providing*) menjadi memungkinkan (*enabling*) yang telah disepakati sebagai bagian dari globalisasi kebijakan lingkungan dan pemukiman dunia. Pergeseran kebijakan ini tentu saja menuntut pergeseran pelaku utama atau tokoh sentral dari pembangunan

itu sendiri, yaitu dari pemerintah kepada masyarakat. Pergeseran pelaku utama ini menempatkan masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Setidaknya, pergeseran ini memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada prakarsa masyarakat serta kemampuan masyarakat sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap program pembangunan pada tingkat komunitas ini menjadi penting.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan. Partisipasi masyarakat perlu didorong terutama didalam perencanaan program pembangunan sebagai suatu konsep yang sangat penting. Hanya sedikit sekali negara yang mau menyatakan secara terbuka mengenai perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, hal ini terlihat dalam istilah yang populer seperti "*bottom up planning*", keterlibatan pada masyarakat akar rumput atau strata masyarakat paling bawah, "*democratic planning*" dan "*participatory planning*".

Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting, yaitu *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, sehingga mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan akan merasa memiliki proyek tersebut. Kepercayaan ini penting, agar proyek dapat diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Myrdal (1968: 851), bahwa kepercayaan membutuhkan perubahan cara berfikir, merasa dan bersikap. Alasan *ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Hal tentu saja tampak selaras dengan konsep "*man-centered development*," yaitu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia, dan diarahkan demi perbaikan nasib manusia yang tidak sekadar sebagai alat pembangunan.

Tujuan pembangunan semacam itu memerlukan ancangan metode baru sebagai metode alternatif yang lebih mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat banyak dan mampu mendudukan masyarakat sebagai pusat dari seluruh kegiatannya yang merupakan azas pembangunan bertumpu pada masyarakat. Menurut Chekki (1979: 6), salah satu model pendekatan yang dapat dijadikan kekuatan penggerak dan pendorong perubahan masyarakat

dikenal sebagai “Pembangunan Masyarakat (*Community development*)”.⁶ Dalam pengertian yang luas pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan berencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara meningkatkan aktivitas yang berorientasi pada kompetisi dan tanggung jawab sosial masyarakat sendiri melalui pendayagunaan potensi dan sumber setempat, mengutamakan inisiatif dan kreatifitas masyarakat serta mengutamakan partisipasi masyarakat (Taliziduhu Ndraha, 1990: 72).

Pengembangan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat, baik dalam aspek material, maupun spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia yang memiliki karakteristik: (a) terikat pada interaksi sosial, (b) mempunyai rasa kebersamaan berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, (c) bergabung dalam satu identitas tertentu, (d) taat pada norma-norma kebersamaan, (e) menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, (f) memiliki kohesi sosial yang kuat, dan (g) menempati lingkungan hidup yang terbatas.

Aspek khusus dalam perubahan sosial yang menjadi pemikiran pokok berbagai program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun di antara komunitas-komunitas tersebut. Pendekatan pertama adalah menolong diri sendiri ketika masyarakat di kawasan perdesaan menjadi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan mengontrol dalam kegiatan pengembangan. Pendamping menjadi fasilitator. Sedangkan komunitas (masyarakat desa) memegang tanggung jawab utama dalam (a) memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; (b) bagaimana memenuhi kebutuhan itu dan (c) mengerjakan sendiri. Masyarakat harus dilihat sebagai subjek dari proses secara keseluruhan. Sehingga proses dari pelaksanaan

⁶ Di Indonesia, gagasan tentang pembangunan masyarakat dikenal dengan istilah Pembangunan Masyarakat Daerah (PMD) dan pertama kali dipelajari dan dijadikan sebagai salah satu dari 19 bidang pembangunan pada Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang Repelita 1956-1960. Ketentuan perundang-undangan itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1969 tentang Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Akan tetapi pada saat itu, tekanan pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dan lebih diprioritas pada masyarakat pedesaan, mengingat rendahnya taraf kehidupan masyarakat pada saat itu dan bagian terbesar masyarakat tinggal di pedesaan. Akan tetapi sejak Repelita III (1979/1980-1983/1984) yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 1979 dan berpedoman pada GBHN 1978 (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/78), lebih lanjut ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa (pembangunan desa) mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat desa dan terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan.

kegiatan pelayanan dalam pengembangan masyarakat selalu meletakkan *community development* dan *community organizers* sebagai landasan.

Pembangunan masyarakat sesungguhnya adalah suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pembangunan masyarakat merupakan metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees (1991:1) pembangunan masyarakat adalah "*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*" Secara khusus pembangunan masyarakat berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat (komunitas).

Pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seringkali, pembangunan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui kampanye yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 2005: 165).

Pembangunan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu masyarakat tumbuh dan berkembang secara berswadaya, terutama masyarakat miskin agar mengeliminasi belenggu-belenggu sosial yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat. seperti tradisi, kebiasaan, cara, dan sikap hidup lainnya yang dapat menjadi hambatan pembangunan. Berkaitan dengan sasaran pembangunan masyarakat, Talizuduhu Ndraha (1982: 107) menguraikan empat sasaran yang disebutkan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya adalah berikut:

- a. Peningkatan tarap hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat;

- b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat;
- c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian biasa membangun dengan atau tanpa partisipasi vertikal dari pihak lain;
- d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kederisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam, dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan bertahap dan terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menurut adanya kegiatan lanjutan.

Sementara itu, prinsip keserasian, mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan teras yang dinyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini pun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin antara kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

B. Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat

Perdefinisi, pengembangan masyarakat adalah suatu proses, baik sebagai ikhtiar atau berdasarkan prakarsa masyarakat sendiri, maupun kegiatan pemerintah sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya berbagai komunitas. Di samping itu, juga sebagai proses mengintegrasikan berbagai komunitas kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan mereka

untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara agar berjalan secara terpadu. Proses ini mencakup dua elemen dasar, yaitu (1) partisipasi masyarakat sebagai usaha untuk memperbaiki taraf hidup berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri; dan (2) bantuan teknis serta pelayanan lainnya yang dimaksudkan untuk membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain serta membuat semua itu lebih efektif. Kedua proses tersebut dinyatakan didalam berbagai program yang dirancang untuk melancarkan perbaikan terhadap berbagai program-program khusus yang biasanya memperhatikan masyarakat setempat yang umumnya memiliki beragam kepentingan. Kepentingan tersebut pada umumnya diekspresikan dalam organisasi kelompok fungsional yang lebih dibatasi cakupan kepentingannya, bukan oleh kelokalannya.

Pengembangan masyarakat merupakan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri atau bersama pemerintah atau lembaga dari luar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui prakarsa, kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Sanders (Cary, 1970: 18), ada 4 (empat) cara dalam memandang pengembangan masyarakat, yaitu sebagai proses, sebagai metode, sebagai program, dan sebagai gerakan (*movement*).

Sebagai suatu proses, pengembangan masyarakat merupakan siklus perubahan yang berkesinambungan dari suatu tahap atau kondisi menuju masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dan menempuh berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Hal ini mencakup (a) perubahan dari satu atau dua orang atau sebagian kecil elit yang memiliki otoritas membuat keputusan masyarakat, kepada perubahan yang memungkinkan semua warga masyarakat mampu membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama; (b) perubahan dari kerja sama terbatas kepada kerja sama yang lebih luas; (c) perubahan dari sedikitnya partisipasi seseorang dalam kegiatan bersama kepada partisipasi penuh didalam kegiatan; (d) perubahan dari menggantungkan diri pada sumber bantuan dari luar, kepada penggunaan secara maksimal berbagai sumber untuk kepentingan bersama.

Sebagai metode *community development* bekerja dengan dua cara, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat, yang dapat diterapkan pada proses apa saja. Inilah landasan teoritis bagi eksistensi organisasi masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. Pengembangan masyarakat sebagai suatu metode berfungsi untuk menggali potensi sumber daya manusia dengan cara memberikan bimbingan dan latihan atau keahlian tertentu serta bantuan teknis lainnya. Sementara itu, sebagai program

pengembangan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Titik berat pengembangan masyarakat sebagai program adalah pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan, sasaran, kegiatan-kegiatan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun pendek sangat tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat maupun kegiatan tersebut. Tekanan utama dalam melihat pengembangan masyarakat sebagai program adalah penyelesaian dari serangkaian kegiatan yang bisa diukur hasilnya secara kuantitas dan bisa dilaporkan.

Pengembangan masyarakat juga dapat dipandang sebagai gerakan, yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan harapan-harapan yang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai gerakan, pengembangan masyarakat merupakan suatu media pelembagaan struktur organisasi. Pengembangan masyarakat dirancang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta jika memungkinkan atas dasar prakarsa mereka sendiri. Namun jika prakarsa itu tidak muncul secara spontan, maka dapat dilakukan berbagai teknik untuk menimbulkan dan merangsang tanggapan yang aktif dan positif terhadap gerakan itu. Pada umumnya pengembangan masyarakat bersifat komperhensif dan dijadikan bagian integral pembangunan nasional yang diharapkan menghasilkan tigahal (Taliziduhu, 1990: 78):

- a. Kesatuan pikiran dan tindakan antarinstansi dan badan yang menyelenggarakan atau mengambil bagian dalam pembangunan komunitas, baik pemerintah maupun masyarakat dan swasta;
- b. Perubahan cara berfikir dan cara hidup sosial dan ekonomi masyarakat melalui organisasi masyarakat;
- c. Pengembangan wilayah (*area development*) berdasarkan pendekatan tujuan-tujuan ganda (*multipurpose approaches*).

Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi yang didasarkan pada inisiatif dan swadaya masyarakat merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Untuk itu diperlukan usaha pengembangan masyarakat yang bersifat praktis dan mengikutsertakan seluruh masyarakat, yaitu melalui penentuan kebutuhan dan masalah masyarakat setempat, baik perorangan maupun kelompok, menentukan prioritas masalah dan kebutuhan, membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan dan masalah tersebut berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Arthur Dunham (1962: 216) yang menyatakan, bahwa "pengembangan masyarakat mencakup perencanaan yang difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bantuan teknis, integrasi berbagai keahlian untuk membantu masyarakat, serta ditekankan pada prinsip gotong royong dan

partisipasi masyarakat". Oleh karena itu tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya manusia, termasuk kemampuan beradaptasi pada lingkungan dan kesadaran masyarakat untuk terlibat pada program-program pembangunan, sehingga masyarakat mau berpartisipasi.

Pengembangan masyarakat memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu *pertama* penerapan program ditetapkan dari bawah oleh dan bersama masyarakat setempat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan program akan berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat. *Kedua*, program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat, sehingga diharapkan program itu dapat berhasil dengan baik karena program tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan seberapa jauh sumber-sumber daya dan dana yang ada di masyarakat setempat dapat mendukung berjalannya suatu program. *Ketiga*, peranan masyarakat didalam pelaksanaan program sangat diperlukan untuk membantu kelancaran dan keberhasilan program, karena didalam kerja sama diantara masyarakat tersebut akan mendorong terbentuknya gotong royong dan saling tolong menolong.

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi masyarakat dan manfaat program pembangunan sangat diperlukan pada awal pelaksanaan program pembangunan. Hal ini penting, agar masyarakat tergerak untuk memperbaiki kondisi kehidupannya dan berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut. Oleh karena itu, langkah awal di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat adalah pemberian informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan serta mempelajari kondisi kehidupan masyarakat. Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Peter M. Blau yang berpendapat bahwa: "semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu" (Blau, 1974: 129). Dengan demikian, di dalam partisipasi masyarakat berlaku pula prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principles*).

Salah satu strategi pengembangan masyarakat adalah menumbuhkan identitas pada loyalitas *local community*. Kelokalan adalah kunci untuk memobilisasi proyek-proyek pengembangan masyarakat, tetapi lokalitas itu sendiri mempunyai beberapa kelemahan yaitu masyarakat tidak lagi mempunyai kekuasaan penuh atau otonomi atas daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini antara lain disebabkan karena pemerintah pada tingkat lokal merupakan pelaksana dari unit-unit pemerintahan yang lebih tinggi. Institusi-institusi setempat tidak dapat lagi terlepas dari pengaruh sistem komunitas yang lebih luas.

Hal ini terutama terjadi pada pemerintahan lokal yang berbentuk kelurahan. Oleh karena itu pada perkembangannya, loyalitas terhadap komunitas tidak hanya dibentuk oleh lokalitas (*place community*), tapi juga dapat dibentuk oleh *non-place community* yaitu komunitas yang terbentuk karena adanya keterikatan terhadap minat dan kepentingan yang sama. Hal ini juga didasarkan pertimbangan bahwa banyak lokalitas khususnya di daerah perkotaan yang masyarakatnya sangat heterogen, sehingga keterikatan diantara masyarakatnya rendah dan tidak mencerminkan suatu komunitas yang bercirikan adanya "*feeling and sentiment*" yang tinggi. Dengan demikian, kelemahan dari penerapan pengembangan masyarakat pada lokalitas yang menyangkut loyalitas komunitas dapat diatasi dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan minat-minat tertentu, sehingga komunitas tersebut memiliki kekuasaan atau otonomi atas kegiatan yang dilakukan di daerahnya selama tidak bertentangan dengan kebijakan dari pemerintahan lokal yang ada di daerahnya.

Di dalam melakukan program pengembangan masyarakat, kemampuan dan kebutuhan masyarakat penting untuk dipahami terlebih dahulu agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dan masalah ini merupakan sumber daya yang penting, karena merekalah yang lebih mengenal masalahnya sehingga diharapkan lebih mampu mengatasi masalahnya sendiri. Swadaya sosial adalah kemampuan yang ada pada diri masyarakat sendiri untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan adanya warga masyarakat yang berpikiran dinamis dan berkeinginan untuk merubah keadaannya. Selain itu, juga diperlukan adanya suatu kondisi di mana pimpinan formal dan informal dalam masyarakat bersikap mendukung perubahan yang terjadi pada lingkungannya serta memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi didalam kegiatan swadaya sosial masyarakat. Menumbuhkan swadaya sosial masyarakat memerlukan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, pendapatan, agama, adat istiadat, heterogenitas masyarakat, dll. Dengan demikian swadaya sosial masyarakat perlu dibina dengan tujuan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang dinamis dan mampu memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat akan masalah/kebutuhan dan potensi/sumber yang dimilikinya merupakan langkah penting di dalam pengembangan masyarakat.

Keberhasilan pengembangan masyarakat terlihat dari keterlibatan anggota masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan adanya konsensus bersama tentang tujuan pengembangan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang

akan dicapai dalam tujuan tersebut. Sebagai suatu ideologi pengembangan masyarakat lebih mengutamakan tujuan-tujuan yang bersifat nonmaterial dibandingkan dengan yang material. Dalam konteks ini perubahan pada nilai-nilai, sikap dan aspirasi individu atau masyarakat merupakan syarat pokok bagi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam mengukur keberhasilan suatu program pembangunan, para ahli pengembangan masyarakat lebih mengutamakan proses dari pada hasil suatu program, khususnya yang menyangkut perubahan cara berfikir dan bersikap dalam pembangunan. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu program menjadi lebih panjang. Itu sebabnya masalah waktu dan laju perubahan masyarakat tidak boleh menjadi faktor utama (faktor yang menentukan) di dalam pertumbuhan suatu komunitas (*community*).

Pengembangan masyarakat sangat mengutamakan konsensus, karena kemampuan masyarakat untuk menyepakati rencana-rencana kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang mereka hadapi merupakan salah satu bentuk dari proses partisipasi masyarakat. Adanya konsensus juga memungkinkan terjadinya komunikasi antarkelompok dan kelompok kepentingan didalam masyarakat serta diskusi kelompok, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan. Pengembangan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat (*personality growth*) merupakan pokok perhatian dalam pengembangan masyarakat. Hal ini merupakan keterbatasan pengembangan masyarakat sebagai suatu strategi perubahan sosial dalam skala besar, karena dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat lebih menyangkut pendekatan psikologis daripada sosio-ekonomis. Perbaikan ekonomi merupakan salah satu targetnya, tetapi perhatian pengembangan masyarakat yang utama adalah pada proses *personality growth*. Hal ini tentu saja memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Kerja sama (kolaborasi) dapat mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat, karena kerja sama (kolaborasi) merupakan aspek penting dalam membina swadaya sosial. Adanya kerja sama (kolaborasi) menunjukkan adanya kemauan masyarakat untuk bekerja bersama-sama atas dasar tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama adalah kegiatan kerja sama antara sejumlah besar warga masyarakat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yang berguna untuk kepentingan umum. Kerja sama harus muncul karena inisiatif dan swadaya masyarakat sendiri, atau dapat pula

karena paksaan dari pihak luar. Agar warga masyarakat tidak merasa terpaksa dalam melakukan suatu kegiatan, maka mereka harus dapat diyakinkan sehingga dapat dengan sukarela melaksanakan kegiatan, karena mereka merasa bahwa program kegiatan tersebut sebagai miliknya sendiri. Dengan demikian maka masyarakat akan lebih berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kemasyarakatan.

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan program pembangunan juga merupakan aspek yang penting. Perkembangan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh faktor kondisi masyarakat, kemampuan petugas lapangan maupun kebijaksanaan programnya. Dalam partisipasi masyarakat harus diperhatikan tujuan program yang akan dilaksanakan apakah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta menikmati hasil dari program yang dilaksanakan. Dengan demikian bila terjadi hambatan atau masalah dalam proses partisipasi tidak akan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat diperlukan suatu keyakinan bahwa pada hakekatnya masyarakat cukup potensial atau memiliki kemampuan untuk menanggulangi masalahnya. Disamping itu juga adanya petugas lapangan yang memiliki kemampuan dalam mendorong pengembangan kreativitas dan kemampuan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam melaksanakan program pembangunan. Keputusan-keputusan individu untuk berpartisipasi dan bagaimana untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh (a) kondisi sosialnya yaitu seperangkat karakteristik sosial yang diartikan sebagai ruang hidup tempat tinggal, apa yang dilakukan untuk kehidupannya, pendidikannya dan seterusnya; (b) seperangkat nilai masyarakat; dan (c) kebijakan lembaga.

Dalam upaya penerapan model intervensi pengembangan masyarakat sebagai suatu *proses*, bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat agar masyarakat memahami betul manfaat dan peranannya dalam program pembangunan tersebut; masyarakat mampu merumuskan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya; masyarakat mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki; serta masyarakat mampu menyusun rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pada pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, tahap kegiatan tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan, strategi dan teknik serta metodologi tertentu yang diharapkan dapat

merangsang prakarsa dan swadaya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan.

Terdapat tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan pembangunan masyarakat ini, yaitu pertama memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan mengembangkan kemandirian dan memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis ketetanggaan (*neighbourhood*). Ketetanggaan sebagai salah satu bentuk lokalitas kegiatan mendasarkan pada "kebutuhan yang dirasakan" (*felt needs*) oleh masyarakat untuk mengawali proses pengembangan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pendekatan pengembangan masyarakat lebih dititikberatkan pada proses (*process goals*). Penentuan tujuan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kondisi permasalahan di masyarakat adalah rendahnya sumber daya dalam memecahkan masalah secara demokratis. Kedua, melibatkan kreatifitas dan kerja sama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempersyaratkan adanya kerja sama dan kreatifitas sebagai metode dasar proses pengembangan masyarakat. Ciri kedua ini memandang komunitas sebagai kelompok masyarakat yang secara potensial kreatif dan kooperatif dalam merefleksikan idealisme sosial yang positif terhadap upaya-upaya kolaboratif dan pembentukan identitas komunitas. Strategi perubahan dasar dalam melibatkan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri, menggunakan taktik dan teknik konsensus, komunikasi antara kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat (komunitas), dan diskusi kelompok. Media perubahan yang paling cocok dalam proses ini adalah dengan memanipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas (*small task oriented groups*). Ketiga, menggunakan model intervensi yang bersifat nondirektif yang difokuskan pada peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler-katalis*), pembangkit semangat (*encourager*) dan pendidik (*educator*) dalam arti orang yang mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Dalam pengembangan masyarakat, pendekatan nondirektif lebih cepat diterapkan dibandingkan pendekatan direktif, mengingat masyarakat lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka pilih, daripada apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi dalam kondisi tertentu pekerja sosial dapat memainkan peran yang proaktif, terutama ketika individu ataupun kelompok memiliki ketidakpercayaan diri untuk mengorganisir kegiatan ataupun proyek mereka.

Dalam proses pembangunan sosial, pekerja sosial memiliki beragam peranan, yaitu antara lain pertama, pemercepat perubahan (*enabler*) yang membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, serta mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang

mereka hadapi secara lebih efektif. Peran sebagai pemercepat perubahan ini merupakan peran klasik yang berprinsip bahwa menolong orang adalah untuk membantu diri mereka sendiri (*help people to help themselves*). Terdapat empat fungsi utama yang dilakukan pekerja sosial sebagai pemercepat terjadinya perubahan (*enabler*), yaitu: (a) membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka, (b) membangkitkan dan mengembangkan 'organisasi' dalam masyarakat, (c) mengembangkan relasi interpersonal yang baik, dan (d) memfasilitasi perencanaan yang efektif.

Kedua adalah peran pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*) yang diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Agar dapat menjalankan peran ini, seorang pekerja sosial ini harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan dan memiliki keterampilan untuk menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi tersebut. Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi seorang pekerja sosial untuk selalu belajar, karena begitu mereka merasa sudah tidak perlu belajar mengenai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang *up-to-date* dan kurang menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

C. Proses Pengembangan Masyarakat

Pada dasarnya, proses pengembangan masyarakat dimulai dari luar daerah dan masyarakat tersebut, yang pada umumnya bekerja pada sistem-sistem pemberian bantuan luar negeri maupun LSM yang memberikan motivasi, pengetahuan dan penyediaan sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan program-program perubahan secara luas. Program itu biasanya dimulai sebagai suatu perencanaan proyek di suatu daerah tertentu yang selanjutnya dikembangkan secara nasional, setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tersedianya sumber-sumber pendanaan. Keberhasilan proses pengembangan masyarakat juga ditentukan oleh praktik pekerjaan sosial yang ditempuh melalui beberapa tahap dengan jumlah tahapan yang berbeda-beda. Tahapan proses praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat bukanlah tahapan yang bersifat linear dan kaku, tetapi bersifat spiral dan fleksibel.

Praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam mengadakan perubahan sosial dapat menempuh langkah, yaitu fase pertama pengembangan kebutuhan akan perubahan dengan menerjemahkan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat menjadi kesadaran mengenai masalah yang ada. Kesadaran ini merupakan inti dari keinginan untuk berubah

dan keinginan untuk mencari bantuan diluar sistem. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat tidak tahu bagaimana harus menggali kebutuhan yang mereka rasakan dan kebutuhan riil mereka. Dalam kasus seperti ini, mereka memerlukan hadirnya agen perubahan dari luar sistem untuk membantu dan menstimulasi mereka untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan.

Fase kedua adalah pemantapan relasi perubahan yaitu pengembangan relasi kerja dengan agen perubahan sebagai isu utama. Pengembangan relasi ini dibutuhkan mengingat adanya keterbatasan dari pekerja sosial dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui masyarakat sendiri. Pembentukan dan pembinaan relasi dengan warga masyarakat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan mereka ke arah perubahan yang direncanakan. Pembinaan relasi akan sangat membantu untuk dapat memperoleh data yang akurat mengenai kebutuhan dan sumber daya sistem kelayan, serta membentuk kepercayaan warga yang ikut aktif melakukan perubahan dalam masyarakat.

Fase ketiga adalah melakukan perubahan yang dimulai dengan membuat klasifikasi atau diagnosis masalah, karena biasanya pada saat data telah terkumpul, masalah yang semula tampak sederhana kemungkinan bertambah rumit karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok-kelompok yang menolak pembaharuan, masalah-masalah ketergantungan terhadap lembaga, dan sebagainya. Selanjutnya, lakukan pengkajian alternatif tujuan perubahan, serta penentuan tujuan program dan kehendak untuk melakukan tindakan, melalui analisis data kemudian ditentukan tujuan operasional dari program ataupun kegiatan yang akan dilakukan serta alternatif cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa alternatif tersebut kemudian diputuskan alternatif mana yang akan diterapkan serta program/kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Dalam kaitan dengan upaya pengembangan kegiatan untuk bertindak, komunitas lokal kadangkala mempunyai kendala yang terkait dengan aspek kognitif dan motivasinya. Kelompok yang sudah terbentuk untuk mempelajari masalah yang dihadapi masyarakat mungkin sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah mereka, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa gagasan mengenai apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya akan muncul mengikuti proses sebelumnya. Tahapan terakhir dari fase ketiga ini adalah transformasi kehendak kedalam upaya perubahan yang nyata, sebagai tahapan yang memfokuskan pada upaya mentransfer perencanaan program menjadi pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata. Kunci keberhasilan dari fase ini sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan *community worker* untuk melakukan kegiatan secara efisien dan efektif.

Untuk mengetahui ketidakefisienan kerja, agen perubahan dan sistem kelayan harus melakukan pemantauan secara progresif guna mempertahankan atau mencapai kinerja yang mereka inginkan. Keberhasilan dari program kerja diukur dari bagaimana suatu rencana dan kehendak dapat ditransformasikan kedalam bentuk pencapaian yang aktual.

Fase keempat adalah generalisasi dan stabilisasi perubahan sebagai akibat dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program sebagaimana ditetapkan, akan stabil kalau dampak perubahan itu akan diikuti kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Tahap ini seringkali disebut sebagai proses institusionalisasi, yaitu proses melembagakan perubahan. Prasyarat utama dari tahap ini adalah adanya dukungan dari sistem secara keseluruhan atau adanya gerakan progresif dari sistem yang mendukung tindakan ini. Untuk mendapat dukungan sistem secara keseluruhan maka diperlukan evaluasi dari pelaksanaan program.

Fase kelima adalah terminasi yang merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhimya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir, atau karena masyarakat sudah mandiri untuk dapat terus mengembangkan kegiatan yang ada. Dalam proses pengembangan masyarakat, terminasi yang diharapkan adalah siapnya masyarakat untuk mandiri, sehingga tidak lagi diperlukan pekerja sosial. Hal ini dapat terjadi jika warga masyarakat diikutsertakan sejak tahap awal upaya perubahan berencana. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak jarang terminasi terjadi karena adanya keterbatasan waktu dari pekerja sosial ataupun keterbatasan dana dari lembaga yang memberi bantuan dan bukan karena masyarakat sudah mandiri.

Kelima tahapan ini dalam pelaksanaan sebenarnya bukanlah merupakan penjenjangan yang ketat, dalam arti setiap tahap harus diselesaikan dahulu sebelum memasuki tahap selanjutnya. Tetapi pelaksanaan tahap-tahap tersebut berbentuk seperti spiral, misalnya saja pada tahap pertama ketika agen perubahan mencoba membentuk relasi perubahan, mungkin ia sudah pula mulai mencari data untuk melakukan prediksi program.

Kegiatan-kegiatan pokok yang biasa dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses pembangunan masyarakat, antara lain: (a) memberikan informasi ketika pertama kali datang ke desa dan berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan menganjurkan tentang pentingnya kegiatan pembangunan oleh masyarakat sendiri; (b) melakukan kontak-kontak pendahuluan yang menjelaskan tentang kehadirannya di desa tersebut sebagai seorang yang datang untuk membantu masyarakat dalam berusaha memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka, tetapi ia tidak boleh memberi kesan seakan-akan dialah yang menjadi pelaksana pembangunan di desa itu; (c) memberi

dorongan untuk diadakan diskusi-diskusi tentang berbagai permasalahan dan memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat dalam membicarakan masalah-masalah yang paling penting untuk dipecahkan untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesepakatan atau konsensus dan tanggung jawab bersama untuk memecahkan masalah khusus yang ada di lingkungan mereka; (d) menemukan kesepakatan dan menetapkan kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin/tokoh masyarakat, agar proses perubahan tidak hanya terarah pada apa yang harus dikerjakan, tetapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan; (d) terus menerus memberi semangat dan dukungan terhadap masyarakat yang bersangkutan untuk memperhatikan berbagai aspek dari pelaksanaan tugas-tugas yang harus diselesaikan; (e) membuat analisis dan perencanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan akan sumber-sumber tambahan, disamping sumber-sumber yang sudah dimiliki masyarakat; dan tahap berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pada waktu ini kewajiban dan hubungan sosial sudah harus mencapai suatu tingkat di mana masyarakat secara sukarela melakukan peranan-peranan yang diperlukan dalam proses kegiatan; (f) ikut bekerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai salah satu anggota masyarakat; dan (g) melaksanakan pengembangan masyarakat dengan tepat, maka masyarakat akan merasakan bahwa mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari proyek yang dikerjakan.

Pelaksanaan pengembangan masyarakat biasanya dimulai dari sebuah kelompok kecil yang menangani suatu masalah yang relatif sederhana yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Proses ini akan menyebar ke suatu tingkat hubungan yang kompleks dan terus berkembang yang mencakup nilai-nilai dan prosedur-prosedur baru yang mendorong masyarakat untuk menentukan dan mencapai tujuan dan kerja sama. Kegiatan pekerja sosial tetap terpusat pada terciptanya lingkungan-lingkungan dan peristiwa-peristiwa yang memungkinkan masyarakat dapat mempelajari ide-ide baru dan menciptakan hubungan-hubungan kerja sama. Untuk meningkatkan perubahan-perubahan seringkali diperlukan kegiatan-kegiatan latihan secara formal untuk memberi pelajaran-pelajaran kepada tokoh-tokoh masyarakat, seperti: metode pemecahan masalah, prosedur-prosedur demokratis dan teknik-teknik diskusi kelompok, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat.

Sementara masyarakat mempelajari cara-cara untuk membahas dan bertindak secara bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ditetapkan, akan timbul hubungan-hubungan, pengertian-pengertian dan identitas-

identitas baru diantara anggota masyarakat, baik pada tingkat tingkah laku individu maupun pada tingkat masyarakat. Pekerja sosial perlu memberikan kesadaran, pemahaman dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membentuk organisasi yang bersifat tetap agar dapat lebih mengenal kondisi masyarakatnya, serta dapat berhubungan dengan kelompok diluar masyarakatnya untuk membuat kesepakatan dalam melakukan perubahan. Melalui organisasi ini masyarakat menentukan cara untuk melaksanakan kegiatannya sendiri, sehingga peran pekerja sosial berubah menjadi bagaimana membantu para tokoh masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu sistem yang sedang berjalan. Perhatian khusus diberikan untuk menciptakan struktur demokratis yang memungkinkan semua unsur masyarakat terwakili dalam proses terbuka yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mencegah organisasi formal agar tidak bersifat kaku dan dapat berfungsi juga penting dilakukan, sehingga pekerja sosial harus selalu berupaya untuk mendapatkan pimpinan yang egaliter dan permasalahan lain untuk diperhatikan dan ditangani oleh masyarakat. Jika hal ini telah dikembangkan dengan baik, maka dapat dipastikan keterlibatan, motivasi dan pengembangan program yang diperlukan melalui perencanaan, pelatihan dan prosedur-prosedur penilaian dapat dipastikan akan berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun hal ini tetap sangat tergantung pada pemahaman dan penerimaan terhadap manfaat program bagi mereka dan kesediaan mereka untuk mendukung dan melanjutkan usaha-usaha tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat memainkan peran penting. Terdapat beragam strategi untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, antara lain adalah pertama, strategi terapi pendidikan bagi orang dewasa sebagai salah satu strategi partisipasi masyarakat yang mengasumsikan diperlukannya perbaikan dari individu yang ikut berpartisipasi dalam program. Strategi ini dilakukan dalam bentuk pelatihan agar dapat bekerja bersama dalam mengatasi masalah sosial, dan belajar untuk menilai dan menghargai kerja sama sebagai suatu metode pemecahan masalah. Strategi ini akan memperkuat pemerintah pada tingkat lokal, mendorong pengembangan masyarakat dan menimbulkan perasaan keterikatan dengan masyarakatnya. Kedua, strategi perubahan tingkah-laku kelompok yang menempatkan partisipasi sebagai kekuatan utama dalam pengembangan masyarakat. Kelompok dapat mempengaruhi individu yang menjadi anggotanya, namun sebaliknya individu yang menjadi pimpinan formal dapat dimanfaatkan untuk perubahan tingkah laku terhadap anggota kelompok atau masyarakat. Secara singkat strategi ini diterapkan untuk mempengaruhi perubahan masyarakat sebagai suatu sistem atau subsistem dengan perubahan tingkah-laku baik anggotanya atau wakil-wakilnya.

Kedua strategi tersebut pada pokoknya melibatkan warga masyarakat dalam pelaksanaannya. Jika pekerja sosial telah menentukan strategi mana yang akan diterapkan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan teknik tertentu yang merangsang keikutsertaan maksimum dari anggota masyarakat. Teknik-teknik yang digunakan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Selain itu teknik-teknik tertentu dapat diterapkan pada setiap proses pengembangan masyarakat. Misalnya teknik curah pendapat dapat digunakan sebagai metode untuk menggerakkan masyarakat dan juga dapat digunakan untuk melakukan kajian untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*needs assessment*).

Proses pengembangan masyarakat akan membawa perubahan secara menyeluruh sebagai perubahan yang direncanakan, namun tetap terbatas pada variabel khusus yang ditentukan oleh mereka yang terlibat didalam proses perubahan itu. Perubahan dapat terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan suatu sistem perubahan, baik di dalam maupun di luar sistem yang dilaksanakan itu. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk diadakan perubahan dan pengaruh serta akibat-akibat dari proses pelaksanaan perubahan, maka terdapat 5 (lima) dimensi kehidupan masyarakat yang diperkirakan akan dapat mendorong terjadinya perubahan, yaitu (a) kemampuan manusia; (b) jangkauan kepentingan; (c) teknologi sosial; (d) teknologi fisik; dan (e) organisasi sosial.

Dimensi kemampuan manusia menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk bekerja sama dalam proses mengenal dan memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, sehingga terjadi proses belajar yang dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Dimensi jangkauan kepentingan memperlihatkan bahwa keikutsertaan seseorang dalam proses, akan menghasilkan perubahan perspektif dan peningkatan perhatian bersama yang tidak hanya membantu individu dalam melihat masalah dan kepentingan sendiri, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang memungkinkannya untuk mengkaitkan kepentingan-kepentingannya dengan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang lain, sehingga kesadaran masyarakat akan terus meningkat dan kegiatan-kegiatan bersama timbul karena didorong oleh kepentingan bersama. Melalui dimensi teknologi sosial, akan dapat dipahami bahwa setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk melakukan sesuatu hal yang unsur-unsur pokoknya terdiri dari: (a) penentuan tujuan secara rasional; (b) merencanakan penggunaan sumber-sumber; (c) pembagian pekerjaan secara rasional; dan (d) pengadministrasian dan koordinasi dari unit-unit fungsional. Dimensi teknologi fisik akan menunjukkan, bahwa yang menjadi tujuan utama dari masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat adalah

perubahan teknik, tetapi ternyata pengalaman menunjukkan tidak mungkin hanya akan terjadi perubahan teknik saja tetapi harus ada pembangunan fisik. Sementara dimensi organisasi sosial akan menunjukkan akibat-akibat dari perubahan pada organisasi sosial, yaitu (a) reorganisasi terhadap sistem-sistem yang ada dan (b) pembentukan bentuk-bentuk lembaga yang baru.

D. Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau bahkan ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan determinisme keagamaan. Kalau kemudian pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat terakhir tersebut mungkin benar. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industriliasasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrilisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1) Proses pemusatan kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) Keuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; (4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Bahkan dalam perspektif ilmu politik, kekuatan menyangkut pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan

seperti yang diinginkan oleh individu, dalam keadaan tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupannya. Konsep ini merupakan bentuk penghargaan terhadap manusia atau dengan kata lain “memanusiakan manusia”. Melalui pemberdayaan akan timbul pergeseran peran dari semula “korban pembangunan” menjadi “pelaku pembangunan”. Perspektif pembangunan memandang pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang sangat luas. Pearse dan Stiefel dalam Priyono (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan partisipatif meliputi: menghormati perbedaan, kearifan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian.

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan. Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanaannya sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya “membangkitkan partisipasi” masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan.

Dalam konteks *governance*, partisipasi menempatkan masyarakat pada posisi yang sebenarnya. Pertama, masyarakat bukanlah sebagai hamba (*client*) melainkan sebagai warga (*citizen*). Jika hamba memperlihatkan kepatuhan secara total, maka konsep warga menganggap bahwa setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki. Kedua, masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai *partner* pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. Keempat, masyarakat bukan sekadar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subjek yang aktif menentukan kebijakan.

Cara pandang baru menempatkan posisi masyarakat itu secara historis mempengaruhi haluan baru pembangunan dan pemerintahan, meski secara empirik belum menjadi kenyataan. Kaum miskin, misalnya, sekarang

ditempatkan sebagai pemangku kepentingan pembangunan. Partisipasi dilihat sebagai kekuatan untuk melakukan transformasi relasi sosial, ekonomi dan politik yang selama ini dinafikan dan justru membuat kemiskinan. Sekarang agenda penanggulangan kemiskinan mulai menempatkan kaum miskin dalam posisi terhormat, memberi ruang pada mereka untuk mengembangkan partisipasi dan prakarsa lokal, sehingga konsep kaum miskin sebagai penerima manfaat proyek tidak terlalu relevan dibicarakan.

Partisipasi hanya dimungkinkan berjalan dengan baik, bila berangkat dari kesadaran dan prakarsa aktif masyarakat. Kesadaran dan prakarsa ini akan muncul bila masyarakat memiliki daya dan posisi tawar yang tinggi dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan sumber daya disekitarnya secara optimal. Partisipasi hanya mungkin terjadi bila terdapat keseimbangan antara daya/posisi tawar masyarakat yang diharapkan menjadi aktor utama utama pembangunan dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemberdayaan (*empowerment*) menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif bukan hanya dimobilisasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat-khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan-didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak berarti menafikan partisipasi dari kelompok-kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi Pemberdayaan Masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru.

Mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka. Program-program pemerintah yang berbasis pemberdayaan akan menekan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas yang sama yang dikerjakan program nonpemberdayaan. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri (*help people to help themselves*). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya tidak sebatas memberikan input materi atau bantuan dana namun memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara luas untuk mengakses sumber daya dan mendayagunakannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian *input* berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.
- d. Pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan meningkatkan kapasitasnya. Setidaknya ada tiga kapasitas dasar yang dibutuhkan untuk itu, yakni: suara (*voice*), akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Pertama, suara adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi

kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (Pranarka dan Moeljarto, 1996: 44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 2005:266). Sementara itu Ife (1995: 182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Terkait dengan itu, Sutrisno (1995: 185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Conyers (1994) mengajukan tiga komponen pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu (a) adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan manajemen lokal; (b) penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari adanya pembentukan organisasi-organisasi lokal termasuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga masyarakat dan; (c) keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah pertama, inklusi dan partisipasi yang berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll.) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut. Terdapat berbagai bentuk partisipasi, yaitu:

- a. secara langsung;
- b. dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat);
- c. secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka);
- d. berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan);
- e. berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Kedua adalah akses pada informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketiga adalah kapasitas organisasi lokal yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi. Dan keempat adalah profesionalitas pelaku

pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

BAB IV

WUJUD KEARIFAN LOKAL DALAM INTERAKSI SOSIAL

A. Ikatan Jaringan Sosial

Proses pengembangan masyarakat berjalan sesuai dengan sejarah panjang pembangunan suatu daerah, yang menyangkut kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik yang sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi tatanan geografis dan sosial budaya daerah yang membentuknya. Braudel (1993), menyatakan bahwa rentang panjang sejarah tertentu berperan dalam membentuk karakter manusia dan secara mendasar akan memperlihatkan sifat-sifat dasar dan kecenderungan ideologis dan politis dalam merespon kondisi alam dan sosial budaya sekelilingnya. Proses pemberdayaan masyarakat dengan rentang yang panjang ini terjadi dalam jaringan sosial. Jaringan (Fukuyama, 2000: 327) merupakan hubungan moral kepercayaan, yaitu sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat, dengan demikian, memberikan pengakuan kepada kelompok-kelompok etnik dan budaya agar dapat memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama yang memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya. Disamping itu, juga mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima kelompok-kelompok lain yang berbeda basis identitasnya untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi.

Dalam sebuah komunitas heterogen dan pluralistik seperti Indonesia diperlukan perekat interaksi sosial yang dipatuhi bersama, terutama ketergantungannya terhadap pertukaran (*reciprocitas*). Atau dengan bahasa Fukuyama (1995: 222), "kepercayaan memiliki nilai pragmatis yang sangat penting. Kepercayaan adalah pelumas yang penting bagi bekerjanya sebuah sistem sosial." Kepercayaan merupakan variabel yang penting dalam membentuk masyarakat yang fungsional, karena di dalamnya terkandung harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama. Komunitas bergantung pada kepercayaan dan kepercayaan ditentukan secara kultural, maka komunitas spontan akan muncul dalam berbagai tingkatan berbeda dalam budaya yang berbeda pula.

Bagi Fukuyama (2000: 72) kepercayaan atau *trust* adalah efek samping yang penting dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan modal sosial. Jika suatu komunitas dapat menjaga komitmen, menghormati norma-norma saling tolong-menolong, dan menghindari perilaku yang oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk dengan cepat, dan kelompok ini akan mampu mencapai tujuan bersamanya secara lebih efisien.

Ikatan jaringan sosial yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas individu dalam membentuk hubungan sosial yang bermanfaat dan bermakna sering disebut modal sosial. Modal sosial menentukan sosiabilitas, yaitu bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah dalam suatu komunitas. Modal sosial merupakan sumber daya yang tersedia didalam struktur sosial, yang dapat dipergunakan oleh individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa baik individu maupun komunitas sepenuhnya esensial, sehingga mempunyai kedudukan fundamental yang sama, sehingga individu dan komunitas saling membentuk dan saling membutuhkan, karena modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Modal sosial merupakan sumber daya yang tersedia didalam struktur sosial, yang dapat dipergunakan oleh individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, modal sosial ini tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bekerja sama dengan modal-modal lain, seperti modal manusia, modal keuangan dan modal-modal lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Modal sosial merupakan jalinan ikatan budaya, *governance*, dan *social behaviour* yang membuat sedemikian rupa sehingga fungsi dan tatanan sebuah masyarakat lebih dari sekadar jumlah individu. Modal sosial dan wujudnya sebagai kelembagaan ini merupakan sumber legitimasi berfungsinya tatanan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta untuk kepentingan mediasi konflik dan kompetisi. Upaya membangun modal sosial adalah cermin peningkatan *equity*, *social cohesive*, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukandengan membangun kerja sama dan koordinasi yang kuat antarindividu sehingga membentuk sinergi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Modal sosial, sebagai sebuah konsep, diperkenalkan kembali oleh Bourdieu dan kemudian mendapatkan kerangka teoritik yang jelas oleh Coleman, sebagaiorang pertama yang mengembangkan konsep pokok dan membuka jalan operasionalisasi bagi tujuan penelitian empiris. Putnam berhasil memindahkan konsep modal sosial ini ke dalam pembahasan yang lebih luas. Teoritisi utama lainnya yang mengembangkan konsep modal sosial saat ini antara lain adalah Fukuyama, Portes, Halpern, Woolcock, Wall, Narayan, Brown, De Filippis, dan Burt.

Dewasa ini konsep modal sosial telah diterima secara umum oleh ilmuwan sosial dari berbagai disiplin ilmu, termasuk perspektif pembangunan dan pemberdayaan sosial. Konsep ini kemudian berkembang dan menjadi perhatian banyak pihak, yang bahkan dianggap sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Selain diterima oleh berbagai kalangan, modal sosial juga menjadi bahan perdebatan antara ilmuwan sosiologi, antropologi, politik dan juga ekonomi. Modal sosial memiliki keunikan yaitu *relasional*, yang terdapat dalam struktur hubungan antarindividu. Untuk mendapatkan modal sosial, seseorang harus berhubungan dengan orang lain yang diantara mereka saling mendapatkan manfaat (Portes dalam Narayan, 1999).

Pengembangan konsep modal sosial kemudian, menunjukkan dua hal yang terkait, tetapi memiliki kecenderungan yang relatif berbeda. Kecenderungan pertama disebut dengan individualis atau otonom dan yang kedua disebut komunalis atau melekat. Kedua kecenderungan ini dapat menghadirkan ekstrim, sehingga suatu studi tentang modal sosial dapat terjebak di dalam salah satu ekstrem tersebut. Disatu pihak, modal sosial itu dapat berada di dalam kelompok, sedang dipihak lain menyatakan modal sosial itu berpegang kepada individu (Lin, 2001). Namun, Lin sendiri berpendapat, bahwa modal sosial itu berasal dari keduanya, baik individu maupun kelompok. Bagi masing-masing orang modal sosial itu unik, dan secara alami tinggal di dalam suatu dunia sosial, yang pada akhirnya semua kenyataan ada di tingkatan kelompok.

Pada prinsipnya, semua bentuk modal sosial dapat dikembangkan di dalam suatu kelompok, bagaimanapun uniknya bentuk modal manusia, modal material, dan modal budaya tersebut bagi setiap individu. Seperti disampaikan Lin (2001), tidak semua bentuk modal sosial terbagi sama rata di dalam kelompok. Di dalam masyarakat, distribusi modal sosial yang tidak merata, dikembangkan melalui kombinasi modal individu (posisi seseorang di masyarakat) dan modal kelompok (aset bersama yang dapat diakses melalui keikutsertaan di dalam jaringan sosial). Rumusan ini meliputi perbedaan modal sosial antara individu, karena modal sosial dengan uniknya dibangun didasarkan atas keadaan yang spesifik.

Modal sosial sebagai ciri khas yang unikbervariasi di antara individu, dengan mengabaikan apakah mereka di dalam jaringan sosial yang sama atau tidak. Dengan cara ini, individu membawa bentuk modal sosial yang berbeda ke dalam kelompok, yang mungkin atau tidak, perlu berbagi dengan orang lain. Orr dalam mendiskusikan "*black social capital*," menunjukkan kesukaran itu dalam memindahkan modal sosial *intra-group* ke dalam modal sosial *inter-group* (Orr, 1999). Sub-sub kelompok di dalam masyarakat, seperti keluarga urban yang umumnya miskin mempunyai bentuk modal sosial yang tidak sama

dengan bentuk dominan modal sosial yang ditemukan di dalam masyarakat Jakarta. Individu yang datang dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti halnya komunitas urban yang miskin akan mempunyai lebih banyak kesulitan untuk memindahkan atau mencapai modal sosial di dalam masyarakat yang dominan. Hal ini memperlihatkan, bahwa banyak teoritis modal sosial yang tidak mengambil stratifikasi di dalam pertimbangannya, meskipun hal itu merupakan determinan penting bagi modal sosial (Astone, Nathanson, Schoen, & Y. Kim, 1999: 1-31).

Dalam diskusi modal sosial, juga ditemukan mengenai jenis modal sosial yang sangat terkait dengan derajat tingkatan di mana kelompok melihat secara relatif konservatif, dan menempatkan nilai-nilai yang sangat tinggi pada kadar kesetiakawanan di satu sisi dan di sisi lain tingkat dimana mereka melihat ke luar dan mencari gagasan baru. Tipologi ini telah dikenal sebagai masyarakat yang "sakral - *sacred*" dan 'sekular-*secular*' (Becker, 1974: 248), pertalian yang 'kuat-*embeddedness*' dan 'lemah-*weak*', 'ikatan otoritas vertikal-*vertical bonds of authority*' dan 'ikatan kekerabatan horisontal-*horizontal bond of fellowship*' serta '*embeddedness*' dan 'otonomi'. Pandangan Becker mengenai pengelompokan '*sacred*' termasuk di dalamnya *inter alia* beberapa komunitas masyarakat pribumi, kelompok dimana dogma tertentu masih ditemui dalam keseluruhan struktur, dan merupakan kelompok yang secara sosial terasingkan. Keistimewaan kelompok ini adalah tingkat kesetiakawanan yang kuat, konservatisme yang lebih tinggi, ketergantungan terhadap tradisi, dan sering juga struktur yang hirarkis atau otoriter. Pandangan Becker tentang pengelompokan '*secular*' termasuk di dalamnya *inter alia* dengan prinsip yang terorganisir di sekitar hak azasi manusia, kesejahteraan nasional, kemanusiaan, kebebasan berusaha, sosialisme, dan kebebasan. Jenis prinsip yang terorganisir ini biasanya lebih terbuka dan fleksibel (Becker, 1974: 278).

Sebagai sebuah bagian dari struktur sosial dimana individu berada, modal sosial bukan merupakan hak milik salah satu individu pun dalam struktur sosial, walaupun tiap-tiap individu mendapatkan kesempatan menikmati keuntungan atas kapital sosial yang ada (Coleman dalam Narayan, 1999). Modal sosial hanya akan bermanfaat apabila didistribusikan antarindividu dalam suatu struktur sosial, sebagai bagian dari struktur sosial yang mempunyai sifat "barang milik umum". Modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat kompleks dan sering kali berupa fenomena abstrak seperti kepercayaan, nilai, norma kerja sama, jaringan formal maupun informal, lembaga yang efektif dan stabil serta kohesi sosial. Di dalam komunitas, modal sosial menjadi milik bersama yang dapat dipergunakan oleh siapapun tanpa terkecuali, kendatipun hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu contoh yang disampaikan Coleman di dalam karyanya yang berkaitan

dengan definisi modal sosial sebagai *public good* adalah struktur sosial yang berdasarkan norma di Jerusalem yang membuat perasaan para ibu tenag ketika membiarkan anak-anaknya bermain di luar. Di dalam contoh ini, terlihat, bahwa tidak hanya para aktor mencapai tujuan individualnya, tetapi juga mencapai tujuan kolektifnya dengan memanfaatkan bentuk modal sosial. Modal sosial membantu untuk memecahkan permasalahan kolektif, dan dengan tegas Coleman (1990:314–318) menunjuk *public-good nature* sebagai modal sosial. Atau dengan perkataan lain, sekali modal sosial itu diciptakan, akan menguntungkan semua individu yang berada di dalam struktur sosial itu.

Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemaknaan hubungan sosial menjadi dinamis. Setiap teori pembangunan memberikan pendapat yang berbeda tentang peran hubungan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Perspektif teori modernisasi menyatakan bahwa hubungan sosial dan gaya hidup tradisional menjadi faktor penghambat pembangunan, sementara perspektif teori dependensi dan sistem dunia memberikan penjelasan bahwa hubungan sosial antara pengusaha dan elit politik menjadi mekanisme utama eksploitasi kapitalis. Karakteristik sosial negara miskin dapat dilihat dari hubungan mereka terhadap alat produksi serta konflik kepentingan antara pengusaha dan buruh. Perspektif komunitarian menekankan pada kemampuan “swadaya” masyarakat lokal, menekankan pada kebaikan “pengasingan diri suatu komunitas” dan “swadaya” serta menolak pentingnya hubungan sosial untuk membangun lembaga formal yang efektif dan bertanggung jawab. Sedangkan perspektif neoklasikal menekankan pada pemilihan strategi yang rasional dalam interaksi antarindividu.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa modal sosial yang terdapat dalam komunitas yang harmonis, akan membuka peluang bagi anggota komunitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui interaksi sosial yang sehat dan bermanfaat. Hal ini dimungkinkan, karena disamping modal sosial itu merupakan modal yang dikembangkan oleh komunitas, dan bertransaksi dengan menggunakan modalnya itu (Rifkin 1999), juga merupakan perekat komunitas, “*glue that holds societies together*” (Serageldin dan Grotaert, 2000). Artinya, modal sosial sebagai jalinan ikatan sosial informal, merupakan sumber legitimasi berfungsinya tatanan komunitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta untuk kepentingan mediasi konflik. Salah satu perwujudan modal sosial dalam komunitas adalah kearifan budaya lokal. Indonesia memiliki potensi kearifan lokal yang sangat besar, yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai

kearifan lokal ini ada yang dapat dikembangkan menjadi instrumen dalam memberdayakan masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka, yang dijalankan tak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta, yang mendorong manusia berkelompok dan membentuk entitas. Bagi Francis Fukuyama, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai faktor penting bagi perkembangan pemberdayaan masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi, dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi.

B. Wujud Kearifan Lokal

Manusia mempunyai kapasitas untuk menyerap apa yang terjadi di sekelilingnya, selanjutnya menganalisis dan menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Sistem pengetahuan bersifat dinamis, karena terus berubah sesuai dengan waktu dan interaksi dengan lingkungan yang berkembang. Menurut Johnson (1992) dalam Sunaryo dan Joshi (2003), pengetahuan masyarakat lokal adalah sekumpulan pengetahuan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas desa, kota, ataupun kelompok kekerabatan, memiliki suatu corak yang khas. Kekhasan corak tersebut dapat disebabkan oleh adanya suatu unsur kecil yang khas dalam kebudayaan tersebut, ataupun adanya pranata-pranata dengan suatu pola sosial khusus, atau mungkin juga karena kebudayaan menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas mungkin pula disebabkan karena adanya kompleksitas unsur yang lebih besar, sehingga tampak berbeda dari kebudayaan-kebudayaan lain. Kekhususan corak tersebut biasanya mengarah pada kelompok etnik yang sering disebut dengan "suku bangsa," yaitu suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan yang ditentukan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri.

Suatu daerah kebudayaan adalah suatu daerah yang dihuni oleh satu golongan manusia berdasarkan persamaan ciri kebudayaan yang mencolok, yang menunjukkan persamaan. Ciri kebudayaan yang dijadikan dasar dari suatu pengolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur kebudayaan fisik saja tetapi juga unsur kebudayaan abstrak seperti organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, dan adat istiadat. Persamaan ciri-ciri mencolok dalam suatu daerah kebudayaan biasanya hadir lebih kuat pada kebudayaan-kebudayaan yang menjadi pusat pada kebudayaan yang bersangkutan, dan makin tipis didalam kebudayaan-kebudayaan yang jaraknya makin jauh dari pusat tersebut.

Kebudayaan muncul sebagai hasil dari olah pikir manusia, karena manusia mempunyai kapasitas untuk menyerap apa yang terjadi di sekelilingnya, selanjutnya menganalisis dan menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Pengetahuan merupakan keluaran dari proses pembelajaran, penjelasan berdasarkan pemikiran dan persepsi mereka. Pengetahuan dalam setiap corak kebudayaan ini diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan ini lebih dikenal dengan sebutan "kearifan lokal" yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi atau uji coba secara terus-menerus dengan melibatkan pengalamannya sendiri dan pengaruh dari luar dalam usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi baru setempat.

Kearifan lokal ini berkembang melalui tradisi lisan dari mulut ke mulut atau melalui pendidikan informal dan sejenisnya dan selalu mendapatkan tambahan dari pengalaman baru, tetapi pengetahuan ini juga dapat hilang atau tereduksi. Biasanya kearifan lokal yang tidak relevan dengan perubahan dan kebutuhan akan hilang atau ditinggalkan. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dilihat sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi yang dinamis dan yang dapat ditafsirkan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan konsep yang sangat luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan terakhir menunjukkan, bahwa kearifan lokal lebih merujuk sifat tempat, dimana pengetahuan tersebut berkembang secara '*in-situ*'.

Kearifan lokal sebagai modal sosial bagi pemberdayaan masyarakat memerlukan adanya upaya menguatkan kelembagaan, prasarana dan akses kepada informasi dan perlu dikembangkan secara optimal dan menjadi urutan atas dalam skala prioritas. Sikap hidup gotong-royong dan kerja sama untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama, merupakan

bentuk kearifan lokal yang perlu terus ditumbuhkan. Namun dewasa ini, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan sebagai bagian dari kearifan lokal sudah mulai terkikis di dalam lingkungan budaya lokal komunitas. Dalam program pemberdayaan masyarakat, apapun bentuknya, masyarakat menjadi terkotak-kotak, antara penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Di antara warga masyarakat terkadang muncul perselisihan, sehingga modal sosial yang ada perlu dikembangkan untuk mencegah semakin rusaknya tatanan hidup bermasyarakat.

Namun demikian, masih banyak kearifan lokal yang masih dapat bertahan dan melekat di kehidupan masyarakat, seperti sistem pertanian subak di Bali, sistem pelestarian hutan oleh suku-suku pedalaman, sistem pengaturan mencari ikan di pedalaman Papua, sistem penetasan telur ayam dengan menggunakan gabah dan gerabah di Nusa Tenggara, sistem pengelolaan tanah ulayat yang berkelanjutan, dan lain-lain ternyata dapat diterapkan sejalan dengan kehidupan modern. Kita seharusnya menyadari bahwa kearifan lokal itu bukanlah merupakan suatu yang ditemukan dan dikembangkan oleh para nenek moyang kita secara instan, tetapi dikembangkan dalam waktu lama dan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, untuk memahami kearifan lokal sebagai bentuk aktivitas manusia sebagai makhluk sosiokultural memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia. Melalui pemahaman ini, akan ditemukan bahwa pengembangan kearifan lokal pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang dihadapi, melainkan jauh lebih dalam yang mencakup tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan. Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematis, namun biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasilnya yang kongkrit dalam kehidupan.

Kearifan lokal masyarakat, berkembang melalui tradisi lisan dari mulut ke mulut atau melalui pendidikan informal dan sejenisnya dan selalu mendapatkan tambahan dari pengalaman baru, tetapi kearifan lokal ini juga dapat hilang atau tereduksi, terutama nilai atau norma yang tidak relevan dengan perubahan keadaan dan kebutuhan. Kearifan lokal masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi yang dinamis dan yang selalu berubah terus-menerus mengikuti perkembangan jaman.

Kearifan lokal merupakan konsep yang lebih luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Sebagai pandangan masyarakat dalam wilayah tertentu, kearifan lokal tidak hanya sebatas pada apa yang dicerminkan dalam metode dan teknik pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga mencakup pemahaman (*insight*), persepsi dan suara hati atau perasaan (*intuition*) yang berkaitan dengan interaksi sosial. Kearifan lokal yang demikian telah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya, dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos, yang dianut dalam jangka waktu cukup lama.

Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal, termasuk alternatif solusi dalam pengembangan masyarakat. Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya, yang mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat (Haba, 2007, seperti dikutip Abdullah, et.al., 2008: 7). Berdasarkan inventarisasi Haba, terdapat enam fungsi kearifan lokal, yaitu (a) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (b) elemen perekat lintas warga, lintas agama dan kepercayaan; (c) kearifan lokal tidak bersikap memaksa, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat; (d) kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; (e) *local wisdom* akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya diatas *common ground*; dan (f) kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menyingkirkan berbagai kemungkinan yang merusak solidaritas komunal (Haba, 2007: 334–335, seperti dikutip Abdullah, et.al., 2008: 7–8).

Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat akan dapat senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang tak ternilai dalam pembangunan. Model pemberdayaan memberikan peran yang sangat besar terhadap komunitas lokal untuk menentukan sendiri nasibnya. Pola pemberdayaan lebih menekankan pada aspek partisipasi komunitas lokal daripada introduksi dari luar. Sebagai agen pemberdayaan sangat berbeda dengan agen penyuluhan. Agen penyuluhan lebih memposisikan diri sebagai orang luar yang akan menangani masalah di dalam komunitas. Sedangkan agen pemberdayaan lebih menekankan pada bantuan memfasilitasi saja sedangkan keputusan bahkan alternatif pemecahan merupakan hasil kreasi komunitas itu sendiri.

Pemberdayaan komunitas menjadi isu yang sangat penting yang berkembang dengan pesat di negara berkembang. Kepedulian terhadap isu lingkungan, kesetaraan gender, keadilan serta keberlanjutan menjadikannya mudah diterima oleh komunitas yang mungkin sudah bosan dengan model pembangunan *top down* yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Peranan agen pemberdayaan baik kalangan LSM maupun pemerintah menjadi sangat besar untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan komunitas. Tak kalah pentingnya juga peran media massa dalam meningkatkan partisipasi komunitas. Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas perlu untuk disebarluaskan melalui media. Komunitas dapat mengembangkan media massanya sendiri yang tentu akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera komunitasnya. Tidak heran bermunculanlah “radio komunitas” sebagai bentuk partisipasi komunitas dalam menyebarkan informasi dan “memberdayakan” komunitas lain di sekitarnya.

Dalam buku Khasanah Budaya Lokal, ‘Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara’ yang ditulis oleh Gatut Murniatmo dkk., mendeskripsikan jenis-jenis budaya lokal Nusantara yang hidup di seluruh wilayah Indonesia. Khasanah budaya lokal dalam buku tersebut yang relevan adalah:

1. Khasanah kearifan lokal yang berkaitan dengan **Gotong Royong**, antara lain adalah:
 - a. **Alang Tulung**, adalah kegiatan tolong-menolong pada masyarakat Gayo. Alang Tulung berasal dari kata *alang* yang artinya sakit atau malang dan kata *tulung* yang berarti bantu atau tolong, sehingga alang tulung berarti membantu atau memberikan bantuan kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan atau kesukahan. Pengertian alang tulung sering ditegaskan dalam ungkapan *alang tulung beret berbantu*, yang artinya perlu dibantu oleh tetangga. Di Gayo, pelaksanaan ungkapan ini sering dilaksanakan dalam kegiatan mengerjakan tanah pertanian, mulai dari mengolah tanah (*rnabelah*), membuat dan memperbaiki pematang (*memutal*), menyangi (*melamut*), menanam padi (*menomang*), sampai saat menuai padi (*mejik*) (Murniatmo, dkk., 2000: 2).
 - b. **Belalik**, merupakan kelompok kerja gotong-royong dalam masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah di bidang pertanian ladang. Anggota belalik meliputi hampir seluruh keluarga yang tinggal di kampung itu. Anggota belalik tidak terbatas pada yang sudah berkeluarga, tetapi juga para bujang dan gadis yang tinggal dan menjadi warga kampung setempat. Karena itu bila musim pekerjaan tiba, suasana kerja menjadi ramai. Saat-saat seperti ini adalah saat yang baik bagi para bujang dan gadis untuk memilih jodoh. Belalik berdasarkan

prinsip resiprositas, yaitu timbal balik. Bagi para warga kampung, ikut dalam kegiatan ini merupakan kewajiban moral. Sebagai imbalan, pemilik ladang menyediakan makan minum bagi para peserta (Murniatmo, dkk., 2000: 30).

- c. **Basiru**, adalah gotong royong yang lazim dilakukan oleh masyarakat Sumbawa. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian bersama. Setiap pengikut basiru dapat memperhitungkan dengan tegas apa yang diterima kembali dari pengikut lain. Basiru biasanya hanya dilakukan dalam waktu setengah hari untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya membersihkan belukar, membakar dahan-dahan, membuat pagar ladang, berburu, menebang pohon, dan sebagainya. Biasanya orang menyukai sistem kerja ini karena (i) dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti membakar hutan untuk lading, (ii) mendapat kesempatan untuk mempergunakan alat-alat tertentu yang hanya dimiliki oleh para pengikut dan (iii) tidak bekerja sendiri. Dalam sistem basiru ini, para pengikutnya sering membawa makanan sendiri, kecuali bila sebelumnya telah ada perjanjian bahwa makan siang akan diurus oleh tuan rumah. Apabila seorang peserta tidak dapat datang dalam kegiatan basiru karena suatu alasan, ia berkewajiban mengirim seorang wakil atau mernbayar ganti rugi kepada tuan rumah. Wakil yang dikirimkan juga tidak dapat sembarang orang, setidaknya-tidaknya harus seperti dirinya sendiri. Adapun pembayaran ganti rugi biasanya berupa satu *gutes* padi (Murniatmo, dkk., 2000: 24).
- d. **Bawe atau boan**, adalah bentuk kegiatan kerja sama atau gotong-royong yang dilakukan oleh penduduk Sumatra Selatan. Untuk daerah-daerah tertentu, seperti Musi Banyuasin, kegiatan ini disebut *batokok*. Kegiatan ini biasanya dilakukan di satu areal peladangan yang di dalamnya terdapat beberapa ladang yang letaknya berdekatan satu sama lain. Ketentuan yang berlaku adalah jika ada keluarga yang memiliki sebidang ladang dan telah digarap bersama-sama, maka pada hari lain, keluarga itu bergantian ikut mengerjakan ladang milik orang yang pernah ikut mengerjakan ladangnya. Menurut istilah setempat, orang yang telah ditolong itu disebut *mengambil hari* dan saat orang membalas bantuan orang tadi disebut *membayar hari* (Murniatmo, dkk., 2000: 25).
- e. **Gugur gunung**, yaitu kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh warga masyarakat di Jawa. Gugur gunung merupakan pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Dulu, pengerahan tenaga kerja semacam ini disebut juga *kerig desa*. Sistem pengerahan tenaga kerja semacam gugur gunung atau kering desa telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, misalnya apabila raja

atau kerajaan akan membangun bangunan-bangunan untuk kepentingan negara, seperti membuat atau memperbaiki jalan, bangunan suci, atau jembatan. Mereka yang terlibat di dalam kerja gotong royong sama sekali tidak mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip *rame ing gawe, sepi ing pamrih*, artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Asas gugur gunung ini adalah kebersamaan kepentingan antara warga masyarakat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gugur gunung merupakan kewajiban moral bagi setiap warga dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat (Murniatmo, dkk., 2000: 58).

- f. **Hiras**, merupakan bentuk pengerahan tenaga kerjanya yang berlaku dalam masyarakat Sunda, Jawa Barat. Pengerahan tenaga kerja itu terjadi karena permintaan seseorang, tetapi tanpa upah. Konsekuensi pelaksanaan hiras adalah orang atau keluarga yang bersangkutan harus menyediakan makan dan minum. Pada masa yang lampau, setiap orang dapat meminta pekerjaan hiras. Lurah dan pamong desa mempunyai hak dan wewenang untuk memerintahkan penduduk desa melakukan pekerjaan hiras selama satu hari dalam satu tahun di tanah sawahnya atau tanah pekarangannya. Apabila seorang warga desa terkena wajib hiras, tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya, ia dapat mewakilkan kepada orang lain dengan cara memberinya upah (Murniatmo, dkk., 2000: 60).
- g. **Mapalus**, adalah sistem saling membantu atau kerja gotong-royong yang dikenal dalam masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Sistem ini didasarkan atas solidaritas. Siapa saja yang mempunyai keperluan tertentu dapat mengajak kawan-kawannya yang mempunyai keperluan sama untuk membentuk suatu perkumpulan yang bertujuan saling membantu. Aktivitas *mapalus* sering dijumpai, misalnya dalam peristiwa-peristiwa kematian dengan serangkaian upacara perkabungannya, perkawinan, dan upacara-upacara yang lainnya. Di samping itu, mapalus dapat juga ditemui pada peristiwa dalam mengerjakan sawah pertanian. Dalam peristiwa-peristiwa itu selalu tampak adanya kerja saling membantu yang berdasarkan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*). Suatu bantuan yang diberikan baik berupa tenaga, barang, maupun uang harus selalu diberi imbalan jasa. Orang yang melalaikan kewajiban tersebut dianggap tidak baik oleh masyarakatnya dan ia akan terisolasi dalam masyarakatnya. Aktivitas saling membantu itu bukan saja terjadi di kalangan kaum kerabatnya sendiri, tetapi dapat pula meluas dan melibatkan orang lain yang tinggal bersama-sama dalam satu jaga atau kampung. Sebelumnya, aktivitas mapalus di Minahasa banyak ditujukan

pada usaha saling membantu antara 20 orang dalam pekerjaan pertanian yang berdasarkan prinsip timbal-balik. Saat ini mapalus ditujukan untuk berbagai keperluan, seperti mendirikan rumah, mengurus penguburan, dan sebagainya. Kelompok kerja mapalus dipimpin oleh seorang ketua yang disebut *tua im palus* (Murniatmo, dkk., 2000: 116).

- h. **Mesilih bahu**, adalah bentuk kegiatan gotong-royong dan tolong-menolong yang dikenal dalam masyarakat Bali. *Mesilih bahu* ini khusus dilakukan dalam kegiatan pertanian, terutama tahap pengolahan tanah. Bentuk gotong royong *mesilih bahu* ini hanya melibatkan dua orang petani yang mempunyai ternak seekor. Dalam pelaksanaannya, kedua petani yang mempunyai ternak, sapi atau kerbau saling meminjam ternaknya untuk menarik bajak atau luku dalam rangka mengolah tanah pertanian masing-masing. Melalui cara *mesilih bahu* ini mereka dapat mengolah tanah dengan menggunakan bajak atau luku yang ditarik dua ekor pasang lembu atau kerbau. Ikatan kedua petani yang terlibat dalam *mesilih bahu* ini dapat berlangsung dalam jangka waktu beberapa kali musim tanam, sepanjang kedua ternak yang dibutuhkan itu masih mampu digunakan tenaganya.

Ketentuan yang berlaku bagi para peserta yang terlibat dalam kegiatan *mesilih bahu* ini diwajibkan di antara mereka untuk saling memberikan ternak mereka bila saat mengolah tanah. Bahkan kalau dimungkinkan petani pemilik tanah itu ikut membantu dalam proses pengolahan tanah. Konsekuensi petani yang punya kerja adalah menyediakan makanan dan minuman. Kelak bila pasangan kerjanya mengolah tanah ia juga memberikan ternaknya dan bahkan bantuan tenaganya seperti pada waktu ia dibantu. Dalam *mesilih bahu* ini dituntut suatu keikhlasan yang didasari kewajiban moral dari petani yang terlibat. *Mesilih bahu* akan bubar apabila tidak ada keseimbangan dalam saling membantu di antara para anggota dan mungkin juga karena ternak sebagai prasarana *mesilih bahu* yang dimiliki petani itu tidak lagi bertenaga produktif atau dijual (Murniatmo, dkk., 2000: 135).

- i. **Meslisi**, merupakan bentuk kegiatan gotong-royong yang berlaku dalam masyarakat Bali. *Meslisi* dilakukan di bidang pertanian juga di luar pertanian, seperti kerajinan. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan bentuk pengerahan tenaga kerja yang sejenis. Sebenarnya kegiatan gotong royong *meslisi* ini tidak menuntut upah. Dalam bidang pertanian, *meslisi* ini biasa dilakukan dalam hal mencangkul tanah pertanian, menanam, dan lain sebagainya. Dalam bidang kerajinan contohnya saling membantu dengan cara memberikan informasi, pertukaran materi, dan sebagainya. Khusus di bidang kerajinan, anggota *meslisi* ini terbatas.

Mereka saling membantu dalam hal pengadaan materi dan penjualan hasil kerajinan. Kegiatan meslisi berakhir apabila setiap anggota pernah memberikan kewajiban dan menerima hak sebagai anggota selama satu musim tanam (Murniatmo, dkk., 2000: 136).

- j. **Meteoalo**, adalah sistem pengerahan tenaga kerja dalam masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam *meteoalo* seseorang dalam waktu tertentu bekerja membantu orang lain dan dalam waktu tertentu pula orang lain membantu menyelesaikan pekerjaannya. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan *meteoalo* ini adalah resiprositas. Pada umumnya *meteoalo* dilakukan untuk pekerjaan membuka ladang, membuat pagar, menanam, atau menugal, menyangi ladang, dan sebagainya (Murniatmo, dkk., 2000: 137).
- k. **Meuawee**, adalah bentuk kegiatan gotong royong dalam masyarakat Aceh, khususnya dalam mengumpulkan rotan. Meuawee dilakukan dengan sistem kelompok. Setiap kelompok mempunyai anggota antara empat sampai lima orang dan di antara anggota ini terdapat seorang pawang sebagai ketua kelompok dan bertugas sebagai penangkal binatang buas yang mungkin ditemui pada waktu mencari rotan di hutan. Setelah hasil rotan dijual, dibagi rata di antara anggota. Pawang mendapat bagian khusus, yaitu dua kali yang diterima anggota. Ketentuan lain yang berlaku dalam meuawee ini ialah bagi anggota yang berhalangan atau sakit saat merotan, juga memperoleh bagian yang sama (Murniatmo, dkk., 2000: 138).
- l. **Meuseuraya**, atau *meuramee*, kegiatan tolong-menolong yang dilakukan warga Aceh. Meuseuraya ini dilakukan hampir di segala aspek kehidupan. Bentuk kerja sama ini, para peserta yang terlibat di dalamnya melakukan pekerjaan tanpa pamrih. Pada zaman kerajaan Aceh, meuseuraya merupakan hak para pemuka adat untuk mengerahkan tenaga kerja berkenaan dengan pekerjaan untuk kepentingan umum, misalnya mendirikan masjid, mushola, dan sebagainya. Meskipun tanpa pamrih, para pemuka adat yang menggunakan tenaga kerja itu memberikan atau menyediakan jaminan dan hadiah-hadiah ala kadarnya bagi para peserta yang terlibat (Murniatmo, dkk., 2000: 139).
- m. **Ngrombo**, bentuk kegiatan gotong-royong yang dilakukan masyarakat Bali. *Ngrombo* dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan *ngrombo* adalah memberikan bantuan tenaga kepada seseorang atau keluarganya. Karena tidak mampu menyelesaikan sendiri maka ditempuh dengan cara *ngrombo*, yaitu minta bantuan tenaga dari luar anggota keluarga. Jenis pekerjaan yang dilakukan, misalnya mendirikan rumah, mengolah tanah pertanian yang luas dan sebagainya. Dalam kegiatan

ini dapat melibatkan orang secara individual atau kelompok. Kegiatan ini dilandasi oleh prinsip resiprositas. Oleh karena itu, menuntut suatu imbalan kerja untuk saling membantu antara peserta yang terlibat. Kegiatan ini bubar apabila pekerjaan telah selesai (Murniatmo, dkk., 2000: 162).

- n. **Nguopin**, yaitu sistem gotong-royong antara individu dan individu atau keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dalam kehidupan masyarakat Bali. Sistem gotong-royong atau *nguopin* ini meliputi kegiatan atau pekerjaan di sawah, seperti menanam, menyiangi, dan panen. Selain itu juga kegiatan di sekitar kepentingan rumah tangga, seperti memperbaiki atap rumah, dinding rumah, menggali sumur, dan kegiatan lain bila suatu keluarga mengadakan upacara-upacara, serta dalam peristiwa kecelakaan atau kematian.

Dalam *nguopin*, keluarga yang minta bantuan kepada para tetangga atau keluarga lain harus dilakukan dengan cara yang sopan santun seperti yang telah digariskan oleh adat. Selain itu, ia juga wajib membalas bantuan tenaga yang disumbangkan kepadanya dengan bantuan tenaga pada kesempatan lain. Saat ini, baik di desa maupun di kota, sistem kerja *nguopin* sudah hilang atau mulai diganti dengan sistem menyewa tenaga upahan karena dianggap lebih praktis dan lebih murah (sebab yang mempunyai hajat tidak perlu menyediakan minuman dan makanan).

Sistem kerja *nguopin* hanya dilakukan dalam perayaan atau upacara tertentu dan peristiwa kecelakaan atau kematian. Kecuali *nguopin*, masih ada cara gotong-royong antara *seka* dengan *seka* (perkumpulan kerja) yang disebut *ngedeng* (menarik). Dalam hal ini, suatu perkumpulan tertentu, misalnya perkumpulan gamelan ditarik untuk ikut serta dengan *seka* lain dalam hal menyelenggarakan suatu tarian suci dalam rangka upacara yang disebut *odolan* (upacara yang berhubungan dengan pertanian). Di samping itu, masih ada satu sistem gotong royong yang disebut *ngayah* atau *ngacang*. Sistem kerja ini diadakan untuk membangun tempat-tempat suci, misalnya membangun atau membersihkan kuil (Murniatmo, dkk., 2000: 164).

- o. **Ngayah**, merupakan kegiatan bersama untuk kepentingan individu atau kelompok sosial yang mempunyai kedudukan sosial tinggi dalam masyarakat Bali atau aktivitas sosial yang bertujuan menyumbangkan tenaga dalam kegiatan yang bersifat sakral dan suci. Tetapi kegiatan *ngayah* ini dapat juga dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara adat di pura, banjar atau desa, dan sebagainya. Pada prinsipnya, kegiatan *ngayah* dilakukan untuk mereka yang berasal dari golongan berderajat tinggi oleh golongan yang kedudukan sosialnya lebih rendah.

Kegiatan *ngayah* ini merupakan suatu pola hubungan yang mantap antara golongan-golongan masyarakat tertentu sehingga menunjukkan hubungan *patron-klien* seperti banjar dengan para anggotanya; antara *puri* dengan *sama carik* atau *sama karang*, orang yang mengerjakan sawah para bangsawan atau ksatria; antara brahmana dengan para *sisia* (pembantu) yang tinggal di *geria*, dan sebagainya. Adapun ketentuan yang berlaku untuk kegiatan *ngayah* ini adalah kelompok yang mendapat sumbangan tenaga kerja wajib menyediakan imbalan walaupun tidak mengikat. Sebaliknya bagi peserta yang tidak ikut dalam kegiatan ini ada sanksi moral, seperti penilaian kurangnya dedikasi terhadap atasan. Hal ini tetap dirasakan oleh peserta meskipun dasar kegiatan *ngayah* adalah kesadaran dan spontanitas dari para peserta (Murniatmo, dkk., 2000: 160).

- p. **Pelarian**, merupakan sistem gotong-royong di daerah Jambi. Gotong-royong yang disebut *pelarian* ini dilaksanakan dalam rangka mengerjakan ladang. *Pelarian* ini sebenarnya merupakan kelompok kerja yang terdiri dari 10 orang pemilik atau petani ladang. Mereka melakukan kerja sama di ladang ketika akan menebang kayu yang besar. Pekerjaan ini dilakukan secara bergantian di antara anggota kelompok kerja. Di Jambi dikenal juga sistem pengerahan tenaga yang disertai dengan pesta yang mengundang warga desa. Pesta ini disebut *berselang* atau pergi *ketalangpetang* yang diselenggarakan sebelum mengerjakan lading (Murniatmo, dkk., 2000: 198).
- q. **Saleng tulong**, sistem gotong-royong dan berbagi pekerjaan dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Si pengambil inisiatif dapat meminta beberapa orang pembantu yang datang atas pemberitahuan kepada umum. Kompensasi yang diberikan kepada para pekerja adalah makan siang yang istimewa. Kecuali itu suasana persaudaraan dalam bekerja merupakan perangsang untuk lebih giat bekerja. Selain kerja gotong-royong yang disebut *saleng tulong*, orang Sumbawa juga mengenal adanya sistem gotong-royong yang disebut *nulong*.

Dalam sistem *nulong* pada hakikatnya memerlukan pengertian yang tegas antara si pengambil inisiatif dan para pembantunya yang jumlahnya bisa sedikit atau banyak, tergantung macam pekerjaan yang akan dikerjakan. Dalam sistem *nulong* orang bekerja selama waktu tertentu dan akan mendapat upah *segutas* (seikatan) padi atau uang yang jumlahnya sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Sistem *nulong* biasanya dilakukan dengan pembantu yang asalnya dari desa lain tanpa mengindahkan hubungan kekerabatan antara si pengambil inisiatif dengan para pembantunya. Sesudah pekerjaan selesai mereka yang

bersangkutan tidak merasakan saling terikat oleh kewajiban-kewajiban apa pun (Murniatmo, dkk., 2000: 221).

- r. **Sambatan**, sistem pengerahan tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Kegiatan-kegiatan sosial itu antara lain dalam bidang pertanian, mendirikan rumah, kesusahan, perkawinan, dan sebagainya. Sambatan merupakan kegiatan gotong-royong yang dilakukan antarwarga. Individu-individu yang secara aktif ikut terlibat dalam kegiatan ini tidak pernah mengharapkan suatu imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Kegiatan ini merupakan kewajiban moral yang wajib dipenuhi oleh warga masyarakat. Sambatan didasari oleh rasa bahwa dalam kenyataan hidup bermasyarakat setiap individu sebagai warga masyarakat akan saling membutuhkan satu terhadap yang lain atau rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Asas yang terdapat dalam sambatan adalah asas hubungan timbal balik atau resiprositas. Di samping itu juga asas kesamaan atau sama rasa. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini tidak mengenal perbedaan kedudukan atau status sosial individu-individu yang terlibat.

Semua kegiatan yang mereka kerjakan bersama dilakukan dengan perasaan rela, ikhlas, tanpa adanya, unsur-unsur yang dirasakan memaksa, paksaan yang dirasakan berupa kewajiban untuk berbuat sosial terhadap sesamanya. Dalam masyarakat Jawa perbuatan semacam ini dilandasi rasa bahwa orang yang suka menolong atau membantu sesama itu sama dengan menanam budi, suatu perbuatan yang luhur, yang oleh orang Jawa disebut *nandur kebecikan*. Diharapkan bila orang suka *nandur kebecikan* akan memperoleh rasa senang, tenteram dan bahagia baik lahir maupun batin (2000: 221).

2. Khasanah kearifan lokal yang berupa pengerahan tenaga kerja, tetapi dengan pemberian upah atau imbalan, antara lain adalah:
 - a. **Bawon**, sistem upah secara tradisional yang dikenal para petani pedesaan Jawa. Bawon biasanya dikenakan pada buruh perempuan sebagai upah dari hasil tuaian padi yang mereka peroleh pada masa panen atau menuai padi. Pada saat musim panen, banyak buruh tani perempuan ikut membantu memanen padi di sawah orang lain dengan harapan memperoleh upah. Keterlibatan para buruh tani untuk ikut memotong padi di sawah orang lain disebut, *derep*. Jumlah upah yang diterima para pen-*derep* di setiap daerah pedesaan di Jawa belum tentu sama, tergantung pada keadaan daerah tempat para penderep bekerja.

Dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan besarnya upah yang harus diterima penderep tergantung pada jumlah *untingan* (ikatan padi) yang mereka peroleh. Dasar perhitungan bawon yang biasa digunakan para pemilik tanah adalah: (i) *maro* yang menentukan separo hasil derepan untuk petani yang memiliki tanah dan separo lagi untuk pen-*derep*; (ii) *mara telu*, perbandingan hasil yang diperoleh dengan ketentuan satu bagian untuk pen-*derep* dan tiga bagian untuk pemilik tanah; (iii) *mara papat*, yaitu satu bagian untuk penderep dan empat bagian untuk pemilik tanah; (iv) *mara lima*, yaitu satu bagian untuk pen-*derep* dan lima bagian untuk pemilik tanah; (v) *mara enem* atau *maranem*, satu bagian untuk pen-*derep* dan enam bagian untuk pemilik tanah, demikian seterusnya sampai *mara sepuluh*.

Dasar perhitungan bawon yang digunakan pemilik tanah ini dipengaruhi pula oleh hubungan antara pemilik tanah dan para pen-*derep*, yang dilakukan (i) bila penderep masih termasuk kerabat, ia akan memperoleh $\frac{1}{4}$ hasil *derep*-an (kerabat dekat atau *sedulur cedhak*) dan $\frac{1}{6}$ hasil *derep*-an (kerabat jauh atau *sedulur adoh*); (ii) bila sama sekali tidak mempunyai hubungan kerabat, pen-*derep* akan menerima $\frac{1}{8}$ hasil atau $\frac{1}{10}$ hasil *derep*-an.

Ketentuan lain yang berlaku adalah apabila pen-*derep* itu telah terlibat sejak proses penanaman padi (*tandur*), menyiangi (*matun*), memupuk, sampai *derep*, maka di samping hasil bawon, masih ditambah lagi upah yang disebut *ayaran*. Sampai sekarang sistem bawon ini masih berlaku dengan dasar perhitungan yang dikemukakan tadi. Perolehan hasil bukan lagi dihitung berdasarkan satuan *untingan*, melainkan per kilogram (Murniatmo, dkk., 2000: 26).

- b. **Derep**, kegiatan yang dilakukan oleh petani Jawa pada saat menuai padi dan biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Kegiatan ini merupakan pengerahan tenaga kerja pada saat menuai atau memotong padi dan hanya dilakukan pada waktu panen. Dalam melakukan pekerjaannya, para pen-*derep* menggunakan alat yang disebut *ani-ani* dan menggendong *tenggok* sebagai wadah hasil tuaiannya. Para pen-*derep* mendapat upah kerjanya dengan perhitungan yang ditentukan oleh pemilik sawah. Upah kerja ini disebut bawon (lih. *bawon*), yang besar kecilnya tergantung pada hasil derepan (Murniatmo, dkk., 2000: 43).
- c. **Melanyain**, aktivitas yang berhubungan dengan “penyewaan tenaga” dalam pekerjaan pertanian di Bali. Dalam sistem ini, pekerja mendapat separo dari hasil bumi, tetapi masih wajib mengolah tanah (membajak, menggaru) untuk tanaman berikutnya. Kemudian, pemilik tanah melanjutkan penanaman padi dan penyewa tanah/pekerja tidak

mendapatkan bagian dari hasil padi yang ditanam itu. Sistem melanyain biasanya lebih dianggap sebagai suatu sistem “menyewa buruh” atau “menyewa tenaga”, sebab apa yang sebenarnya dilakukan adalah menyewa tenaga orang, terutama ternaknya, untuk mempersiapkan sawah. Hanya orang miskin yang mau menerima pekerjaan dengan sistem melanyain. Sistem itu biasanya dianggap sebagai suatu cara bagi mereka yang bukan petani untuk bisa mendapatkan tenaga pekerja tanpa kehilangan hasil padinya. Karena pekerjaan-pekerjaan lain seperti menanam, matun, dan menuai bisa dilakukan oleh suatu seka (lih. seka), dengan sistem melanyain, orang biasa dapat menanam padi tanpa bekerja sendiri (Murniatmo, dkk, 2000: 131).

- d. **Meurup**, atau *meuramee*, kegiatan bersama untuk penanaman padi yang khusus dilakukan para perempuan di Aceh. Biasanya meurup ini dilakukan para buruh perempuan dengan sistem kelompok. Setiap kelompok mempunyai anggota sejumlah 15–20 orang. Ketentuan yang berlaku dalam sistem meurup, yaitu setiap anggota kelompok mempunyai satu petak sawah dengan luas yang sama untuk masing-masing petak. Mereka akan mengerjakan penanaman secara bergantian. Tetapi apabila ada di antara anggota yang tidak mempunyai petak sawah, ia dapat memungut upah dari anggota lain yang memiliki petak sawah. Sistem meurup ini dianggap praktis karena dalam waktu yang relatif singkat penanaman padi dapat selesai dan masa panen pun ada bersamaan (Murniatmo, dkk, 2000: 138).
3. Disamping kerja sama dalam pengerahan tenaga kerja, kehidupan sosial tradisional juga mengenal pemanfaatan harta bersama, baik tanah ataupun peternakan, antara lain:
 - a. **Tanah boital may**, tanah *boital mal* atau tanah agama di Aceh. Menurut pengertian orang Aceh, terutama yang tinggal di daerah kabupaten Aceh Besar, tanah boital may berfungsi untuk keperluan manusia berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Status tanah ini merupakan harta orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tanah yang dulu dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Aceh dan tidak diketahui keluarga atau keturunannya yang menjadi ahli waris. Yang bertanggung jawab untuk mengurus tanah boital may adalah para pejabat atau penguasa setempat, seperti *keuchiek*, (kepala kampung) kepala mukim atau ulee balang. Mereka ini yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk memanfaatkan tanah guna kepentingan agama (Islam) menurut ketentuan hukum Islam; misalnya pemanfaatan tanah tersebut untuk merawat atau membangun masjid, madrasah, dan sebagainya (Murniatmo, dkk, 2000: 240)

- b. **Nggadhuh**, sistem menabung secara tradisional yang dilakukan para petani pedesaan di daerah Jawa. Nggadhuh dilakukan oleh petani yang memiliki binatang ternak (lembu, kambing, kerbau) dengan menitipkan ternaknya kepada orang lain yang bersedia memelihara dan merawatnya. Penitipan ini disertai dengan persyaratan berupa perjanjian yang disetujui oleh pemilik ternak dengan orang yang disertai untuk memelihara ternaknya. Dasar perjanjian adalah bagi hasil. Misalnya, apabila ternak itu nantinya dijual maka hasil penjualan itu akan dibagi antara pemilik ternak dengan si perawat berdasarkan ketentuan yang telah disetujui kedua belah pihak. Bisa juga dilakukan dengan ketentuan apabila ternak itu beranak, anak pertama akan diberikan kepada orang yang merawatnya sebagai upah, dan seterusnya akan dibagi dua bila anak ternak berikutnya dijual (Murniatmo, dkk, 2000: 162).
- c. **Pengadas**, orang yang memelihara ternak orang lain seperti sapi, kerbau, kambing, atau babi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok para pemilik ternak itu kebanyakan tidak memelihara sendiri ternaknya. Para pemilik ternak pada umumnya petani yang tidak terlalu miskin. Mereka membeli ternak untuk kemudian diadaskan kepada pengadas. Ada ketentuan yang berlaku bagi pemilik ternak dengan pengadas. Ketentuan yang berlaku ini apabila hewan ternak yang diadas belum pernah melahirkan anak maka anak pertama diserahkan untuk pengadas, anak kedua untuk pemilik ternak.

Apabila yang diadas itu ternak yang pernah mempunyai anak (ternak induk) maka anak pertama yang dilahirkan untuk pemilik ternak, dan anak kedua untuk pengadas. Anak ternak yang menjadi bagian pemilik ternak akan terus dipelihara pengadas sampai dicocok hidungnya atau *keluk*. Ketentuan lain yang berlaku apabila ternak yang diadas itu tidak pernah beranak kemudian dijual maka hasil keuntungannya dibagi dua antara pemilik ternak dan pengadas. Selanjutnya apabila ternak yang diadas itu mati selama dalam ngadas, maka diteliti terlebih dulu sebab kematiannya. Apabila kematian ternak itu bukan kesalahan pengadas maka ia dibebaskan dari ganti rugi, tetapi sebaliknya apabila kematian itu karena kesalahan pengadas, maka ia harus mempertanggung-jawabkan dengan memberi ganti rugi kepada pemilik ternak (Murniatmo, dkk, 2000: 201).

BAB V KELEMBAGAAN LOKAL

A. Distorsi Kelembagaan Sosial

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa teori pembangunan adalah sebuah kebijakan yang merupakan bentuk perubahan sosial yang terencana dan memiliki tujuan akhir yang sama di seluruh negara di dunia ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai suatu kondisi ideal dan menjadi cita-cita seluruh bangsa dan masyarakatnya. Berbagai teori pembangunan telah banyak diulas, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang perkembangannya mengikuti wacana teori dan aksi secara berulang-ulang. Pada tahap pertama muncul teori modernisasi yang berada dalam kerangka teori evolusi yang muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, memunculkan teori ketergantungan (*dependency theory*) yang memiliki sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Ketiga, muncul cara pandang yang dikenal dengan teori sistem dunia (*the world system theory*), yang memandang dunia sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme.

Dominasi modernisme tampak pada anggapan, bahwa modernisme merupakan sebuah keharusan bagi negara terbelakang untuk dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh negara barat menggunakan pendekatan modernism, yang seringkali diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai keadaan yang telah direncanakan yang diartikulasikan dalam bentuk sistem ekonomi dan struktur masyarakat barat. Oleh karena itu tidak salah jika pembangunan dengan konsep modernisme dianggap sebagai proses *westernisasi*, mengingat pola pembangunan ini semakin berkembang pesat dengan dukungan investasi kapitalis. Pada tahap hubungan transnasional semakin kuat, dominasi modernisasi yang menjelma sebagai kekuatan ekonomi negara maju semakin kuat mencengkeram dan menghegemoni negara berkembang. Pola hubungan antarnegara menjadi semakin tergantung yang tentu saja menyebabkan terpuruknya negara terbelakang dan negara berkembang. Ekspansi modal

melalui investasi asing dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam era globalisasi. Investasi asing merupakan usaha untuk meningkatkan ekonomi negara berkembang melalui pendekatan pembangunan yang mengedepankan modernisasi. Masuknya investasi asing telah berhasil merubah struktur sosial masyarakat lokal berikut dengan nilai-nilainya. Perubahan struktur sosial tersebut juga disebabkan oleh globalisasi yang mencul sebagai konsekuensi dari modernisasi yang pada tingkatan paling umum, dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang mempengaruhi seluruh wilayah di dunia dalam sektor yang beragam termasuk ekonomi, teknologi, politik, media, budaya, dan lingkungan. Definisi yang lebih tepat mengenai globalisasi adalah sebuah proses atau rangkaian proses yang berwujud suatu transformasi dalam organisasi spasial dari relasi serta transaksi sosial yang melahirkan pola hubungan *transcontinental* atau *interregional* serta jaringan aktivitas dan interaksi.

Pengaruh modernisasi juga terjadi pada kelembagaan tradisional lokal, mengingat banyak daerah di Indonesia yang telah memiliki seperangkat lembaga-lembaga tradisional dan juga lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya harus berubah menjadi kelembagaan yang lebih modern. Lembaga lokal ini pada umumnya masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan dari segi organisasi atau kelembagaan. Atas nama pembangunan, pemerintah sebagai *stakeholder* dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang mumpuni untuk menjadi wadah atau saluran pembangunan, bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan, sehingga pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern untuk melaksanakan pembangunan. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibentuk pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri daripada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.

Modernisasi kelembagaan tampaknya memang menjadi salah satu syarat penting bagi lembaga donor. Menurut Uphoff (1986), selama kurun waktu yang panjang lembaga donor internasional mengakui akan pentingnya pengembangan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan. AUSAID dan Bank Dunia telah memberikan pembuktian terhadap pentingnya pengembangan kelembagaan ini, bahkan seringkali proyek yang mengabaikan pengembangan kelembagaan berakhir pada kegagalan. Sebagian besar lembaga donor hanya berkonsentrasi pada pengembangan kelembagaan di

tingkat pusat saja, karena Pemerintah dipandang sebagai sebuah lembaga yang paling mudah disentuh serta merupakan lembaga yang telah memiliki kemampuan dalam manajemen organisasi. Lembaga di tingkat lokal dianggap sebagai bagian "nomor dua" saja dibandingkan lembaga di tingkat pusat atau nasional, karena dipandang hanya memainkan sedikit peran serta mendapatkan alokasi sumber daya yang sangat terbatas. Pengembangan kelembagaan mengacu pada proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga dalam mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dan keuangan yang ada. Berbagai istilah akan muncul, namun demikian semuanya memiliki tujuan peningkatan efektifitas penggunaan sumber daya suatu negara sehingga pembangunan yang dijalankan akan dapat berhasil. Israel (1990) menggambarkan bahwa pengembangan kelembagaan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan pada berbagai negara seiring dengan desakan kalangan LSM. Rockefeller dan Ford Foundation telah memiliki program pengembangan kelembagaan pada tahun 1950-an dan 1960-an, demikian pula dengan USAID yang juga mempunyai program serupa pada dekade setelahnya.

Tampaknya, pengembangan kelembagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proyek pembangunan yang didanai oleh Bank Dunia. Selain membangun dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, terdapat cakupan lain yang termasuk dalam aspek pengembangan kelembagaan, terutama apabila proyek pembangunan tersebut bersifat investasi di bidang jasa seperti penyuluhan pertanian, kesehatan atau pendidikan. Kesulitan yang dihadapi adalah bahwa pembangunan fisik ternyata jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengembangan kelembagaan, karena ternyata komponen fisik pada suatu program pembangunan memiliki tingkat keberhasilan dua kali dibandingkan dengan komponen pembangunan kelembagaan. Kegagalan ini kemudian menyebabkan banyak praktisi pembangunan yang mencoba untuk mengabaikan masalah kelembagaan sebagai aspek penentu keberhasilan proyek pembangunan. Kelembagaan menjadi aspek yang dianggap tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan investasi, pendidikan bahkan hingga perubahan budaya masyarakat. Bahkan, banyak pula yang menghilangkan aspek kelembagaan yang dinilai tidak dapat dikuantifikasi dan menggantikannya dengan faktor lain yang dapat dengan mudah dikuantifikasi menjadi berbagai formula. Israel (1990) memberikan dua alasan yang mendasari hilangnya aspek kelembagaan dalam analisis ahli pembangunan, yaitu (1) pendekatan pembangunan selama ini menggunakan perspektif ekonomi yang selalu berpikir pada efisiensi penggunaan sumber daya; dan (2) kelembagaan merupakan persoalan yang rumit untuk dijelaskan. Perkembangan ilmu manajemen dan administrasi

pembangunan pun belum mampu menyentuhnya terlebih pada negara berkembang.

Pengertian lembaga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuwan sosial. Bahkan lebih jauh Uphoff (1986), memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi. Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat, sebagai organisasi dan prosedur yang memiliki berbagai tingkatan dalam proses pelebagaan. Pelebagaan merupakan sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan kemandirian. Sementara bagi Uphoff (1986) lembaga merupakan sekumpulan norma dan perilaku telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Israel (1990) memberikan penjelasan mengenai konsep umum tentang lembaga yang meliputi semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan atau departemen pusat, dan sebagainya.

B. Wujud Kelembagaan Sosial

Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melebaga”. Pengembangan kelembagaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan lembaga terutama lembaga lokal dalam melaksanakan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana fisik dan modal sosial. Modal sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada, karena telah melekat dalam masyarakat, dan menjadi sesuatu yang tidak disadari keberadaannya oleh masyarakat tersebut. Pengembangan kelembagaan perlu dilakukan seiring dengan peningkatan modal sosial. Berbagai kasus yang diulas oleh Colleta (2000) memberikan gambaran tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan terutama pengembangan kelembagaan. Pada tingkat modal sosial tinggi, mampu memunculkan lembaga baru yang memiliki tingkatan organisasi yang mapan. Pada tingkat modal sosial yang rendah ternyata membawa dampak pada hancurnya kelembagaan yang telah ada.

Banyak kelembagaan dan organisasi sosial di Indonesia yang perlu ditinjau ulang dan direkonstruksi kembali agar dapat diimplementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam buku ‘Khasanah Budaya Lokal, Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara’

yang ditulis oleh Gatut Murniatmo dkk. mendeskripsikan jenis-jenis budaya lokal Nusantara yang hidup di seluruh wilayah Indonesia. Khasanah budaya lokal yang berkaitan dengan kelembagaan dan organisasi masyarakat adalah:

1. Kelembagaan lokal yang berkaitan dengan aturan dan kesatuan sosial, antara lain:
 - a. **Ana-anaKaraeng**, berarti “pengiring tuan”, sikap dasar pranata sosial dalam masyarakat Makassar (Ujung Pandang). Dalam sikap ini ditunjukkan bahwa hasrat untuk memperbaiki kedudukan sosial adalah penting bagi tindakan laki-laki Makassar pada umumnya. Sikap ini ditunjukkan lewat perilaku sosial, misalnya memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam suatu keluarga atau kelompok kerabat yang lebih besar, selalu terlihat ambisi untuk memperoleh kedudukan sebagai pemimpin.

Nilai sosial semacam inilah yang diutamakan. Rasa persaingan mendorong mereka untuk memperoleh kedudukan sosial, dan rasa takut akan timbul bila tidak berhasil memenuhinya. Kegagalan yang membawa malu (*siri*) adalah hal yang dianggap gawat. Namun, sikap persaingan hanya dapat dinyatakan dengan orang yang kedudukan sosialnya sama karena dalam menghadapi orang yang berkedudukan lebih tinggi, seseorang harus bersikap hormat dan patuh.

Keberhasilan dalam mengumpulkan pengikut akan semakin membantunya menambah kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh akan meninggikan kedudukan mereka dalam masyarakat. Semakin banyak pengikut, semakin tinggi kekuasaan orang itu, dan semakin tinggi pula martabat yang diperolehnya. Ana-ana karaeng dapat juga untuk menggerakkan atau menggiatkan suatu kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sifat yang dimiliki oleh para pemimpin di Makassar adalah berani menanggung risiko, bertanggung jawab, dan pandai berbicara. Sebaliknya, para pengikut hendaknya patuh kepada tuannya, menunjukkan keberanian, dan kemampuan untuk segera bertindak pada saat dibutuhkan. Kelebihan-kelebihan ini biasanya dimiliki oleh keluarga bangsawan dan kepala-kepala adat; seperti *pinati* (Murniatmo, dkk, 2000: 6).

- b. **Awig-awig**, aturan atau pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat Bali. Setiap komunitas di Bali, baik banjar maupun desa, bahkan organisasi sosial seperti *subak* dan *seka* mempunyai awig-awig. Awig-awig berlaku sangat mengikat terhadap warga komunitas yang bersangkutan dan bersifat terbatas, artinya untuk desa dines atau banjar dines diberlakukan undang-undang atau peraturan resmi yang bersumber pada peraturan pemerintah pusat.

Awig-awig ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pendapat para anggota desa atau banjar dalam rapat krama desa atau krama banjar.

Konsekuensinya, mereka wajib mematuhi awig-awig yang disepakati bersama. Awig-awig berlaku untuk semua aspek kehidupan dalam komunitas setempat. Awig-awig didasarkan pada adat istiadat dan agama atau kepercayaan, yaitu nilai-nilai atau pandangan hidup masyarakat Bali sehingga sulit untuk dipastikan, mana di antara adat, nilai atau pandangan hidup yang paling mendasarinya. Masyarakat Bali sangat mematuhi berlakunya awig-awig, pelanggaran terhadap awig-awig akan menimbulkan konsekuensi berat bagi si pelanggar. Sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar tersebut selalu dihubungkan dengan kepentingan agama Hindu (Murniatmo, dkk, 2000: 14).

- c. **Banjar**, kesatuan sosial di Bali berdasarkan teritorial. Banjar sebagai kesatuan sosial adalah kesatuan-kesatuan adat yang melakukan segala kegiatan berhubungan dengan kepentingan adat. Suatu banjar berpusat pada bale banjar, tempat para anggota atau warganya saling bertemu dan mengadakan rapat pada hari-hari tertentu.

Banjar dipimpin oleh seorang kepala banjar yang disebut *klian banjar* atau *kliang*. Ia dipilih untuk suatu masa jabatan tertentu oleh semua warga banjar. Tugasnya bukan hanya menyangkut urusan kehidupan sosial, melainkan juga dalam kehidupan keagamaan. Selain itu, ia juga harus dapat menyelesaikan masalah mengenai hukum adat tanah.

Kewargaan banjar menurut anggapan orang Bali juga sebagai warga dalam masyarakat adatselalu memandang laki-laki dan perempuan sebagai dwitunggal. Karena itu, dalam setiap kegiatan selalu ada pembagian tugas. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan ada pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Biasanya sesudah setahun menikah, sepasang suami istri "turun ke adat" setelah disetujui oleh rapat banjar. Orang yang telah bercerai atau pasangannya meninggal biasanya akan meninggalkan adat karena ia sekarang hanya manusia separo yang tidak lagi dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban adat dengan baik.

Meskipun demikian, ada beberapa kemungkinan bagi orang dewasa yang tidak atau belum mempunyai suami atau istri untuk turut melakukan kewajiban adat, seperti seorang laki-laki dewasa dengan saudara perempuannya yang juga telah dewasa. Seorang janda dengan anak laki-lakinya yang telah dewasa dapat pula merupakan pasangan untuk "turun ke adat". Namun sebaliknya, sepasang suami-istri dapat pula meninggalkan adat jika menghendaki, apabila anak laki-lakinya yang bungsu telah menikah dan telah memasuki adat. Peristiwa ini disebut dengan istilah *ngarepan anak* (mengajukan anak).

Hal tersebut jarang dilakukan karena ada pandangan bahwa “meninggalkan adat berarti membaringkan diri dan mati”. Sebagai kesatuan sosial yang mengurus adat, banjar bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan pura pemujaan nenek moyang, pura tempat pemujaan orang mati, tempat-tempat untuk melakukan upacara besar, dan sebagainya. Semua tingkah laku dan perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan dalam banjar diatur dalam suatu peraturan yang biasanya dituliskan di atas daun lontar. Peraturan itu disebut awig-awig (Murniatmo, dkk, 2000: 20).

- d. **Bodi Caniago**, sistem pemerintahan di Minangkabau, Sumatra Barat. Sistem pemerintahan ini dijalankan secara adat dan dihubungkan dengan tokoh legendaris di Minangkabau, yaitu Datuek Poropatiek nan Sabatang. Bodi caniago adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, di Minangkabau juga berlaku adat menurut sistem pemerintahan *koto piliang*, yang bersifat otokratik dan dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuek Katemenggungan.

Sistem pemerintahan bodi caniago menempatkan unsur musyawarah mufakat sebagai hal paling penting. Segala pembicaraan untuk memecahkan masalah sosial selalu diusahakan lewat musyawarah. Namun, tidak demikian halnya dengan sistem pemerintahan *koto piliang*. Dalam sistem pemerintahan ini segala sesuatu berada di tangan sebuah keluarga yang tidak ditentukan melalui sistem pemilihan. Karena itu, sistem pemerintahan *koto piliang* bersifat otokratik. Sifat otokratik ini ditunjukkan dengan bangunan-bangunan balai nagari yang dibedakan atas bagian yang dibuat tinggi dan bagian lain yang dibuat lebih rendah. Bagian-bagian ini tidak terdapat dalam pemerintahan bodi caniago. Namun saat ini tampaknya perbedaan seperti pada sistem *koto piliang* sudah mulai ditinggalkan (Murniatmo, dkk, 2000: 36).

- e. **Dalihan Na Tolu**, artinya tiga tungku (*dalihan*: alat memasak atau tungku, *na tolu*: tiga), merupakan kiasan yang menggambarkan falsafah atau pandangan hidup orang Batak Toba. Di daerah Toba, hanya dikenal bentuk tungku yang tersusun di atas tiga kaki, yang mempunyai arti dan fungsi sama. Apabila salah satu kaki patah atau rusak, masakan di atasnya akan tumpah. Karena itulah, ketiga kaki itu harus dijaga agar tidak ada yang rusak; semuanya harus utuh agar kuat menyangga tungku.

Dalihan na tolu merupakan pranata sosial yang mengatur perilaku manusia sebagai warga masyarakat, juga menunjukkan sistem kekerabatan orang Batak Toba, termasuk aturan hak dan kewajiban dalam perkawinan, kelahiran, kematian, serta kedudukan seseorang dalam adat.

Dalam sistem kekerabatan orang Batak Toba, berlaku prinsip keturunan patrilineal. Karena itu, hubungan antara anggota marga *sabutuha* diperhitungkan berdasarkan keturunan darah melalui garis laki-laki atau ayah. Adapun hubungan antara kerabat *hula-hula* dan *bom* terjadi akibat perkawinan. Menurut *bom*, *hula-hula* dianggap sebagai sumber *sahala* (pahala) dan *pasu-pasu* sebagai sumber rezeki. Karena itu, sudah selayaknya *bom* menghormati *hula-hula*. Dengan demikian, dalam dalihan na tolu, ketiga golongan harus saling menghormati, menolong, dan membantu dalam setiap upacara adat yang diselenggarakan setiap golongan (Murniatmo, dkk, 2000: 41).

- f. **Panngaderreng**, norma dan aturan adat yang dianggap keramat dan suci bagi masyarakat Bugis. Masyarakat Makassar menyebutnya dengan *panngadakkang*. Sistem adat ini dalam konsepsi keagamaan masyarakat Bugis dan Makassar didasarkan atas lima unsur pokok, yaitu (i) *ade'* (Bugis) dan *ada'* (Makassar), (ii) *bicara*, (iii) *rapang*, (iv) *wari'*, dan (v) *saw*. Kelima unsur tadi terjalin satu sama lain sebagai kesatuan organis bagi masyarakat Bugis-Makassar.

Unsur tadi memberi rasa sentimen kewargaan masyarakat, identitas sosial, martabat, dan rasa harga diri yang terkandung dalam konsep *siri'* yakni suatu konsep yang abstrak tetapi akibatnya berwujud konkret. *Ade'* (Bugis) atau *ada'* (Makassar) adalah unsur yang terdiri dari: (i) *Ade'* *akkalabinengeng* atau norma mengenai perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, keturunan, aturan mengenai hak, dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam hal rumah tangga, serta sopan santun dalam pergaulan antara anggota kerabat; (ii) *Ade'* *tana*, atau norma-norma mengenai hal bernegara. Norma ini berwujud sebagai hukum negara dan hukum antarnegara. *Bicara* adalah unsur mengenai semua aktivitas dan konsep-konsep yang bersangkutan dengan peradilan yang kurang lebih sama dengan hukum acara, dan membahas prosedur serta hak-hak dan kewajiban seorang untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan.

Rapang berwujud contoh, perumpamaan, kias, atau analogi. *Rapang* menjaga kepastian kontinuitas suatu keputusan hukum tak tertulis dari masa lampau sampai sekarang. *Rapang* merupakan contoh dan perumpamaan-perumpamaan yang menganjurkan kelakuan yang ideal dan etika dalam lapangan hidup tertentu, seperti hidup dalam suatu kekerabatan. Kecuali itu, *rapang* juga dianggap keramat untuk mencegah tindakan-tindakan yang bersifat gangguan terhadap hak milik serta ancaman terhadap keamanan seorang warga masyarakat.

Wari' adalah unsur yang melakukan klasifikasi dari segala benda, peristiwa-peristiwa, dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat menurut golongannya. Misalnya, menyusun dan memelihara tata susunan dalam hidup kemasyarakatan yang bertujuan untuk memelihara jalur dan garis keturunan yang mewujudkan pelapisan sosial dan sebagainya. *Sara'* merupakan unsur yang mengandung pranata-pranata dan hukum Islam yang melengkapi keempat unsur sebelumnya (Murniatmo, dkk, 2000: 187).

2. Kelembagaan yang berkaitan dengan upacara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara lain:
 - a. **Marsitaloho**, rangkaian secara adat penggarapan tanah di ladang dan di sawah yang dilakukan orang Batak Toba. Marsitaloho terdiri atas tahap-tahap membersihkan belukar, menebang pohon-pohonan, membakar ranting-ranting, menyiapkan saluran air dan pematang, mencangkul, membajak, serta menggaru. Semua ini dilakukan kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan melakukan pekerjaan penanaman benih, menyiangi, dan menuai padi. Orang Batak Toba mengenal sistem pengerahan banyak tenaga dalam bidang pertanian atau bercocok tanam. Mereka menyebutnya *marsiurupan* dan orang Karo mengenalnya dengan istilah *paron*. Dalam aktivitas ini, sekelompok orang (tetangga atau kerabat dekat) bersama-sama mengerjakan tanah secara bergiliran (Murniatmo, dkk, 2000: 125).
 - b. **Memberasihi**, upacara yang dilakukan masyarakat petani di Kalimantan Selatan. Tujuan upacara ini adalah agar panen berhasil dengan baik dan segala jenis tanaman tidak terkena serangan hama. Upacara ini dilaksanakan pada saat akan mengetam atau memetik tanaman di sawah. Sesaat sebelum padi dituai, orang menyediakan sajian berupa nasi lemak dan lauk sekadarnya untuk diberi doa selamat. Di tempat para peserta yang ikut menuai padi, diberi tanda bendera kuning. Setelah itu, mereka turun di sawah untuk menuai atau mengetam padi yang sudah masak dengan membaca selawat atau doa sekadarnya. Untuk permulaan, padi yang diketam hanya tiga tangkai saja, kemudian dibungkus dengan bendera kuning untuk dibawa ke pondok. Setelah itu, mulailah padi diketam bersama-sama secara bergotong-royong atau *baarain*. Terkadang upacara ini dilaksanakan dengan *ba-andi-andi*, yaitu bernyanyi bersama pada waktu menuai padi dan juga pada waktu *mairik*, memisahkan gabah padi dari tangkainya. Dengan *ba-andi-andi* ini mereka akan lebih bersemangat dalam bekerja (Murniatmo, dkk, 2000: 132).

- c. **Mopoa huta**, upacara kesuburan tanah yang dilakukan para petani Gorontalo. Upacara mopoa huta maksudnya memberi makan kepada tanah, karena tanah merupakan sumber kehidupan para petani. Sebagai sumber kehidupan, tanah pun membutuhkan makan agar selalu dapat melayani kebutuhan manusia. Agar tanaman yang ditanam di atasnya (padi) dapat tumbuh subur dan memuaskan hasilnya. Karena itu, manusia perlu memperhatikan tanah dengan cara menghormatinya melalui upacara mopoa huta. Biasanya upacara mopoa huta dilaksanakan sebelum menanam dan sesudah menuai padi. Upacara mopoa huta dipimpin oleh *talenga* atau dukun.

Upacara ini dilengkapi dengan sajian yang terdiri dari nasi kuning, nasi merah, pisang, telur rebus, daging, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, *talenga* yang disebut juga *panggoba* membawa sesajian tadi. Sesampainya di tanah pesawahan, sajian diletakkan. Selanjutnya *talenga* membakar kemenyan yang sudah dipersiapkan. Setelah semuanya siap, *talenga* membaca doa dan mantra sambil membakar kemenyan yang maksudnya untuk mempersembahkan makanan pada "tanah". Setelah itu biasanya saji-sajian tadi dibagi-bagikan kepada anak-anak kecil dan mereka yang menyertai *talenga*. Dengan dibagi-bagikannya sajian tadi maka berakhirlah *mopoa huta* (Murniatmo, dkk, 2000: 144).

- d. **Moyali**, upacara yang dilakukan para petani Poso, Sulawesi Tengah berkenaan dengan persiapan untuk menanam bibit di sawah atau ladang mereka. Upacara moyali dilakukan sebelum sawah atau ladang ditanami. Untuk upacara ini disediakan sesajen atau *pakava* berupa beras putih yang halus sekali. Beras ini dimasukkan ke dalam belanga kecil dan sesajen yang lain berupa hati ayam yang dibuat sate. Setelah semua *pakava* lengkap, dibawa ke sawah atau ladang yang akan ditanami esok harinya. Yang membawa *pakava* ke sawah atau ladang adalah orang laki-laki tua yang diiringi anak-anak kecil.

Sesajen atau *pakava* yang dibawa ke sawah atau ladang dilengkapi dengan umbi-umbian yang sudah dibelah. Umbi-umbian ini sebagian sudah direbus dan sebagian masih berupa bahan mentah. Semua *pakava* diatur sedemikian rupa di suatu tempat yang bersih. Setelah sajen selesai diatur, orang tua tadi berdiri untuk mengucapkan doa pujian kepada *lamdase* sebagai penguasa keempat penjuru angin. Selesai mengucapkan doa pujian, *pakava* tadi disantap orang tua dan para pengiringnya sampai habis tak tersisa. Selama memakan sajen ini tidak boleh berbicara atau minum. Keesokan harinya baru dilakukan penanaman bibit (Murniatmo, dkk, 2000: 146).

- e. **Ndambu**, upacara tukar-menukar makanan hasil kebun antara gabungan-gabungan pulau buatan yang disebut *paburu*, tetapi satu dengan lainnya merupakan lawan adat. Upacara ini biasa dilakukan suku Kimam, Papua. Pelaksanaan upacara ndambu bersamaan waktunya dengan berakhirnya masa berkabung karena kematian seorang anggota kerabatnya.

Dalam upacara ini, hasil kebun yang diberikan kepada lawan kelompoknya harus mengandung kekuatan gaib dan dianggap keramat, misalnya ubi tanah dan keladi. Selain itu juga harus ada tanaman *wati* (bahan untuk minuman keras) dan kadang-kadang *masaka* dapat ditambah dengan tanaman kebun yang lain, seperti pisang, tebu, tembakau, dan pinang. Upacara ndambu sedapat mungkin diselenggarakan pada musim panen, terutama untuk tanaman ubi tanah dan keladi.

Dalam upacara ndambu terlihat adanya unsur-unsur persaingan yang besar. Salah satu pihak menyerahkan hasil kebun yang baik dan sebanyak mungkin kepada pihak lawan. Sebaliknya pihak lawan yang tidak bisa mengembalikan hasil kebun yang baik, dianggapnya kalah. Status sosial kelompok yang menang dalam upacara ini akan naik dalam masyarakat.

Hal itu amat penting karena menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang petani yang baik, pandai, dan mempunyai ilmu gaib dalam hal melakukan pekerjaan berkebun meskipun dalam kenyataannya semua hasil kerjanya itu dibantu oleh teman-teman sekelompoknya. Mereka yang menang dalam upacara ndambu dianggap sebagai penguasa dalam masyarakat. Dengan adanya pesta ndambu yang dilakukan oleh orang Kimam itu membuat para petani Kimam berusaha lebih meningkatkan hasil produksi kebunnya dengan bekerja lebih intensif lagi. Biasanya pesta ndambu diadakan pada saat penghapusan masa berkabung yang disebut *koathotha*.

Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa orang tidak bisa mengadakan upacara *ndambu* pada peristiwa-peristiwa lain. *Ndambu* sering juga diadakan untuk memecahkan suatu pertengkaran, baik antara seseorang dengan seseorang yang lain, maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan seseorang karena alasan yang kecil bertengkar dengan orang lain, dalam kemarahannya dapat menantang orang lain (lawannya) untuk mengadakan ndambu dengannya.

Pihak lawan biasanya mau menerima. Bila tidak, ia akan menjadi bahan ejekan di masyarakat. Lagi pula martabatnya akan merosot. Hanya para petani yang baik saja yang biasanya melakukan tantangan untuk mengadakan pesta atau upacara ndambu. Upacara ndambu biasanya dilakukan untuk memecahkan pertengkaran mengenai tanah, pencurian wanita atau zina (Murniatmo, dkk, 2000: 153).

- f. **Weleng**, upacara di bidang pertanian yang dilakukan para petani Jailalo, Saku, Makian, Maluku. Weleng merupakan upacara adat di kalangan masyarakat petani Maluku yang dilakukan pada saat membuka kebun, menanam bibit atau benih dan memungut hasil tanaman. Maksud upacara weleng ini sebagai ungkapan rasa terima kasih para petani kepada roh leluhur yang memberi hasil panen yang memuaskan.

Di Maluku, khususnya di daerah-daerah Jailalo, Saku, dan Makian, pelaksanaan upacara diatur oleh suatu lembaga adat yang disebut *kobota* yang diketuai oleh kepala kampung atau *nyara*. Sedang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adalah *guru koseba* dan *guru gomatel*. Setelah panen selesai, para petani *kobota* segera bermusyawarah untuk mempersiapkan penyelenggaraan upacara weleng. Dalam musyawarah ini ditentukan pula hari baik guna penyelenggaraan upacara. Tiga hari sebelum upacara diselenggarakan, guru koseba harus berhubungan dengan roh leluhur yang maksudnya mohon bantuan agar penyelenggaraan upacara berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan apa pun.

Untuk menentukan lamanya penyelenggaraan diambil buah jeruk yang disebut *pigila*. Buah jeruk itu dibelah dan apabila waktu dibelah lima biji jeruk terlepas, ini pertanda bahwa upacara weleng diselenggarakan selama lima hari; kalau yang terlepas hanya empat biji maka upacara diselenggarakan selama empat hari, dan yang berkewajiban membelah jeruk adalah *guru gomatel*. Pelaksanaan upacara weleng disertai tari-tarian, sampai satu diantara penari itu dalam keadaan tidak sadar. Bila demikian berarti *wonger*, roh yang menyebabkan panen berhasil telah hadir dan berkenan atas penyelenggaraan upacara *weleng* (Murniatmo, dkk, 2000: 266).

3. Kelembagaan sosial yang terwujud dalam organisasi adat, antara lain adalah:
- a. **Marong**, bentuk organisasi khusus di bidang pertanian di daerah Tidore, Maluku. Organisasi ini terdiri atas sejumlah laki-laki yang bekerja sama menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanian dengan cara gotong-royong. Dalam marong berlaku ketentuan bahwa mereka yang ikut menjadi peserta organisasi atau perkumpulan ini secara konsekuen aktif ikut membantu anggota lain menyelesaikan pekerjaan pertanian. Sebagai konsekuensi dari aktivitas ini, bila orang itu mempunyai pekerjaan, orang yang dibantu pun akan ikut bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Marong dibentuk berdasarkan prinsip resiprositas. Anggota marong berjumlah 5–30 orang yang dipimpin oleh seorang yang disebut *jogoko*. *Jogoko* mempunyai wewenang untuk memberi hukuman kepada para

anggota yang melanggar ketentuan yang berlaku bagi perkumpulan itu (Murniatmo, dkk, 2000: 124).

- b. **Patasiwa**, suatu perkumpulan atau organisasi di Ambon-Maluku yang berfungsi menghimpun kekuatan politik. Pada zaman dulu, patasiwa merupakan organisasi di bidang kemiliteran. Istilah patasiwa berarti sembilan bagian (pata=bagian, siwa=sembilan). Di samping patasiwa, orang juga mengenal organisasi serupa yang disebut *patalima*, yang maksudnya lima bagian.

Di Ambon dan di Seram, Maluku, tiap-tiap desa termasuk dalam salah satu dari kedua organisasi tersebut. Organisasi patasiwa dan patalima berasal dari daerah Seram Barat. Patasiwa merupakan kelompok orang-orang Alfuru yang tinggal di daerah sebelah barat sungai Mala sampai ke Teluk Upa Putih bagian selatan, sedangkan patalima adalah kelompok orang yang tinggal di sebelah timur daerah perbatasan. Patasiwa dibagi mejadi dua kelompok, yaitu patasiwa hitam (*patasiwa mete*) dan patasiwa putih yang tinggal di sepanjang pantai selatan sebelah timur sungai Mala sampai pada Teluk Teluti.

Anggota-anggota patasiwa hitam mempunyai tanda rajah kulit (*tatouagae*), sedangkan patasiwa putih tidak. Maksud pembagian *tatouagae* tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya, orang mengatakan bahwa patasiwa putih berasal dari barat yang berpindah ke daerah patalima ketika mengikuti operasi Belanda yang sedang melaksanakan *hongitochten* (1615–1665). Ada yang mengatakan, bahwa pembagian patasiwa dan patalima, bukan merupakan kebudayaan Seram asli, tetapi berasal dari Teluk Tidore dan Ternate. Alasan pembagian itu adalah untuk mempermudah Sultan Ternate menguasai dan menyatukan orang Seram.

Keterangan lain mengatakan bahwa jauh sebelum terjadi pembagian patasiwa dan patalima, telah ada sistem pembagian dalam masyarakat orang Seram yang disebut *pata alume* (*halune*) dan *pata weimale* (*memale*). *Pata alume* tinggal di daerah sungai Tapalawa, sedangkan *weimale* tinggal di sebelah selatan dan timur sungai Tala. Meskipun demikian, patasiwa dan patalima bukanlah kelompok suku bangsa yang berbeda, perbedaan itu karena adanya keperluan kemiliteran dan politis yang berasal dari Tidore sebagai pusat kekuasaan.

Suatu organisasi rahasia yang mempunyai hubungan dengan patasiwa hitam dan patasiwa putih adalah organisasi atau perkumpulan yang disebut *kakehan*. Ciri-ciri anggota perkumpulan ini adalah rajah. Pada zaman dahulu mereka sering melakukan upacara-upacara pemenggalan *leper* atau kepala (Murniatmo, dkk, 2000: 192).

- c. **Pela**, organisasi atau perkumpulan yang amat penting terutama dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Ambon, Maluku. Perkumpulan *pela* merupakan persatuan atau persekutuan antara warga-warga dari dua desa atau lebih yang berdekatan letaknya. Hal ini berdasar atas adat yang dikenal oleh penduduk setempat. Setiap anggota organisasi *pela* mempunyai bermacam-macam kewajiban antara seorang anggota terhadap anggota lainnya, sebaliknya ia juga mengharapkan bantuan dari sesama anggota. Pada dasarnya organisasi *pela* dapat digolongkan atas dua golongan, yaitu *pela keras* atau *pela tulen* atau *pela minum darah* dan *pela tempat sirih*.

Pada zaman dahulu, anggota-anggota *pela keras* saling membantu dalam peperangan atau menahan serangan dari pihak lawan. Laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu *pela keras* dilarang mengadakan perkawinan. Adanya istilah *pela minum darah* karena menurut dongeng nenek moyang dari desa-desa yang sekarang bergabung itu, mereka melakukan sumpah atau janji dengan cara mencampurkan darah dari jari tangan yang menetes dalam sebuah gelas yang berisi tuak, kemudian gelas tadi dimasuki senjata mereka. Setelah itu tuak tadi mereka minum bersama.

Berbeda dengan *pela tempat sirih*, anggotanya wajib saling membantu dan bergotong-royong dalam hal membangun balai desa, gereja, masjid, tempat sekolah, dan sebagainya. Mereka wajib memberi sagu kepada anggota yang sedang membutuhkannya. Mereka juga wajib menerima seorang anggota *pela* untuk menginap di rumahnya. Berbeda dengan *pela keras*, para anggota *pela tempat sirih* tidak dilarang untuk melakukan perkawinan antara anggota satu *pela*. Pada umumnya anggota *pela* tidak dibatasi oleh agama, desa-desa orang Nasrani menjadi satu *pela* dengan desa-desa yang beragama Islam (Murniatmo, dkk, 2000: 197).

- d. **Seka**, organisasi atau perkumpulan-perkumpulan di Bali yang bergerak dalam lapangan khusus. Organisasi atau perkumpulan ini biasanya didirikan untuk waktu yang lama, bahkan meliputi angkatan-angkatan yang turun-temurun. Tetapi ada pula yang didirikan untuk sementara waktu saja. Seka sebagai perkumpulan dalam kehidupan masyarakat Bali, ada yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan upacara-upacara yang berkenaan dengan kepentingan desa, misalnya *seka baris* yaitu perkumpulan baris, *seka teruna* adalah perkumpulan para pemuda, dan *seka daha* merupakan perkumpulan yang terdiri dari gadis-gadis di Bali.

Seka ini bersifat permanen atau tetap untuk kepentingan orang dewasa, sedangkan *seka* yang mempunyai sifat sementara adalah *seka memula*, yaitu perkumpulan yang didirikan sehubungan dengan adanya

kegiatan pertanian, yaitu untuk keperluan khusus dalam hal menanam padi. *Seka gong*, yaitu perkumpulan gamelan dan sebagainya. Seka-seka seperti tersebut di atas biasanya terlepas dari organisasi desa atau banjar (Murniatmo, dkk, 2000: 224).

- e. **Subak**, suatu organisasi di Bali yang bertujuan mengurus soal pengairan. Subak berasal dari kata *seuwak* yang artinya sebagian atau sealiran. Organisasi subak merupakan perkumpulan petani untuk mendapatkan air dari satu sumber yang sama. Organisasi ini bertujuan mengatur air dengan sebaik-baiknya, bergotong-royong diantara para anggotanya dalam membuat dan memperbaiki bendungan di sungai, menggali saluran air, dan sebagainya.

Dalam pengertian yang lebih luas, subak merupakan suatu organisasi kesatuan hukum adat yang terdiri dari para petani dalam suatu wilayah tanah persawahan tertentu yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terutama di bidang pengairan dan pertanian serta mengadakan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Subak sebagai organisasi pengairan di Bali mempunyai prinsip-prinsip demokrasi asli yaitu musyawarah dan mufakat. Prinsip demokrasi sebagai dasar subak timbul karena pengaruh lingkungan alam daerah Bali yang sebagian besar terdiri dari tanah bergunung-gunung yang tidak rata dan curam. Keadaan seperti itu menyebabkan pengairan di sana sulit untuk dilaksanakan. Air yang pada umumnya bersumber di daerah gunung-gunung dialirkan menuju tanah-tanah persawahan melalui saluran air, dam-dam, dan pipa-pipa dari bambu, kemudian air ditampung dalam tanggul-tanggul sehingga memungkinkan sawah-sawah bisa dialiri air.

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan para petani, terutama para petani kecil ambil bagian dalam organisasi subak. Keanggotaan subak pada umumnya adalah mereka yang memiliki tanah sawah karena pada waktu itu pemilik tanah sawah langsung menggarap tanah persawahannya. Akan tetapi dengan adanya sewa-menyewa serta *sakap-menyakap* tanah maka secara formal yang menjadi anggota subak adalah pemilik tanah, sedangkan yang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan subak adalah penggarap tanah.

Sebaliknya, pembayaran iuran ditanggung oleh pemilik tanah. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi subak, anggota subak disebut *krama subak* yang terbagi atas: (i) kelompok anggota yang bekerja secara aktif dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasanya disebut *sekehyeh*. Mereka inilah yang sebenarnya melaksanakan

kegiatan subak, seperti melakukan pengawasan dan pengelolaan air; (ii) kelompok anggota yang disebut *pengambil*, sebagai anggota yang tidak aktif, artinya mereka dapat menggantikan tugas krama subak dengan uang; dan (iii) kelompok anggota yang disebut *leluput*. Kelompok ini dibebaskan dari segala kewajiban sebagai *sekehyeh* dan sebagai *pengambil*, mereka mempunyai tugas sebagai pengurus.

Setiap anggota subak mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang disebut *awig-awig*. Seorang anggota mempunyai hak, antara lain untuk minta bantuan subak apabila anggota itu memperbaiki atau membuat bendungan air guna mengairi sawah dan sebagainya. Sedangkan kewajiban seorang anggota subak, antara lain ia harus menjalankan keputusan-keputusan subak sebagai hasil rapat subak, ikut melancarkan pembagian air, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hak kewajiban seseorang sebagai anggota subak, seseorang bisa kehilangan haknya sebagai anggota subak apabila ia telah menjual tanah pertaniannya atau mewariskan tanahnya kepada anak-anak mereka. Subak dipimpin oleh seorang ketua subak yang disebut *klian* subak atau *pekaseh*. Pimpinan subak dibantu oleh para pembantu yang disebut *petacuh*, di antaranya *pangliman* yang tugasnya memimpin bagian-bagian tertentu dari seluruh areal sawah yang termasuk wilayah subak dan *juru arah* yang tugasnya menyampaikan keterangan kepada para anggota subak.

Klian subak dipilih berdasarkan hasil keputusan rapat anggota subak untuk jabatan 10 tahun; tetapi ada kalanya seorang dipilih sebagai *klian* subak untuk menggantikan saudaranya yang menjadi *klian* subak. Jabatan yang ada dalam *klian* subak adalah *sedahan carik* dan *sedahan abian*; sedangkan atasan yang lebih tinggi lagi adalah *sedahan agung* (Murniatmo, dkk, 2000: 237).

- f. **Mata gawe**, golongan kepala rumah tangga dan kepala rumpun keluarga yang bertanggung jawab atas segala penghasilan dan pekerjaan dusunnya di daerah Sumatra Selatan. Merekalah yang harus menanggung segala macam pajak untuk dipersembahkan kepada raja. Golongan mata gawe itu sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang penting.

Dari kalangan merekalah terdapat orang-orang kaya, yang memiliki rumah, kebun, ladang, dan tambak. Mereka adalah wakil rakyat atau masyarakat pada waktu pemilihan kepala marga atau dusun. Mereka sering juga dimintai pendapatnya mengenai persoalan dalam masyarakat. Pada zaman dulu rakyat di daerah pedesaan menganggap raja sebagai pemilik tanah. Rakyat hanya memakai tanah dan menikmati hasilnya atas perkenan raja.

Hak pemakaian tanah yang dilakukan oleh marga-marga itu ditetapkan atas dasar jumlah kesatuan tertentu (*mata*) oleh orang yang wajib dinas, disebut *mata gawe raja*, sedangkan orang yang wajib membayar pajak disebut *mata pajak*. Dalam melaksanakan tugasnya, mata gawe itu dibantu oleh golongan *alingan*, yang sering dimasukkan sebagai anggota keluarga mata gawe (Murniatmo, dkk, 2000: 126).

4. Kelembagaan dan organisasi sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan bersama, antara lain:
 - a. **Baileu**, bangunan suci atau keramat yang biasanya digunakan sebagai tempat atau pusat kegiatan keagamaan masyarakat Ambon, Maluku. Setiap orang yang akan masuk baileu terlebih dahulu harus melakukan upacara. Ukuran ini yang dimaksudkan untuk minta izin kepada roh atau arwah nenek moyang di baileu. Pemimpin upacara baileu adalah *mauweng*, sebagai perantara antara manusia dengan, roh nenek moyang. Setiap, orang yang akan masuk ke baileu harus mengenakan pakaian adat berwarna hitam dengan selendang merah yang diselempangkan pada bahunya. Dalam baileu terdapat *pamili*, yaitu batu yang dianggap keramat atau mengandung kekuatan gaib, seluas 2m². Batu ini digunakan sebagai latar tempat orang meletakkan korban dan sesaji untuk roh nenek moyang penunggu baileu (Murniatmo, dkk, 2000: 18).
 - b. **Banjur**, bangunan khusus tempat para pemuda berkumpul untuk mendapatkan pelajaran tentang adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, Sumatra Barat. Di tempat ini pula para pemuda Minangkabau mendapat pelajaran dan pekerjaan membuat kerajinan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Karena itu, para pemuda Minangkabau sering menggunakan banjur untuk berkumpul dan berbincang-bincang tentang segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan adat istiadat dan keduniawian. Mereka kadang-kadang juga tidur di banjur. Untuk menjaga ketertiban dalam banjur, ditunjuk seorang pengawas di antara para pemuda yang tertua (Murniatmo, dkk, 2000: 21).
 - c. **Belubur**, wadah untuk menimbun padi setelah dipanen, dikenal oleh masyarakat petani Jambi. Belubur terletak di bawah rumah. Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dinding-dinding belubur itu dibuat dari bahan kulit kayu atau dan bilahan-bilahan bambu yang ditata atau disusun. Agar padi yang disimpan tidak terkena tanah, lantai belubur diberi ranting-ranting pohon yang dirakit sedemikian rupa. Selain sebagai tempat menimbun padi, belubur juga digunakan untuk menyimpan jagung dan buah-buahan, khususnya hasil tanaman yang dipersiapkan untuk benih pada masa tanam (Murniatmo, dkk, 2000: 31).

- d. **Batang**, rumah untuk tempat tinggal orang-orang Dayak Ngaju dan Dayak Ot-Donam di Kalimantan Tengah. Rumah ini dibuat dari kulit kayu atau sirap (lempengan kayu) dan pada umumnya didirikan di atas tonggak-tonggak kira-kira setinggi $2\frac{1}{2}$ m. Untuk memasukinya harus melalui tangga yang dibuat dari belahan balok-balok yang diberi lekuk-lekuk tempat injakan kaki.

Bagian dalam rumah ini terdiri atas ruang-ruang kecil (bilik) sampai kurang lebih 50 bilik. Saat ini jenis rumah batang sudah jarang dipakai, tetapi masih dapat ditemui di daerah utara yaitu di daerah tempat tinggal suku-suku bangsa Dayak Ot-Siang dan Murung. Pada daerah Sungai Kahayan, ada daerah masyarakat Ot-Danum, yaitu Tumbang Kurik dan Tumbang Anoi. Saat ini bentuk rumah yang paling umum terdapat di Kalimantan Tengah adalah rumah berbentuk kecil yang didiami oleh satu sampai lima keluarga *batih*, yaitu satu keluarga *batih* senior ditambah dengan keluarga batih anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah kawin. Pada orang Dayak Ma'anyan, rumah itu disebut *lewu* (Murniatmo, dkk, 2000: 34).

- e. **Campiri**, bangunan tempat menyimpan padi di Sulawesi Tengah, disebut juga *Ala'*, yang didirikan secara permanen di samping atau di belakang rumah. Bahan yang digunakan dari kayu, papan, bambu, dan ijuk untuk atap, serta rotan untuk mengikat kerangka bangunan. Campiri berbentuk segi empat panjang dan dibangun di atas tiang setinggi 1 sampai 1,5 m. Lantai dibuat dari bambu atau papan. Untuk mengambil padi, dibuat satu pintu dan tangga (Murniatmo, dkk, 2000: 38).
- f. **Deyah**, disebut juga Dayah, bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan di Aceh. Pada mulanya, deyah dimanfaatkan untuk memberi pelajaran mengaji pada anak-anak. Namun dalam perkembangan selanjutnya, deyah difungsikan menjadi "pesantren", tempat anak-anak dan orang dewasa belajar agama Islam. Karena fungsinya ini, deyah dilengkapi dengan pondokan para santri yang mengikuti pelajaran agama Islam. Deyah hampir terdapat di setiap *gampong* atau perkampungan di Aceh (Murniatmo, dkk, 2000: 43).
- g. **Lumbung**, bangunan kecil di atas tiang yang digunakan untuk menyimpan padi hasil panen para petani di Jawa. Bangunan lumbung terletak di samping kanan atau kiri rumah tempat tinggal para petani. Bangunan ini hanya mempunyai satu pintu yang hanya cukup untuk masuk satu orang. Karena di atas tiang, disediakan pula tangga bila orang hendak mengambil padi. Padi yang disimpan dalam lumbung adalah sisa setelah dibagi kepada para *penderep*.

Bagi para petani Jawa, arti lumbung sangat penting, yaitu sebagai persediaan bahan pangan apabila terjadi paceklik. Karena itu, lumbung dilukiskan sebagai lambang kemakmuran petani. Semakin besar lumbung, semakin tinggi tingkat kemakmuran si pemilik lumbung itu. Ukuran pintu yang kecil dan tinggi mencerminkan penghematan. Pada waktu itu, diberlakukan ketentuan untuk tidak mengambil padi dari lumbung sebelum waktu yang telah ditentukan, biasanya 32 hari sesudah hari penyimpanan. Bahkan, ada kalanya hari pengambilannya ditentukan.

Biasanya yang berlaku adalah hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dari antara kelima hari pasaran ini diambil hari pasaran yang paling baik menurut perhitungan pemiliknya. Ada anggapan bahwa apabila mengambil padi dari lumbung di luar ketentuan, akan terjadi pemborosan yang merugikan pemilik lumbung itu. Namun, dengan dilaksanakannya sistem pertanian baru yang menuju pada peningkatan hasil produksi pangan, bangunan lumbung ini sulit bahkan jarang ditemukan. Hal ini karena hasil panen mereka biasanya langsung dibawa ke KUD (Murniatmo, dkk, 2000: 104).

- h. **Walai** atau balai, bangunan yang digunakan untuk menyimpan, khususnya menyimpan bahan makanan oleh masyarakat Lampung. Bahan makanan yang disimpan di walai atau balai terutama padi. Bangunan walai ini berbentuk persegi empat dan didirikan di atas panggung. Di perkampungan orang Lampung, bangunan walai terletak di luar kampung, sehingga merupakan perkampungan tersendiri yang disebut *Walai ranuk*, yang maksudnya tempat lumbung yang banyak. Berdasarkan fungsinya, walai ini dibagi atas dua bagian, yaitu *lepau walai* dan *lom walai*. *Lepau walai* digunakan untuk melepas butir padi dari tangkainya yang disebut *ngilik*. Sedangkan *lom walai* adalah tempat menyimpan padi yang disebut *hamejong* (Murniatmo, dkk, 2000: 262).
- i. **Tanah boitay may**, atau tanah agama di Aceh. Menurut pengertian orang Aceh, terutama yang tinggal di daerah kabupaten Aceh Besar, tanah boitay may berfungsi untuk keperluan manusia berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Status tanah ini merupakan harta orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tanah yang dulu dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Aceh dan tidak diketahui keluarga atau keturunannya yang menjadi ahli waris. Penanggungjawab yang mengurus tanah *boitay may* adalah para pejabat atau penguasa setempat, seperti *keuchiek* (kepala kampung), kepala mukim atau *ulee balang*. Mereka ini yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk memanfaatkan tanah guna kepentingan agama (Islam) menurut ketentuan hukum Islam; misalnya

pemanfaatan tanah tersebut untuk merawat atau membangun masjid, madrasah, dan sebagainya (Murniatmo, dkk, 2000: 240).

- Kelembagaan sosial juga berkaitan dengan alat perhitungan yang digunakan bersama yang digunakan untuk menandai masa atau peristiwa tertentu dalam siklus hidup masyarakat. Salah satu contoh adalah alat perhitungan yang disebut **Kolenjer**, yaitu alat perhitungan sebagai unsur pengetahuan yang berlaku dalam budaya orang Baduy, Jawa Barat. Alat ini dibuat dari bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa dengan ukuran tertentu. Pada alat ini dibuat lubang-lubang yang tidak sampai tembus, hanya merupakan titik-titik saja. Titik-titik tersebut dikelompokkan dalam kotak-kotak berukuran tertentu. Jumlah titik dalam kotak itu tidak sama, ada yang empat ada pula yang satu, sedangkan titik yang lainnya berada di luar kotak. Jumlah titik yang ada dalam tiap-tiap kotak mempunyai arti dan tafsiran tertentu. Pada kolenjer ini dituliskan pula urutan hari dan pasaran yang masing-masing mempunyai ketentuan nilai. Dalam kebudayaan orang Baduy tidak terdapat "angka", tetapi orang mengenal "bilangan". "Bilangan" ini diperoleh dari merangkaikan nama hari dengan nilai atau pasarnya (Lih. Tabel 3). Sebutan hari dan nilai yang dikenal orang Baduy dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Nama Hari dan Nilainya

Nama Hari	Nilai	Sebutan Hari dan Nilainya
Ahad	Lima	Hadma
Senen	Opat (empat)	Nenpat
Selasa	Tilu (tiga)	Salu
Rebo	Tujuh	Bojuh
Kamis	Delapan	Mispan
Jumaah	Genap (enam)	Manep
Sabtu	Salapan (sembilan)	Tupan

Tabel 3.

Nama Pasaran dan Nilainya

Nama Pasaran	Nilai	Sebutan Pasaran dan Nilainya
Pahing	Delapan	Papan
Pon	Opat (empat)	Ponpat
Wage	Tujuh	Wajuh
Kaliwon	Salapan (sembilan)	Wonpan
Manis	Lima	Nisma

Sumber: Tata kehidupan Masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat, 1984-1985

Kegunaan kolenjer bagi orang Baduy ini sebagai pedoman tindakan, atau perilaku berkenaan dengan usaha untuk memperoleh sesuatu yang baik, yang mengarah kepada keberhasilan. Dengan dicari hari yang baik bagi orang itu, orang akan mengetahui saat yang baik dan saat-saat yang tidak baik untuk melakukan sesuatu, seperti bepergian jauh, mendirikan rumah, menikahkan anak, dan sebagainya. Sehubungan dengan perhitungan ini, orang Baduy mengenal adanya sifat yang dianggap baik dan sifat yang tidak baik untuk melakukan sesuatu. Sifat-sifat yang dimaksudkan itu secara berurutan adalah: (i) *Sri*; (ii) *Lungguh*; (iii) *Gedong*; (iv) *Lara*; dan (v) *Pali*. Cara menentukannya adalah dengan menjumlahkan nilai hari kelahiran, ditambah nilai pasaran kelahiran, ditambah nilai rencana hari dan pasaran untuk melakukan sesuatu. Hasil penjumlahan ini dibagi 5. Sisa dari pembagian itu dicocokkan dengan urutan kelima sifat tadi (Murniatmo, dkk, 2000: 90).

BAB VI

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN TRADISI LOKAL

A. Pembangunan dan Pertumbuhan Perkotaan

Selama Orde Baru dipercaya bahwa secara teoretis pembangunan ekonomi yang pertumbuhannya tinggi akan terjadi '*trickle down effect*', yang diharapkan dapat mencapai lapisan rakyat kecil yang berada di perdesaan maupun perkotaan. Namun, apa yang diasumsikan itu tidak pernah terjadi, karena meskipun terjadi peningkatan PDB secara bertahap, tetapi '*intensive capital investmen policy*' telah memicu munculnya berbagai persoalan seperti meningkatnya pengangguran, kesenjangan sosial, kerawanan sosial, dan migrasi dari desa ke kota yang menciptakan permukiman kumuh di kota. Permasalahan utama pembangunan adalah soal transformasi (Korten, 1984). Kritik terhadap pembangunan hanya mungkin efektif jika disertai dengan upaya mengajukan konsep, ideologi atau strategi alternatif pembangunan, yaitu dari pembangunan yang kapitalistik, dominatif dan *top-down* menjadi kepedulian terhadap rakyat, egaliter dan *bottom-up* atau partisipatif.

Pembangunan ekonomi yang semata-mata berorientasi pertumbuhan perlu segera dikoreksi, dengan mensinergikannya melalui pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial bukanlah dua realitas dikotomis yang harus dipilih, melainkan dua hal yang harus dikerjakan secara berkesinambungan. Pembangunan sosial menurut pandangan Eliot, seperti dikutip Cox (2001: 21) pada dasarnya bersifat proaktif, menghindari terjadinya '*victim blaming*' dengan melakukan perencanaan preventif guna mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di komunitas, serta melakukan strategi intervensi (perubahan sosial terencana) yang bersifat multisistem. Jadi tujuan utama pembangunan bukan bagaimana mendatangkan pertumbuhan, tetapi bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi secara cepat dan menyeluruh.

Berkenaan dengan persoalan pembangunan di daerah, persoalan utama yang sering dihadapi adalah tingginya migrasi yang berakibat berkumpulnya tenaga kerja disuatu daerah tertentu, dan berkuangnya tenaga kerja di daerah lain. Persoalan migrasi penduduk yang utama adalah urbanisasi yang mengakibatkan tingginya jumlah penduduk di perkotaan yang mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk per-kilometer persegi. Jumlah rumah

yang tersedia akan menampung beban penduduk yang besar, sehingga terbentuklah kampung-kampung dengan kondisi yang buruk, sebagai suatu pemukiman liar (*squater's town*). Philip M. Hauser (1985) menyebutnya sebagai "*premature suburbanization*" atau proses pengembangan kota yang terlalu dini dan tidak mampu lagi dilayani oleh perkembangan sarana dan prasarana yang ada di kota-kota besar. Biasanya akan terbentuk kampung-kampung (Evers dan Korff, 2000: 63), yang merujuk pada apa yang dikatakan Krausse (1975) sebagai permukiman penduduk berpenghasilan rendah (miskin), dan merupakan area permukiman padat penduduk (Jelinek, 1991; Korff, 1996). Kebanyakan penduduk bekerja di *shadow economy*, terutama di sektor informal (Muray, 1991; Evers dan Korff, 2002: 228).

Seperti halnya perkembangan kota-kota lainnya didunia, perkembangan kota-kota di Indonesia pada awal pelaksanaan Repelita Pertama tahun 1969 masih ditandai masalah perkembangan penduduk perkotaan karena migrasi⁷ di beberapa kota besar. Berdasarkan data statistik, penduduk perkotaan meningkat sebesar 17,2 persen tahun 1971; meningkat 22,3 persen pada tahun 1980 dan mencapai sekitar 23,7 pada tahun 1983. Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa, dengan laju kenaikan sebesar 4,40 persen per tahun selama kurun 1990–2000. Jumlah itu kira-kira hampir 42 persen total jumlah penduduk. Mengikuti kecenderungan tersebut, diperkirakan bahwa jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2005 telah melampaui 100 juta jiwa, dan kini hampir setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Pada 2025 penduduk kota diseluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai 168 juta, dari total penduduk Indonesia 286 juta jiwa, yang berarti bahwa penduduk perkotaan akan meningkat dari sebelumnya 30 persen menjadi 60 persen.

⁷ Migrasi merupakan salah satu komponen perubahan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Perdefinisi, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat/wilayah ke tempat lain yang melampaui batas administratif suatu wilayah. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan. Faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai pendorong perpindahan penduduk adalah kurangnya sumber daya alam yang tersedia di daerah asal, sempitnya lapangan pekerjaan, terjadi bencana alam dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi faktor penarik di daerah tujuan adalah pembangunan yang pesat di segala bidang, tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mapan, dan lainnya. Kehidupan yang serba gemerlap di suatu daerah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lainnya, sehingga mereka tertarik untuk turut serta menikmati gemerlapnya kehidupan tersebut.

Faktor utama yang menyebabkan perkembangan kota di Indonesia umumnya perkembangan kegiatan usaha serta perubahan kehidupan penduduk merupakan ciri menonjol dari perkembangan kota. Berkurangnya lahan pertanian di Jawa dan pesatnya perkembangan kegiatan usaha di perkotaan menjadi motivasi para migran untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka ini kebanyakan bekerja di sektor informal, yang dicirikan oleh tenaga kerja yang berkeahlian rendah. Penduduk yang bekerja di sektor informal tidak terdaftar, sehingga sulit untuk ditentukan berapa angka yang pasti. Persoalan pekerja sektor informal ini sesungguhnya telah menarik perhatian Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Komitmennya terlihat dari anjuran Presiden untuk menyediakan dana sebesar 20 persen pinjaman Bank bagi industri kecil, dan ungkapan penghargaan presiden terhadap para pemulung sebagai laskar mandiri.⁸

Pembangunan yang berorientasi pada "pertumbuhan" tampaknya telah gagal menyelamatkan "harkat dan martabat" manusia yang paling mendasar. Kesenjangan sosial-ekonomi, konflik antargolongan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan hidup menjadi ciri kehidupan kota. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru, seperti "*People Centered Development*", David Corten dan kemudian diadopsi oleh UNDP; strategi "Jalan Ketiga" (Anthony Giddens), "*Development as Freedom*" (Amartya Sen) dan sebagainya, yang kesemuanya mencari suatu "keseimbangan baru" antara kemakmuran fisik dan "kesejahteraan" hakiki yang menghasilkan "*human development*". Dengan demikian, rumusan pembangunan seyogianya ditujukan untuk: "mengembangkan nilai, norma serta tatanan pranata sosial yang mampu menciptakan sikap dan pola perilaku warga masyarakat yang bercirikan kerukunan, kepedulian, dan kemandirian serta kemajuan, sehingga tercapai kesejahteraan bersama." Orientasi ini pembangunan ini mendasarkan pada nilai yang mempengaruhi upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama, yaitu kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan kemajuan. Artinya, tidak mungkin kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai, bila keempat nilai tersebut tidak menunjukkan kondisi yang mendukung. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan satu faktor paling penting, yakni kepercayaan (*trust*).

⁸ Namun terkadang pemerintah kota selalu mempunyai prioritas dan kepentingannya sendiri, yang justru mengusir pekerja sektor informal seperti tukang becak dan pedagang asongan, bahkan sering juga kebijakan ini mendapat perlawanan dari masyarakat pinggir. Padahal, diakui atau tidak, sejumlah besar penduduk kota tergantung pada sektor informal ini, tidak hanya karena kapasitas penyerapan tenaga kerjanya yang sangat tinggi melainkan juga karena sumbangan jasanya terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Bahkan masyarakat diwilayah perdesaan cenderung agak bergantung pada sektor informal perkotaan ini, melalui pengiriman uang ke desa.

Masyarakat Indonesia pada umumnya terbagi kedalam lima strata, yaitu lapisan elit, lapisan menengah, lapisan peralihan, lapisan bawah, dan lapisan terendah. Masyarakat lapisan bawah adalah mereka yang secara sosial-ekonomis belum mapan yang tinggal di kampung-kampung miskin atau kumuh bahkan hunian liar. Hampir semua penduduk yang termasuk golongan ini bergerak di sektor informal dengan mobilitas spasial yang tinggi dan status kependudukan yang tidak permanen menyebabkan kelompok ini selalu menjadi korban penertiban, penggusuran, serta razia. Posisi sosial yang marjinal tersebut menyebabkan golongan ini bersifat pasif dan kurang "receptive" terhadap aturan-aturan yang ada di kota serta program-program pembangunannya. Golongan ini memiliki sikap menolong dirinya sendiri (*natural helping system*) yang mereka kembangkan ternyata telah menciptakan strategi hidup yang ulet dalam mempertahankan kehidupan mereka di perkotaan. Buruknya kondisi golongan ini memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah, karena mereka ini merupakan manifestasi yang konkrit dari masalah sosial ekonomi masyarakat

Literatur-literatur yang menyoroti masalah kemiskinan perkotaan, terutama penduduk pemukiman kumuh, seperti kajian yang dilakukan oleh Gilbert, A. dan Gugler, J., (1982), *Cities, Poverty, and Development: Urbanization in the Third World*, Roberts, B. R. (1991), *Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanization in the Third World*, mencirikan keluarga penduduk pemukiman kumuh dengan struktur keluarga yang longgar, ikatan-ikatan kekerabatan yang lemah, ketiadaan nilai-nilai yang jernih, pendapatan yang rendah dan tidak terjamin, kekurangan perumahan, fasilitas yang buruk, barang-barang milik yang rendah kualitasnya, dan rendahnya partisipasi politik, demikian pula dengan daerah bantaran sungai umumnya, yang kumuh, padat, sanitasi buruk, dengan kebanyakan penduduk migran.

Hampir tidak ada kota di dunia ketiga yang tidak mempunyai daerah-daerah pemukiman liar, daerah kumuh atau perumahan miskin yang luas. Berbeda dengan kehidupan kota besar yang tumbuh berdasarkan perencanaan kota yang dikerjakan oleh para ahli, kehidupan daerah kumuh hanya berdasarkan pada perencanaan dan tindakan strategis para penghuni daerah itu sendiri. Daerah kumuh sering didefinisikan sebagai daerah pemukiman para pekerja daripada sebagai "komunitas" atau tempat orang-orang yang putus asa (Evers dan Korff, 2002: 249) dan terintegrasi dalam ekonomi kota. Orang-orang membangun sendiri rumah tempat tinggalnya dan menciptakan habitat yang memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan perkotaan yang sulit.

Dalam diskusi tentang kawasan kumuh dan kawasan hunian liar, tidak ada kejelasan pengertian tentang istilah itu. Evers dan Korff, misalnya menyamakan

hunian liar dengan kampung. Istilah kampung setidaknya memperlihatkan sesuatu yang berkaitan dengan “desa” dan komunitas-komunitas, meskipun istilah ini tidak dapat didefinisikan sebagai ‘*corporate community*,’ karena ikatan sosial yang ada hanya antartetangga saja (Evers dan Korff, 2002: 408). Evers dan Korff mencatat, bahwa aspek komunitasnya telah ditunjukkan dengan baik oleh Sullivan (1992: 71), bahwa kampung berkenaan dengan “kebertetanggaan”, sehingga ada tekanan kuat agar menjadi tetangga yang baik. Menjadi tetangga yang baik telah ditetapkan, termasuk sanksi-sanksi berat yang berfungsi untuk membuat anggota komunitas berperilaku sejalan dengan konvensi-konvensi yang berlaku.

Kata “kampung” mempunyai penafsiranganda dan agak sulit untuk dipisahkan agar tidak disalahmengertikan. Disatu pihak “kampung” memiliki makna seperti yang dijelaskan oleh Evers dan Korff sebagai hunian liar, atau dalam pengertian Muray (1991: 61) yang menyatakan bahwa kampung bukanlah suatu entitas yang mampu merencanakan strategi, tetapi suatu komunitas dari orang-perorang yang menyesuaikan diri mereka dengan situasi perkotaan dan kian hari kian banyak orang yang datang untuk bekerja sama dan bersaing. Ini sama pengertiannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah). Dipihak lain, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kampung berarti desa atau dusun, kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.

Namun tetap saja ada penilaian, bahwa para penghuni kawasan kumuh tidak lebih dari hanya sekelompok rumah-rumah sepanjang beberapa jalan atau gang tertentu (Jelinek, 1991: 26, Evers dan Korff, 2002: 409). Ikatan tempat tinggal tampaknya lebih penting dari sekadar ikatan keluarga (Jelinek, 1991: 35). Keregangan hubungan antartetangga hanya dimungkinkan jika dilakukan pembedaan antara penduduk yang menetap menempati rumahnya sendiri, dengan penduduk sementara yang datang mengontrak rumah di kawasan itu. Pendatang baru, kerap menganggap tempat tinggalnya bersifat sementara, karena itu mereka kurang berintegrasi ke dalam jaringan sosial setempat.

Hubungan sosial yaang lebih terbatas, namun memiliki jaringan sosial yang cukup luas terjadi di dalam keluarga pondok. Pondok adalah tempat tinggal komunal yang anggota-anggotanya tidak tetap, dan merupakan sarana bagi orang-orang desa yang membutuhkan tempat tinggal, pada saat mereka mencari nafkah. Hunian bersama ini, biasanya didasarkan pada ikatan-ikatan asal-usul desa yang sama, dan karakteristik pekerjaan yang sama pula. Pondok ini biasanya dihuni oleh orang-orang yang berasal dari kampung yang berdekatan di desa asal. Orang-orang yang tinggal di pondok adalah orang-

orang yang bekerja mencari nafkah di sektor informal yang berasal dari keluarga yang berbeda, tidak hanya tinggal, tidur, dan makan bersama, tetapi mereka memiliki pekerjaan serupa. Mereka satu sama lain saling memberi saran mengenai rute perdagangan yang baik, harga-harga yang sedang berlaku dan bagaimana menghindari razia. Mereka saling meminjamkan uang dan jika mereka kembali ke desa biasanya membawa uang, barang-barang dan pesan-pesan untuk keluarga di desa dari mereka yang tetap tinggal di desa.

Tingkat mobilitas warga pondok sering kali tergantung pada seberapa lama mereka tinggal dan seberapa banyak mereka memperoleh penghasilan. Mereka harus bekerja keras, agar dapat segera kembali ke desa untuk memberikan uang dan menengok keluarga mereka. Di dalam keluarga pondok ini, identitas etnis tidak penting. Kalaupun ada solidaritas atau rasa kepentingan bersama, maka hal itu didasarkan atas kesamaan kampung atau daerah asal, bukan atas kesamaan suku. Ada perasaan dikalangan pendatang, bahwa mereka mempunyai kewajiban moral untuk saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, tolong menolong yang kuat, terlihat dengan jelas di dalam keluarga pondok yang kebanyakan diantara mereka adalah imigran musiman. Migran musiman menunjuk pada kepergian para petani ke luar desa mereka untuk mencari pekerjaan, pada masa senggang menunggu hasil panen, atau pada masa paceklik. Kaum bebara akan mengerjakan pekerjaan apa saja untuk memperoleh rezeki, dan bersifat sementara, dalam arti bahwa mereka senantiasa kembali kedesaanya.

Kerja keras mereka itu merupakan suatu indikator, bahwa mereka ingin merubah kehidupan mereka agar menjadi lebih baik, tidak pasrah begitu saja menerima nasib. Sebagai migran, mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka yang terbatas dan usaha untuk mengerahkan tenaga, kekuatan serta memanfaatkan segala sumber-sumber yang tersedia di masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Namun, kerja keras para penghuni pondok di kota dan rasa kebersamaan mereka menghalangi mereka berbaur secara sosial dengan para anggota lingkungan yang lain. Banyak para pedagang yang mulai berdagang selepas magrib sampai menjelang fajar, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi. Keadaan ini, setidaknya akan menimbulkan rasa ketidaksenangan yang tersembunyi dengan tetangga disekitarnya. Ketidaksenangan ini dapat saja menimbulkan rasa permusuhan, curiga, dendam, kebencian antarsuku, agama, ras dan golongan. Perasaan ini dalam kehidupan sehari-hari tidak diperlihatkan, tetapi sangat mudah dipicu oleh hal-hal kecil.

B. Pemberdayaan Masyarakat: Pengalaman Daerah

1. Kemiskinan di Perkotaan

Kemiskinan adalah masalah yang kronis, kompleks dan multidimensional. Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pemahaman sebab akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi nilai, dan politik. Mengingat kemiskinan selalu berada dalam konteks sosial maka interdependensi antarindividu atau antargolongan masyarakat merupakan karakteristik inheren. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kemiskinan bukan hanya akan menyangkut masalah peningkatan produktivitas, tetapi lebih penting lagi menyangkut permasalahan perubahan dalam *entitlement*, baik terhadap sumber daya dalam arti fisik ataupun dalam arti kesempatan memperoleh bagian dari aliran manfaat.

Dalam kurun waktu 68 tahun usia kemerdekaan Indonesia, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah dilakukan. Sejak awal kemerdekaan, di bidang pendidikan pemerintah telah meluncurkan pemberantasan buta huruf yang tidak terbatas di sekolah formal saja, tetapi juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan "dikejar" agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Demikian pula di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa, kemudian juga diperkenalkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa.

Kebijakan lain yang telah dilakukan dalam upaya menyejahterakan penduduk miskin adalah program transmigrasi, dari daerah padat diberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Demikian pula dengan program peningkatan ekonomi, melalui *Small Enterprise Development Project* (SEDP I-III) dari Bank Dunia diberikan kredit likuiditas Bank Indonesia berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada tahun 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit komersial. Fasilitas lainnya lagi adalah Kredit Usaha Tani (KUT) yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Pada masa orde baru, cukup banyak program yang berpihak pada kelompok miskin selain program yang telah disebutkan sebelumnya, seperti

seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah. Sehingga, pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar efek pemberdayaan yang telah ditimbulkan oleh berbagai program tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang menjadi sasarannya?

Hasilnya, secara kuantitatif memang menunjukkan sangat menggembirakan, yaitu ketika dimulainya pembangunan lima tahunan (PELITA) pada akhir 1960-an, kurang lebih 60 persen penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, dan kemudian pada 1996-an menjadi sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 1997). Tetapi, ketika krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 angka kemiskinan kembali meningkat mencapai 40 persen dari total penduduk Indonesia. Kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin lebar meskipun penurunan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah dalam 10 tahun ini, yaitu 15,4 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini atau tingkat ketimpangan pembagian pendapatan pada 2007 mencapai 0,37 dari 0,33 pada tahun sebelumnya. Bank Dunia memiliki kriteria pengukuran ketimpangan dalam porsi pendapatan nasional, dengan membagi penduduk menjadi tiga lapisan, yaitu 40 persen penduduk berpenghasilan terendah, 40 persen penduduk berpenghasilan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Berdasarkan kriteria itu, laporan BPS menyebutkan bahwa 40 persen penduduk berpenghasilan terendah pada 2002 menyumbang pendapatan nasional hingga 20,92 persen dan pada 2007 turun menjadi 19,1 persen.

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat

miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin

Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar; kerentanan masyarakat menghadapi persaingan, konflik dan tindak kekerasan; lemahnya penanganan masalah kependudukan; ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender; dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda antarwilayah perdesaan, perkotaan, serta permasalahan khusus di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal.

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar secara umum berkaitan dengan kegagalan kepemilikan aset terutama tanah dan modal; terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat; lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial; serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Diagnosis kemiskinan juga menunjukkan faktor utama penyebab kemiskinan yang bersifat struktural, yaitu pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang kurang mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

2. Bangkit dari Bencana Alam: Pengalaman Yogyakarta

Tahun 2005 Yogyakarta mencatat keberhasilan di bidang kependudukan dalam hal pencapaian angka harapan hidup yang tertinggi di Indonesia, yaitu 73,0 tahun. Angka harapan hidup DIY lebih tinggi dibanding rerata Indonesia yang nilainya 70,7 tahun. Di antara kabupaten dan kota, Kabupaten Sleman merupakan konsentrasi lansia di DIY. Usia harapan hidup warga Sleman

menapai 74 tahun. Usia harapan hidup yang panjang merupakan representasi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi yang menjamin kesejahteraan rumah tangga dan ketercukupan kebutuhan dasarnya, pelayanan kesehatan yang efektif dalam mengatasi penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan yang baik, dan sosio-kultural masyarakat yang menjamin hidup lebih tenteram. Negara-negara maju umumnya mempunyai usia harapan hidup yang tinggi, sehingga dinyatakan bahwa semakin berkembang dan maju suatu masyarakat semakin tinggi usia harapan hidupnya. Seiring dengan perbaikan dan pengembangan kualitas pembangunan di berbagai sektor, usia harapan hidup di DIY akan semakin meningkat, dan karenanya memerlukan pendekatan pembangunan dengan memberikan perhatian dan pelayanan yang sesuai bagi penduduk usia tua.

Yogyakarta pernah tertimpa bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 yang membawa dampak kerusakan yang sangat besar, terutama bagi pemukiman dan perumahan penduduk. Hasil penilaian cepat yang dilakukan oleh Bappenas, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 388.758 unit, termasuk 187.474 unit diantaranya roboh. Dari jumlah ini nilai kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai Rp29,1 triliun atau sekitar US\$3,1 miliar. Akibat kerusakan rumah ini, ratusan ribu penduduk di Propinsi DIY hidup di tenda pengungsian maupun yang mereka buat sendiri. Berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun lembaga donor berupaya memberikan kontribusi masing-masing untuk terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pendudukan korban gempa. Salah satu inisiasi dan kontribusi itu dilakukan oleh P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang telah ada di Yogyakarta sejak tahun 1999 melalui program P2KP peduli. Program penanggulangan kemiskinan inidiwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu unit pengelolaan lingkungan (UPL), unit pengelolaan keuangan (UPK) dan unit pengelolaan sosial (UPS). Salah satu keunggulan P2KP adalah program ini dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai agen utama. Dalam bahasa yang lebih populer adalah *community based program*. Maka dari itu dalam P2KP peran birokrasi dan fasilitator diminimalisir. Sebaliknya peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai representasi kelembagaan masyarakat di tingkat lokal diberdayakan sebaik mungkin.

Bentuk-bentuk aktifitas yang dilakukan oleh P2KP sangat beragam tergantung dari masing-masing unit. Namun dari berbagai program itu yang paling menonjol adalah dana bergulir bagi kelompok usaha miskin. Sistem yang dibangun dalam dana bergulir ini adalah *tanggung renteng*. Dengan demikian setiap individu dalam kelompok punya tanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman itu yang selanjutnya akan digulirkan untuk

kelompok usaha miskin lainnya. Modal awal dana bergulir yang dialokasikan oleh pemerintah melalui P2KP ini sangat bervariasi disesuaikan dengan kondisi demografis dan sosial ekonomi. Di kabupaten Bantul kisaran dana awalnya mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta.

Kelompok yang mengalami dampak terberat akibat bencana gempa bumi salah satunya adalah kelompok miskin yang selama ini menjadi sasaran P2KP. Mereka bukan hanya kehilangan saudara dan tetangga, namun juga mengalami kelumpuhan akses sumber daya ekonomi karena sumber daya dan kapital yang mereka miliki ikut hancur. Salah satu prasyarat terpenting untuk membangun ekonomi masyarakat miskin korban gempa memulihkan pemukiman. Masih banyak warga Yogyakarta hidup kekurangan secara ekonomi, baik yang tinggal di desa-desa maupun lorong kota. Pemerintah Kota Yogyakarta mendefinisikan keluarga miskin dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39/2005 memaknai keluarga miskin sebagai, "...orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan."⁹ Dari kerangka pikir ini, maka digulirkanlah berbagai skema program penanggulangan kemiskinan. Baik di pusat ataupun di kota, secara umum pemerintah memberikan dua bentuk bantuan yaitu yang bersifat penyelamatan dan yang bersifat pengembangan.

Program yang bersifat penyelamatan, misalnya Raskin atau Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Raskin diorientasikan sebagai bantuan kesejahteraan sosial atau bantuan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Raskin juga ditujukan untuk menjaga daya tahan pangan gakin agar tetap

⁹ Sesungguhnya, kemiskinan tidak lagi selalu didefinisikan sebagai orang yang serba tidak memiliki, tetapi sebagai orang yang memiliki potensi yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Potensi tersebut dapat berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalanannya secara lokal. Pendekatan ini sedikitnya mempunyai empat hal, yaitu Pertama, kemiskinan tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, tetapi dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income*) dalam menentukan kondisi sekaligus dinamika kemiskinan; dan keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

mampu membeli beras. Programnya berupa penjualan beras murah sebanyak 20 kg/bulan dengan harga Rp1.000/kg. Untuk DIY, melalui SK Gubernur No. 33/2003, Sultan menetapkan 10 kg/keluarga. Contoh bantuan langsung lainnya adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai). BLT merupakan kompensasi pemerintah kepada masyarakat miskin atas dicabutnya subsidi BBM. Dengan BLT, diharapkan keluarga miskin tetap bisa mempertahankan daya belinya. Dan masih banyak lagi skema bantuan dari pusat yang sifatnya langsung.

Sedangkan bantuan yang sifatnya pengembangan, umumnya berbentuk pembentukan dan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi masyarakat baik yang berskala kecil maupun mikro. Garis besarnya, pemerintah menyuntikkan modal dan memberi pendampingan. Suatu program biasanya mencakup pula pelatihan keterampilan, kewirausahaan, manajemen, yang disertai pula dengan pendampingan. Asal sumber dananya yang dari APBN maupun hutang dari lembaga donor seperti Bank Dunia.

Sebagian besar masyarakat miskin di kota Yogyakarta bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, tukang becak, pemulung, sampai pengamen. Peta persebaran warga kota yang berprofesi pekerja sektor informal di sejumlah kampung di kota, adalah bahwa para pemulung kebanyakan bermukim di daerah Timoho. Untuk pengamen, sebagian besar menghuni kampung-kampung di pinggiran Sungai Gajah Wong. Jika menengok ke sejarah asal mula dan pertumbuhan kampung di Kota Yogyakarta, banyak kampung seperti Timoho dan pinggiran Sungai Gajah Wong muncul seiring dengan gelombang awal urbanisasi, setidaknya sejak dekade 1970-an sampai 1980-an.

Beberapa program yang kini dijalankan antara lain: Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK); Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari BUMN; Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (DBUKID); Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Anggrek dan Pemanfaatan Pekarangan (BUEPKAID); Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (P2USEP); Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); Tenaga Kerja Mandiri (TKM); Program GRAMEN BANK; Program Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan; Program Kompensasi Subsidi Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM); Beasiswa Supersemar; Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan; serta Pinjaman Tenda bagi Pedagang Kaki Lima. Meski terfokus pada program yang sifatnya memberdayakan ekonomi, pemerintah kota tetap menjalankan program-program yang sifatnya "penyelamatan," seperti bantuan beasiswa sekolah, subsidi pelayanan kesehatan, atau yang paling nyata berupa santunan dan perlindungan terhadap warga kota yang terlanter seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta manula.

Pogram penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, bahkan masyarakat Yogyakarta demikian cepat pulih dari bencana gempa bumi dan bencana erupsi Merapi. Keberhasilan ini antara lain disebabkan oleh konsistensi masyarakat Yogyakarta dalam melaksanakan nilai-nilai tradisionalnya. Di Yogyakarta, peran keraton dalam ranah sosial dan budaya adalah sentral, karena keraton adalah salah satu lokus pendidikan budaya dimana nilai dan budaya mengalir ke bawah paling deras (Kuntowijoyo, 2006). Selain itu, peran keraton dalam pelaksanaan adat dan tradisi sangat penting karena pelaksanaan adat dan tradisi termasuk dalam pemeliharaan kekuasaan keraton itu sendiri. Pada tahun 1996, Sri Sultan Hemengkubuwono X dengan jelas mengatakan, bahwa dirinya dan Keraton Yogyakarta adalah simbol dan penjaga budaya Jawa. Beliau mengatakan bahwa dengan pengakuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap negara Republik Indonesia, tugas dari Keraton harus dibatasi kepada kegiatan budaya dan pelaksanaan ritual (Woodward, 2010).

Diakui atau tidak, kraton memiliki otoritas politik terutama dalam pengaturan masyarakat, yaitukemampuan untuk membuat perintah agar masyarakat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Otoritas politik merupakan sebuah otoritas yang memberikan alasan untuk tindakan, bukan alasan untuk berpikir, sehingga otoritas politik disebut otoritas praktis (Cristiano, 2004). Otoritas dalam kebudayaan Jawa berbeda dengan otoritas dalam budaya Barat, yaitu pada sifat dasar otoritas, sumber otoritas, sifat otoritas, dan legitimasi dari otoritas (Anderson, 2006). Otoritas dalam kebudayaan Jawa bersumber dari wahyu Ilahi yang diberikan kepada orang-orang terpilih sehingga legitimasi dari otoritas tidak berasal dari rakyat yang dipimpin tetapi dari ranah supernatural. Dengan konsep otoritas seperti ini, otoritas seorang raja berakhir ketika wahyu Ilahi tersebut berpindah ke orang lain. Perpindahan wahyu ini bisa dilihat oleh rakyat jelata dari penurunan kepemimpinan atau kekalahan raja dalam peperangan.

Kekuasaan raja adalah kekuasaan absolut karena kekuasaan raja adalah tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui pemberian wahyu. Otoritas politik keraton dalam masyarakat Jawa tradisional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat karena keraton adalah pusat dari kehidupan. Keraton adalah asal dari kehidupan itu sendiri sehingga pengaturan kehidupan diberikan seluruhnya kepada keraton. Aspek ini terlihat dari gelar penuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu *Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX*. Arti gelar yang panjang ini adalah dia adalah penguasa yang sah di dunia ini; dia juga *Senopati Ing Ngalogo*, yang berarti bahwa dia adalah panglima tertinggi, penentu perdamaian dan

peperangan. Sultan juga disebut *Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo* yang berarti penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai *Kalifatullah*, pengganti Muhammad SAW (Soemardjan, 1962). Otoritas Sultan dalam masyarakat tradisional Yogyakarta terlegitimisasi oleh budaya dan kultur masyarakat. Bagi masyarakat tradisional Yogyakarta, tiap kata Sultan adalah hukum karena Sultan bukan sekadar seseorang yang kebetulan memegang kekuasaan tetapi seseorang yang didukung oleh segenap kekuatan magis pusaka-pusaka kerajaan.

Dalam kaitan ini, kraton tampil sebagai suber kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa. Nilai-nilai kearifan lokal ini ada yang bisa dikembangkan menjadi *social enterprise*. Di dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan *tepa selira* (toleransi). Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Jawa, sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka. Tak mengherankan, nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan tak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Saat ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah merumuskan nilai-nilai tradisionalnya dalam sebuah Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda), yaitu Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Salah satu tujuan ditetapkannya Perda ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Yogyakarta, meski disadari bahwa perumusan suatu tata nilai budaya tidak akan pernah dapat dengan lengkap dan sempurna menggambarkan tata nilai budaya Yogyakarta. Rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini perlu dipandang sebagai upaya perumusan yang secara periodik harus senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), ilham (inspirasi), dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta selaras dengan tuntutan zaman dan dalam semangat *hamemayu hayuning bawana*.

Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9) nilai kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar

budaya, (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Tata Nilai dan Semangat Keyogyakartaan merupakan nilai khas sebagai penciri khusus seluruh elemen masyarakat Yogyakarta dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dalam meraih cita-cita mulia, yang mencakup menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*). Dalam mengaktualisasikan nilai ini, masyarakat Yogyakarta berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan. Hal ini dilakukan dengan semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), percaya diri dalam bertindak (*sengguh*), tidak akan mundur setapak pun dan siap menanggung segala risiko apa pun yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab¹⁰ demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

Masyarakat Yogyakarta menyadari sepenuhnya, bahwa dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan.¹¹ Tuhan diyakini sebagai asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu,¹² yang dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makrokosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikrokosmos*),¹³ dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara,¹⁴ bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air,¹⁵ sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal pun pula tiada berakhir (Lampiran Perda No 4/2011: 10).

¹⁰ *Lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani*

¹¹ *Mulih mula mulanira*

¹² *Sangkan paraning dumadi*

¹³ Manusia sebagai mikrokosmos yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa, wajib menjaga harmoni alam semesta ini dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit, atau hawa nafsu egoisme, melainkan harus dengan rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*) bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*).

¹⁴ *Owah gingsiring kanyatan, mobah mosiking kahanan*

¹⁵ *Urip iku bebasan mung mampir ngombé*

Dalam pandangan masyarakat Jawa, Tuhan adalah penentu segalanya, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkannya memiliki keterbatasan, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Setiap orang harus ikhlas (*lila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya. Meskipun manusia itu sekadar menjalani hidup ini¹⁶ sebagaimana digariskan oleh Tuhan, namun itu tidak berarti, bahwa orang Jawa menganut pandangan hidup fatalistik. Pandangan tersebut menunjukkan kerendahhatian orang Jawa, yaitu agar manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja, harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya, jangan mendikte kehendak Tuhan, dan pandai-pandailah bersyukur.¹⁷

Nilai budaya Jawa yang menunjukkan bahwa orang Jawa tidak fatalistik¹⁸ adalah adanya anjuran untuk tetap berusaha meningkatkan taraf, harkat dan martabat kehidupannya dengan meningkatkan kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar kehidupannya menjadi lebih benar, lebih baik, lebih indah, dan lebih bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang yang sejahtera, berbahagia, dan berpengaruh secara luas karena memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Meskipun mencari harta dan kedudukan lahiriah memang dianjurkan, namun dimensi batiniah tetap lebih diutamakan.

Sikap toleransi orang Jawa ditunjukkan dengan ajaran *ngundhuh wohing pakarti*, yaitu bahwa manusia harus berhati-hati dalam bertindak, jangan sampai melukai dan atau merugikan pihak lain, karena setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya. Dengan demikian, watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perangai buruk seperti angkuh, bengis, jahil, serakah, panjang tangan, gila pujian,¹⁹ jangan menyombongkan kepandaian, harta, paras elok, dan busana,²⁰ jangan pula menyombongkan diri dengan keberanian, suka menantang untuk bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki, dan suka mencela orang lain,²¹ dalam hidup hendaklah orang jangan menyombongkan diri dengan berlebih-lebihan membanggakan kekuatan baik fisik, harta, maupun kekuasaannya, keagungan

¹⁶ *Manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamané*

¹⁷ *Rumangsa bisa, bisa rumangsa, aja nggégé mangsa dan narima ing pandum*

¹⁸ Dalam ungkapan aslinya bahwa manusia harus meningkatkan harkat dan martabatnya, namun tetap mengutamakan spiritualitas, *mbudidaya; wirya, arta, winasis; mukti wibawa mbaudhendha; dansugih tanpa bandha*

¹⁹ *aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman.*

²⁰ *aja sira ngegungaken akal, bagus iku dudu mas picis, lawan dudu sandhangan.*

²¹ *aja watak sira sugih wani, aja sok ngajak tukaran, aja anguthuh, aja ewanan lan aja jail, poma sira aja drengki, dahwen marang ing sasama)*

keturunan atau kebesaran derajat sosialnya, dan kepandaianya.²² Semua watak buruk ini harus dihindari, di jauhi, dan ditinggalkan. Orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan.²³ Orang yang baik selalu berusaha menyenangkan hati orang lain, seperti mengemukakan pendirian secara lembut, berhati-hati dalam berbicara, tingkah dan tutur katanya bersahaja setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu karena dilandasi nurani yang bersih, bertenggang rasa dan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup.²⁴

Semua nilai moral pribadi itu merupakan modal dalam kehidupan *bebrayan agung*, atau kehidupan bermasyarakat yang dipahami sebagai suatu keluarga yang besar, yang dilandasi oleh sikap kasih sayang, yaitu *sih kinasihan*, *asih ing sesami* di antara para anggotanya untuk mewujudkan dan menjaga kerukunan. Bagi masyarakat Jawa kerukunan merupakan tiang utama kehidupan kemasyarakatan, karena kerukunan memberikan kekuatan, sedangkan pertikaian mendatangkan kehancuran.²⁵ Disamping itu, dalam hidup bersama dianjurkan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman agar semakin cerdas mengelola kehidupan, saling mengasihi agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Artinya, keselamatan dan kesejahteraan manusia itu dapat terwujud jika nilai kemanusiaan senantiasa terjaga.²⁶ Untuk menjaga kohesi dan harmoni kehidupan sosial, hubungan antaranggota masyarakat dilandasi oleh prinsip hormat.²⁷

Satu hal yang dinilai sangat penting dalam interaksi sosial dalam kehidupan bersama dalam masyarakat adalah adanya solidaritas atau kesetiakawanan sosial antaranggota masyarakat, baik dalam keadaan senang

²² *aja adigang, adigung, adiguna*

²³ *nandur kabecikan, ndhedher kautaman.*

²⁴ *amemangun karyénak tyasing sesama: pambegané alus; landhep tanpa natoni; tingkah una-uniné prasaja; yèn angucap ngarah-arrah;saujaré manis trus ati;kèh tepané mring sagunging urip.*

²⁵ *Rukun agawé santosa, crah agawé bubrah (ana rembug ya dirembug).* Prinsip ini menyiratkan, bahwa setiap persoalan di antara anggota masyarakat, harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan, karenamasyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga besar.

²⁶ *Rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané*

²⁷ Penghormatan ini pertama-tama diberikan kepada kedua orang tua (*ing kang dingin rama ibu*), mertua lelaki dan perempuan (*kaping kalih maratuwa lanang wadon*), saudara tua (*kaping katri marang sadulur tuwa*), guru (*kaping paté mring guru sayekti*), kepada pemimpin atau atasan (*kaping lima marang gustinira*). Secara umum, yang muda harus menghormati yang tua atau yang dituakan. Sebaliknya, yang tua atau yang dituakan wajib menghargai, melindungi, membimbing, dan menyayangi yang muda.

maupun susah (*sabaya mati, sabaya mukti*). Prinsip ini mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu. Demikian pula dalam menangani urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, antaranggota masyarakat hendaknya seia-sekata, bekerja sama, bergotong-royong bahu-membahu, tidak menghitung-hitung imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya.²⁸

Nilai lain dalam budaya jawa yang relevan bagi pemberdayaan masyarakat adalah kewajiban untuk mencari pengetahuan. Prinsip *ngèlmu iku kelakoné kanthi laku*, menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan harus dijalani dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang memadai. Usaha keras itu harus dilandasi dengan kemauan keras, kesungguhan hati, tekad, dan semangat, karena keempat hal itu akan memberikan kekuatan, ketabahan, dan kegigihan. Di samping itu, keteguhan hati untuk tetap tegar menghadapi godaan hawa nafsu yang dapat menyesatkan merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan.²⁹ Dengan demikian, pengetahuan yang dicari akan diperoleh dengan saksama dan berguna bagi kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrowi.³⁰

Seperti telah disampaikan sebelumnya, meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia. Wujud nyata tugas mulia itu dilakukan manusia dengan bekerja, tidak berpangku tangan tanpa bekerja, dengan mengharap rejeki yang datang tanpa berusaha. Setiap orang harus berusaha keras mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat sekitarnya, negaranya, maupun bagi umat manusia seluruhnya.

Bagi masyarakat Jawa, bekerja harus dilandasi oleh kesungguhan lahir dan batin menghadapi segala tantangan, kesulitan dan risiko yang mungkin

²⁸ *Sepi ing pamrih, ramé ing gawé*

²⁹ *Setya budya pangekesé dur angkara*

³⁰ Pencarian pengetahuan dilakukan melalui pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas kecerdasan kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas, moralitas, emosionalitas, dan intelektualitasnya, maupun kesehatan dan pengembangan raganya. Penyelenggaraan pendidikan harus membuka peluang seluas-luasnya bagi aktualisasi diri dan pengembangan atas segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Pengetahuan merupakan daur proses dan hasil pengenalan secara akumulatif dan terus-menerus yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri dan apa saja di luar dirinya. Pengetahuan merupakan sarana yang penting bagi manusia dalam rangka menunaikan tugas mulianya, yakni mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*).

timbul, jika tidak maka tidak akan mendapat hasil yang layak. Dengan demikian, dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan, dan risiko pekerjaan apa pun, orang harus senantiasa teguh pendirian, handal dan ulet dalam menghadapi masalah, cakap dan tangkas dalam menyelesaikan persoalan. Dalam bekerja harus teliti, cermat, dan penuh perhitungan, agar mendapat hasil yang maksimal, sehingga harus dirancang dan ditata dengan tertib, diorganisasikan dan dikelola dengan teratur, dilaksanakan dengan cermat dan saksama, ditempuh dengan langkah-langkah yang benar dan tepat, dan semua pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas. Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang menginginkan penghasilan yang layak bagi keberlangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun, mencari keuntungan tidak boleh berujung keserakahan dan merugikan orang lain. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Mencari keuntungan berarti bukan hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga menguntungkan orang lain sekaligus, alias saling menguntungkan. Mencari kemakmuran dan kesejahteraan berarti saling memakmurkan dan menyejahterakan satu sama lain.

Kearifan lokal inilah yang mendorong manusia berkelompok dan membentuk entitas. Bagi Francis Fukuyama, penulis buku *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi.

Dengan bahasa lain, modal sosial ini mampu ditingkatkan menjadi *social enterprise*, yaitu entitas bisnis yang tujuan utamanya adalah keuntungan sosial. Keuntungan yang dihasilkan diinvestasikan kembali ke bisnisnya untuk pengembangan (keuntungan) komunitas. Misalnya pengembangan koperasi di tingkat desa, yang keuntungannya tidak dibagi-bagikan sebagai dividen kepada pemilik perusahaan. Koperasi ini umumnya didirikan karena banyaknya masyarakat miskin, yang kebanyakan warganya ini tidak bisa menyekolahkan anak mereka. Pemberdayaan masyarakat, berawal dari persoalan sosial yang dihadapi dalam keseharian kehidupan mereka, yang kemudian dikelola lalu menimbulkan *social benefit*, dan pada akhirnya menumbuhkan *economic benefit*. Pemberdayaan ini dilandasi oleh kearifan lokal, yaitu gotong royong dan *tepa selira*. Adanya kearifan lokal ini membuat tingginya rasa peduli pada orang lain. Dalam memilih siapa yang menggunakan uang pinjaman di koperasi ini harus ada toleransi antaranggota, kearifan lokal berkaitan dengan nilai-

nilai yang dipegang dalam kultur lokal, yaitu mencakup wilayah kabupaten, kota, bahkan provinsi. Jika dikembangkan, terkait dengan pemberdayaan masyarakat akan memberikan kekuatan, sebab akan membentuk keunikan pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang tidak ada di tempat lain.

Salah satu program yang menjadi ciri khas kota Yogyakarta, terutama dalam program pengentasan kemiskinan di perkotaan adalah dengan *Segoro Amarto* (Semangat Gotong Royong *Agawe Majune Ngayogyakarta*). Program ini dilatarbelakangi lambatnya pencapaian target program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan pola penanganan yang parsial, kegiatan intervensi belum berkelanjutan dan belum optimalnya koordinasi instansi serta keterlibatan tokoh masyarakat yang masih rendah. Jiwa yang dibangun dalam *Segoro Amarto* adalah kedisiplinan, kepedulian sosial, gotong royong, dan kemandirian. Diharapkan melalui program *Segoro Amarto* ini, akan timbul rasa persatuan dan kesadaran bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan sejahtera. Sehingga masyarakat memiliki motivasi dan semangat kerja keras serta peduli sesama.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan keyakinan, bahwa nilai-nilai *Segoro Amarto* dapat menjadi acuan dalam gerakan penanggulangan kemiskinan dan upaya lain menuju masyarakat madani. Perencanaan program bersifat realistik berbasis partisipatif, dengan memetakan permasalahan dan potensi serta kebutuhan lingkungan. Untuk penanaman nilai-nilai *Segoro Amarto* secara individu, adalah sikap *prasojo*, jujur dan irit, *asih mring sesami*, *becik ketitik ala ketara* dan *rawe-rawe rantas malang-malang putung*. Nilai yang ditanamkan adalah Tuhan tidak akan mengubah nasib kaumnya apabila seseorang itu tidak mengubah dirinya sendiri. Nilai lainnya adalah, *mangayu-hayuning bawono*, *rukun agawe santosa crah agawe bubrah*, *sak iyeg sak eko proyo*, *sak iyeg sak eko kapti*, *sepi ing pamrih rame ing gawe*. Berembuk bersama dengan warga dilingkungan untuk saling membantu mengentaskan warga lain dari kemiskinan, merupakan salah satu nilai-nilai *Segoro Amarto*.

Segoro Amarto melibatkan partisipasi semua pihak yang diwujudkan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, tidak mengklasifikasikan masyarakat miskin sebagai objek, namun menjadi bagian dari subjek pembangunan yang mesti diberdayakan. Kebersamaan dalam *Segoro Amarto* dikonsepkan dalam proses pemberdayaan yang menghilangkan bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Warga yang lebih berdaya dan lebih mampu diharapkan dapat menstimulasi warga yang kurang berdaya sesuai kemampuan untuk bersama bergerak maju mencapai kesejahteraan bersama.

Segoro Amarto diterjemahkan sebagai gerakan bersama seluruh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Gerakan ini lebih menekankan

pada perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih baik mencakup semua aspek fisik dan nonfisik. Sebagai gerakan kultural untuk menumbuhkan nilai-nilai gotong-royong, kepedulian dan kemandirian di antara warga. Oleh karena itu, pembangunan dapat berhasil jika semua komponen masyarakat dapat bersatu padu, yang dilandasi dengan kebersamaan. Masyarakat Kota Yogyakarta lebur menjadi satu kesatuan dalam membangun kota. Satu sisi ada yang menjadi pemimpin, motivator serta pelaksana dan sisi lain juga bisa sebaliknya.

Singkatnya, *Segoro Amarto* menggambarkan semangat yang menggelora terus menerus dan tidak kenal menyerah serta di dalamnya ada ketenangan. Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang melambangkan kebaikan berupa sifat masyarakat dan pemimpin yang dapat diteladani. Secara totalitas filosofi *segoro amarto* dapat dimaknai sebagai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampungnya, kelurahan, kota ataupun negara. Memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. *Segoro amarto* sebagai tempat hidup dan menghidupi (sumber daya alam dengan segala kekayaannya) dan merupakan sarana interaksi dan transformasi antara bangsa dan budaya.

Dasar hukum pelaksanaan *Segoro Amarto* adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Gerakan *Segoro Amarto* Kota Yogyakarta. Dalam Perda ini dijelaskan bahwa Gerakan Semangat Gotong Royong *Agawe Majune Ngayogyakarta* yang selanjutnya disebut Gerakan *Segoro Amarto* adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangannilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan, dan kedisiplinan yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih sejahtera. Jiwa atau nilai yang dikembangkan adalah: (1) Kemandirian dalam kehidupan, bahwa kita harus: (a) kerja keras, (b) percaya diri, (c) tangguh, (d) pantang menyerah, (e) ketidaktergantungan, (f) kemauan keras, (g) motivasi, (h) inovatif, (i) sabar dan cermat, dan (j) bersyukur; (2) Nilai kedisiplinan, bahwa dalam kehidupan kita harus: (a) jujur, (b) taat pada aturan, (c) tepat waktu, (d) konsisten, (e) konsekuen, (f) mawas diri, dan (g) bertanggung jawab; (3) Kepedulian, bahwa dalam kehidupan kita harus: (a) kasih sayang kepada sesama, (b) suka menolong/membantu, (c) menghormati/menghargai sesama, (d) tidak diskriminatif/kesetaraan, (e) solidaritas sosial, (f) harmoni/keseimbangan, (g) proaktif dalam kebaikan, (h) *teposeliro*, (i) *handarbeni*, dan (j) tanggap; dan (4) Nilai kebersamaan,

yaitu bahwa dalam kehidupan kita harus: (a) gotong royong, (b) setiakawan, (c) ikhlas, (d) rukun, dan (e) mengutamakan kepentingan bersama.

3. Subak dan Lembaga Perkreditan Desa: Pengalaman Bali

Provinsi Bali yang dikenal sebagai daerah pariwisata, sampai saat ini juga belum bisa luput dari permasalahan kemiskinan. Penduduk miskin di Bali sendiri hingga Maret 2013, mencapai sebanyak 162.510 orang, atau sekitar 3,95 persen dari jumlah penduduk. Penduduk kurang mampu itu terdiri atas 96,35 ribu orang bermukim di daerah perkotaan, dan sebanyak 66,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Bali sedikit berkurang sebanyak 0,23 persen dari 4,18 persen pada Maret 2012 menjadi 3,95 persen. Demikian juga dari sisi jumlah pada periode yang sama sedikit berkurang sebanyak 6,3 ribu orang. Penurunan kemiskinan ini merupakan dampak positif dari kebijakan pembangunan seluruh sektor khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin (*pro-poor*) terutama di daerah perdesaan. Daerah perkotaan pada umumnya memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2008 cukup tinggi bahkan mencapai dua digit. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan pada Maret 2009 yaitu hanya 2,4 ribu orang. Pada Maret 2010 terjadi pergeseran jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 93,3 ribu orang sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan hanya 83,6 ribu orang. Maret 2011 s.d. Maret 2013 jumlah penduduk miskin di perkotaan kembali lebih banyak dibandingkan di perdesaan

Pemberdayaan masyarakat di Bali antara lain dilakukan melalui konsep permodalan yang dilakukan dengan konsep pengumpulan uang. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memainkan peran utama dalam menstimulasi program pembangunan. LPD diperkenalkan sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lemah yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dalam rangka menumbuhkan iklim usaha secara kekeluargaan berdasarkan azas gotong royong. LPD harus terus dikembangkan sebagai usaha masyarakat agar mampu memperkuat dirinya sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Perkembangan LPD di Bali, demikian pesat dari segi permodalan maupun dari segi kelembagaan. Perkembangan LPD sebagai badan usaha masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan internal (sumber daya manusia, modal, pemasaran, dan teknologi), serta lingkungan eksternal (budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi masyarakat, dan pelaksanaan hukum). Setidaknya terdapat indikasi, bahwa perkembangan LPD di Bali,

didukung oleh tumbuhnya nilai-nilai budaya yang menjiwai kesadaran masyarakat Bali. Pandangan budaya Bali terhadap LPD dapat mempengaruhi prilaku masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesejahteraan bersama.

Beberapa budaya Bali yang menunjang perkembangan LPD antara lain adalah nilai *kulawarga* atau *menyama-braya*, yang menyiratkan makna, bahwa dalam mengelola kekayaan diperlukan mentalitas dan perilaku masyarakat untuk mengutamakan kepentingan umum. Sejalan dengan prinsip ini, LPD bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat banyak, bukan individu, karena salah satu cara dalam mengelola kekayaan dilakukan dengan adil, demokratis, dan kebersamaan. Dana atau kekayaan dalam pengertian lahir dan batin. Kedengkian, memunculkan sikap mental yang sulit, untuk melakukan prinsip kebersamaan, gotong-royong yang menjadi prinsip dasar LPD.

Konsep *menyama-braya*, sebagai indikator hubungan sosial di antara orang Bali dengan sesamanya, orang Bali dengan non-Bali dalam kehidupan masyarakat di Bali. Jika semua orang adalah saudara maka terialinnva hubungan sosial itu adalah sebagai model sosial yang memuat berkeadilan bagi keseluruhan hidup masyarakat Bali. *Menyama-braya* dengan demikian merupakan bentuk toleransi dan solidaritas sosial, yang terwujud dalam keadilan lokal.

aturan kelembagan, atas manajemen pimpinan, dengan perjanjian sehidup semati. Siap menempuh segala rintangan, dan penderitaan, dalam mengelola usaha sesama anggota, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, *sagilik saguluk*, adalah syarat untuk dapat berlangsungnya hubungan sosial yang harmonis. Jika terdapat masalah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mupakat, dengan kekompakan dan kebulatan suara anggota.

Konsep Tri Hita Karana, juga tercermin pada nilai tradisional yang mengatur penggunaan ruang/tata ruang dari skala makro sampai mikro, yang diperpadukan dengan konsep sumbu bumi (Gunung-Laut) dan sumbu religi yang berorientasi pada arah terbit dan terbenamnya matahari (timur-barat). Ruang ini menjadi bagian kehidupan tradisional pedesaan di Bali yang tetap dilindungi atau dipertahankan keberadaannya karena berfungsi sebagai unsur *palemahan* untuk mencapai kesatuan hubungan penduduk desa dengan alam. Di dalam *awig-awig*/peraturan yang dimiliki setiap subak, juga dinyatakan bahwa seluruh sawah pada hakekatnya adalah kawasan yang sangat disucikan sehingga harus tetap dijaga kelestariannya.

Terkait dengan itu keberadaan subak di Bali merupakan lembaga irigasi yang bercorak sosio religius dengan fungsi utamanya dalam pengelolaan air irigasi guna memproduksi tanaman pangan (padi) berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana* (Sutawan, 2002) yang dimanifestasikan berupa: (1) *parahyangan* (puradi subak dan ritualnya); (2) *pawongan* (organisasi subak dan peraturannya); dan (3) *palemahan* (fasilitas irigasi, sawah, flora dan fauna). Sutawan (2002)) juga menyatakan, bahwa subak dapat dikaji dari beberapa aspek: (1) sistem fisik, yaitu sekelompok sawah dengan batasan yang jelas (batas kanal atau hidrologi) sehingga anggota subak yang sama bisa berasal dari desa yang berbeda; (2) sistem teknologi yaitu jaringan irigasi yang terdiri dari dam, saluran air/kanal, bangunan bagi/struktur pembagian air; (3) sistem sosial sebagai sebuah kelompok petani yang mengatur pengelolaan air; dan (4) sistem budaya yaitu komunitas pertanian berbasis hukum adat yang memiliki karakter sosio religi.

Adanya sistem Subak di Bali juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan di wilayah itu. Sistem Subak menjaga keseimbangan antara masyarakat yang menghendaki pangan untuk berproduksidi satu sisi, dan di sisi lain tidak mau merusak alam. Selalu ada kerja sama dalam masyarakat: siapa yang dapat lahan di atas, siapa yang dapat di bawah, lalu airnya mengalir ke mana. Sutawan (2002) menyatakan subak memiliki peran: (1) pengelolaan irigasi, meliputi distribusi dan alokasi air, pengelolaan fasilitas irigasi, ritual subak, pendanaan dan resolusi konflik; dan (2) kegiatan di luar pengelolaan irigasi yaitu mengontrol hama dan penyakit tanaman, membantu pemerintah dalam pengumpulan pajak lahan, mitra pemerintah dalam penerapan pembangunan

pertanian, aktivitas ekonomi, mendistribusikan air untuk keperluan rumah tangga pedesaan, sumber daya wisata, serta memelihara nilai-nilai tradisional dan keanekaragaman hayati.

Sumber irigasi utama subak di Bali berasal dari air sungai. Pembagian air dilaksanakan sepanjang tahun bila sumber air mencukupi, namun bila kurang, dilakukan sistem giliran. Untuk kasus pernggiliran, biasanya suatu subak mendapatkan air berupa: (1) *Pebanyon*, air untuk keperluan ternak, manusia dan palawija (2) *Pungkatan*; aliran air secara mendadak ke subak yang bersangkutan selama satu hari dan hanya dilakukan dalam keadaan mendesak. Pembagian dengan sistem gilir ini biasanya diatur dalam tiga masa dengan waktu pembagian air berbeda-beda tergantung iklim setempat, yaitu: (a) *Ngulu* (terdahulu) yaitu untuk sawah/area subak di hilir sumber air; (b) *Maongin* (pertengahan) untuk sawah/area subak di hulu/area subak di hulu; dan (c) *Ngasep* (paling akhir) untuk sawah/area subak yang dekat dengan sumber air (Pitana, 1993).

Filosofi Tri Hita Karanaini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan, yaitu *Sanghyang Jagat karena* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan manusia (Institut Hindu Dharma, 1996: 3). Secara umum konsepsi Tri Hita Karana berarti bahwa kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya dapat terwujud bila terajadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-manusia-alam. Keseimbangan ini setidaknya terdapat dalam pengakuan masyarakat Bali, bahwa adat adalah merupakan bentuk "modal," sebuah asetyang memberi sumbangan dukungan sosial, ekonomi, kesejahteraan, kepuasan estetika dan perlindungan spiritual. Pembangunan dan komodifikasi dari kesadaran identitas etnis dan budaya Bali (kebalian) muncul dari persinggungan berbagai ikatan lokal dan relasi. Oleh karena itu, pencampuran nilai-nilai, makna, perasaan, kebiasaan, aturan, hubungan, dan kepekaan yang melekat pada konsep-konsep 'adat' atau 'budaya' mengandung garis-garis penting yang menghubungkan pola-pola relasi sosial yang mencakup tiga unsur penting, yaitu Tuhan, Alam, dan Manusia.

Kehidupan ritual yang makin intensif ketika menghadapi krisis ekonomi merupakan suatu ekspresi dari apa yang orang Bali yakini sebagai dasar kepercayaan dan nilai dan sebagai suatu sarana mendapatkan kondisi kemakmuran. Reduksi satu sisi pada proses instrumental ini dapat mendistorsikan dimensi-dimensi mereka yang secara intrinsik bermakna dan memuaskan, dan harus diakui sebagai batas kritis pada penggunaan kerangka kerja sosial atau 'modal' simbolis (Mc Lean, et.al., 2002: 243). Modal sosial, dalam pemikiran analogis yang digambarkan Putnam (1993) dalam konteks Eropa merupakan produk dan dasar pikiran dari kegiatan di tingkat desa di

Bali. Hal ini tampak di banyak tempat, dari beroperasinya bisnis rakyat di desa dan banjar yang keuntungannya diinvestasikan kembali dalam sarana publik, untuk kegiatan seka (kelompok tradisional) dan arisan yang cukup aktif di hampir semua komunitas. Setiap banjar dalam desa adat dapat memiliki program pinjam dan kelompok kelompok sukarela yang lebih kecil untuk mengumpulkan dana guna membangun rumah, upacara dan tujuan-tujuan umum lainnya.

Tata nilai kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan agama Hindu, terpelihara dan terimplementasi dalam desa adat yang disebut dengan *Desa Pakraman* yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Desa *pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali memiliki peranan yang besar dalam bidang agama dan sosial budaya.

Sejarah perkembangan desa *pakraman* berakar pada budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, mengandung karakteristik filosofis yang membentuk nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturan yang ditetapkan dari tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugas dan wewenang desa *pakraman*. Eksistensi desa *pakraman* dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsidan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Perda ini mempunyai arti penting, karena telah memberikan landasan yuridis formal desa adat di Bali, yang kemudian dikukuhkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

Desa *pakraman* menurut peraturan daerah ini adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, Kebudayaan Bali, berdasarkan *Tri Hita Karana*, mempunyai *kahyangan tiga/kahyangan desa*. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa *pakraman* adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan *krama* desa. Desa *pakraman* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan *krama-nya*, *prajuru* desa bertanggungjawab kepada *paruman* desa.

Desa *pakraman* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat *awig-awig*;
- b. mengatur *krama* desa;
- c. mengatur pengelolaan *hartakaya* desa;

- d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali untuk memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah padakhususnya, berdasarkan *paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka* (musyawarah-mufakat);
- f. mengayomi *krama* desa.

Disamping itu, Desa *pakraman* mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;
- b. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*;
- c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desapakraman.

Sebagai masyarakat hukum adat, maka berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD1945 keberadaan desa *pakraman* beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Salah satu hak tradisional desa *pakraman* adalah membuat *awig-awig*, disamping menyelenggarakan pemerintahan sendiri, serta menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi diwilayahnya, baik yang berupa sengketa ataupun pelanggaran adat (Griadhi, 1994: 10-12). Semua itu merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi desa *pakraman*. Dengan demikian, landasan konstitusional kewenangan desa pakraman untuk membuat *awig-awig* dalam konstitusi terletak pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Awig-awig desapakraman termasuk dalam jenis hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan RI, yang dibuat secara musyawarah mufakat oleh *krama* desa *pakraman* melalui sebuah *paruman* desa (rapat desa). Kewenangan desa *pakraman* dalam membuat *awig-awig* mempunyai landasan hukum yang kuat, disamping karena bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) juga bersumber pada kekuasaan Negara. Berdasarkan otonomi desa *pakraman*, sejak awal lahirnya atau terbentuknya desa *pakraman* telah berwenang mengurus rumah-tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga desa *pakraman* yang bersangkutan Dalam struktur kenegaraan RI, keberadaan desa *pakraman* mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konstitusi, yaitu melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Mengingat otonomi desa *pakraman* dalam membuat *awig-awig*, maka dapat dipahami jika tidak ada *awig-awig* yang seratus persen seragam diseluruh Bali, karena *awig-awig* dibuat oleh desa *pakraman* disesuaikan

dengan kondisi setempat (*desa mawacara*) yang mungkin saja bervariasi antara *desa pakraman* yang satu dengan yang lainnya. Kesamaannya ada pada landasan filosofis *Tri Hita Karana*, yang sesungguhnya menjadi karakter *desa pakraman* yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* ini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan. Tiga unsur tersebut adalah *Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan *manusa* (Institut Hindu Dharma, 1996: 3). Secara umum konsepsi *Tri Hita Karana* berarti bahwa kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya dapat terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-manusia-alam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik sebagai individu maupun kelompok;
- b. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya;
- c. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Manusia dilihat sebagai bagian dari alam semesta yang tidak dapat dipisahkan dengan Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua itu, yaitu manusia, alam semesta, dan Tuhan Sang Pencipta, saling berhubungan dan berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus tetap dijaga. Untuk dapat mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan jasmanidan rohani (*moksartham jagadhitaya ca iti dharma*), maka masyarakat Bali senantiasa mengupayakan dan menjaga terpeliharanya suasana yang harmonis dalam masyarakat, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya.

Dengan demikian kehidupan yang serba harmonis, serba seimbang dan lestari merupakan bagian dari cita-cita masyarakat Bali. Suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai suasana yang tertib, adil, aman dan damai atau *trepti, sukerta sekala niskala* (Sudantra, 2001: 2). Dalam bahasa *awig-awig* *desa pakraman*, cita-cita di atas umumnya dirumuskan dengan kalimat: "*ngerajegang sukertan desa sahapawonganya sekala kalawan niskala*", seperti misalnya dapat dilihat dalam Pawos3 *Awig-awig* Desa Adat Kapal, Badung (2007: 3)

Dalam praktik kehidupan masyarakat Bali, dikenal ada beberapa kearifan lokal yang menjwai setiap aktifitasnya, antara lain:

- a. *Kulawarga* (*Menyama-Braya*), yang dapat diartikan lebih luas dari *nyama* (saudara), sehingga dapat dimaknai sebagai kerabat; *manyama-braya* artinya hal kekerabatan, hubungan kekerabatan; *pabrayaan*, artinya gunakan; berikan; dermakan untuk kepentingan hubungan kekerabatan (Tim, 2005: 114; dan Kersten, 1984: 197).

- b. Konsep *Karma Phala*, yaitu bahwa kerja adalah sebuah ibadah (*yajña* atau pengorbanan), dan jika ingin membebaskan diri dari berbagai keterikatan hidup, tiada jalan lain, kecuali kerja. Pinsip kerja "*ala ulah ala tinemu, ayu kinardi ayu pinanggih*." Konsep kerja berlandaskan prinsip tidak mengharapkan balasan, dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan umum dan ketertiban sosial.
- c. Persatuan (*Sagilik-saguluk*), yaitu aktivitas kebersamaan, kesatuan dan persatuan secara internal dan eksternal, juga ber makna kebulatan tekad untuk menghadapi suatu pekerjaan bersama. Makna sosial yang terkandung dalam papatah *sagilik-saguluk* adalah persatuan yang kokoh dan kompak; sepakat (Tim, 2005: 264).
- d. Hubungan Sosial (*Sidikara*), memiliki arti: bergaul akrab, selalu tolong-menolong, pinjam-meminjam. Lawan dari Konsep *sidikara*, adalah *sing dadi ajak masidikara* (tidak bisa hidup saling tolong-menolong).
- e. Keikhlasan Hubungan Sosial (*Lascarya*), yang berarti rela, sedia mengorbankan diri, yang harus dilatih untuk mencapai kebajikan seperti diajarkan di dalam kitab suci, yaitu (1) cinta kepada kebenaran; (2) cinta kepada kejujuran; (3) cinta kepada keikhlasan; dan (4) cinta kepada keadilan.
- f. *Rasa Jengah*, jangan menunda waktu untuk membayar hutang dan mengumpulkan uang. Jangan menunda waktu untuk belajar, yakni untuk mencari ilmu pengetahuan. Jangan menunda waktu untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan serta kesengsaraan yang melanda krisis global.
- g. *Macingkrem* (*Jimpitan/luran*), yaitu pola hidup bersama untuk mengembangkan perekonomian agar dapat meringankan beban masyarakat, telah tumbuh dan berkembang, dengan semangat setia serta jujur, dalam tradisi masyarakat Bali. Setiap bulan, anggota masyarakat yang disebut *krama*, mengeluarkan uang sebagai iuran, sesuai kesepakatan *paruman*, untuk digulirkan dengan pinjaman berbunga rendah.

4. PNPM Mandiri: Pengalaman Sulawesi Selatan

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat ekonomi semata, tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dilakukan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber dayayang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan

sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumber daya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan diseluruh daerah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan mulai melaksanakan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. PNPM di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan di 236 kecamatan dan 2884 desa dengan alokasi anggaran Rp729,5 miliar untuk sarana-prasarana dan ekonomi produktif. Kegiatan PNPM Mandiri ini telah menjangkau 19.937 kelompok.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program adalah: pertama, pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. Kedua, bantuan langsung masyarakat yaitu dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Ketiga, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku loka, yaitu serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

Saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang mengembangkan audit sosial bagi program sosialnya. Dua program utama yang sudah diaudit sosial adalah program pendidikan gratis dan kesehatan gratis, yang akan dilanjutkan dengan audit terhadap empat program penanggulangan kemiskinan termasuk satu kelembagaan. Empat program terkait pengentasan kemiskinan itu adalah Pendidikan Gratis dan Pendidikan Bersubsidi di Dinas Pendidikan Kota Makassar, program *Nutrition Improvement Trough Community Empowerment* atau (NICE) di Dinas Kesehatan, program *Lifeskill* di Badan Pemberdayaan Masyarakat, serta Akseptor KB di BKKBD Makassar. Ditambah audit sosial pada kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Lebih jauh, program audit sosial ini kemudian dikembangkan menjadi pola pertanggungjawaban pemerintah daerah terbuka di hadapan publik yang dikemas dalam acara *Tudang Sipulung*. Kata *tudang sipulung* secara harfiah berarti duduk bersama. Namun secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. *Tudang sipulung* juga bisa diartikan sebagai wadah yang memediasi antara kepentingan

masyarakat dengan pemerintah. Sebagai nilai demokrasi, *tudang sipulung* sudah hidup dalam masyarakat Bugis Makassar, sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Salah satu ciri pelaksanaan PNPM Mandiri adalah bermusyawarah dan berdiskusi untuk menetapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam kaitan ini, salah satu nilai tradisional yang relevan untuk direvitalisasi adalah nilai *tudang sipulung* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan *tudang sipulung* dapat bersifat resmi maupun tidak resmi, mulai dari tingkat paling kecil dalam keluarga, antarkeluarga, dalam kampung, antarkampung, dalam negara, hingga antarnegara. *Tudang sipulung* yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antarkeluarga. Musyawarah yang menyangkut persoalan masyarakat atau keputusan penting dalam suatu kampung atau kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi, yang dipimpin oleh seorang *matoa* sebagai pemimpin atau raja suatu kampung atau negara. *Tudang sipulung* yang dilaksanakan dalam suatu kampung disebut *tudangwanua* yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan para penghulu-penghulu adat (*pakketenni ade'*). Proses musyawarah untuk mencapai mufakat berlangsung secara demokratis. Pimpinan *tudang sipulung* yakni *arung matoa* berkewajiban meminta pendapat kepada peserta *tudang sipulung*. Keputusan yang diambil dalam *tudang sipulung* harus berdasarkan prinsip *massolo' pao* (mengalir bersama), yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam musyawarah merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama-sama. Antara kehendak penguasa dan kehendak rakyat harus berjalan beriringan dalam menemukan titik temu berdasarkan kepentingan bersama.

Selain nilai yang bersifat kolektif, terdapat satu nilai individual yang memiliki dampak kolektif, yaitu *siri' na pacce* yang merupakan filosofi dasar dalam kehidupan keseharian masyarakat Bugis Makassar. *Siri' na pacce* tidak memiliki padanan yang tepat dalam kosa kata bahasa Indonesia, namun arti yang mendekati kata ini adalah "*malu, harga diri*", atau "*usaha yang kuat*". Atau dapat juga berarti "*marwah*" untuk kata "*siri*", dan "*pacce*" lebih mendekati kata tanggung jawab, sanggup memikul rasa pahit, pantang lari atau mengundurkan diri, berani mengambil risiko. Masyarakat Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi filosofi *siri' na pacce* ini sebagai tolak ukur kebaikan, baik dalam melakukan hubungan sosial maupun ekonomi. Karena filosofi *siri na pacce*, bisa dilihat bahwa orang-orang Bugis Makassar adalah orang-orang tangguh, berani mengambil risiko, tetapi tetap dalam bingkai *pacce* (bertanggungjawab). Jadi, sesungguhnya *siri' na pacce* tidak identik

dengan kekerasan. Dia lebih identik dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan yang dimaksud adalah unggul, terbaik, jujur, berani mengambil resiko tetapi tetap bertanggungjawab.

Nilai filosofis *siri' na pacce* merepresentasikan pandangan hidup orang Bugis Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan meliputi: (1) *prototipe* watak orang Makassar yang terdiri atas: reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani, dan konstruktif. (2) nilai etis *siri' na pacce* meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, berkata jujur, bijak, merendah, ungkapan sopan untuk sang gadis, cinta kepada Ibu, dan empati. Dengan filosofi ini, setiap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, termasuk pelaksanaan PNPM Mandiri akan dapat berhasil dengan baik, karena masyarakat Bugis Makassar dikenal orang yang tangguh, pelaut-pelaut ulung, dan saudagar-saudagar yang sukses. Mereka tidak cengeng dengan keadaan yang ada, sehingga lautan yang luas menjadi hamparan harapan yang seluas lautan. Sekali layar terkembang, pantang untuk surut kembali. *Siri' na pacce* juga lebih identik dengan kejujuran. Kejujuran adalah pintu kehormatan, mengkhianati kepercayaan adalah sebuah *siri'* dan kehilangan *siri'* adalah aib yang sangat melalukan, sehingga dalam hubungan sosial, orang yang kehilangan *siri'* adalah orang-orang yang terkucil.

5. Pengalaman Sumatera Barat: Arti Penting Organisasi Sosial

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan tujuh kota, 157 kecamatan dan terdiri dari 517 Nagari/Kelurahan. Khusus di provinsi ini istilah Nagari digunakan untuk daerah kabupaten dan Kelurahan untuk daerah kota. Wilayahnya 42,297 Km², dilihat dari kondisi dan penggunaan lahan sebagian terdiri dari hutan (61%), tanah yang dimanfaatkan untuk pemukiman (28,59%) dan selebihnya tanah yang belum dimanfaatkan. Kinerja ekonomi di provinsi ini, memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%-7% pertahun. Diantaranya terbanyak pertanian 25,16 % dan didukung lima sub sektor yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan laut.

Di Sumatera Barat, tahun 1996 angka atau garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp48.389,- dan di perdesaan sebesar Rp34.863,-. Sedangkan tahun 2006, diketahui garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp225.671,- dan perdesaan sebesar Rp 159.904. Tahun 2005, terdapat 223.825 rumah tangga miskin atau 22,07 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumah tangga miskin banyak terdapat dalam enam daerah yaitu Kabupaten Mentawai 8.002 (51,12%), Pasaman 19.922 rumah tangga (35,98%), Pasaman Barat 21.186 rumah tangga (29,41%), Pesisir Selatan 26.337 rumah tangga (25,17%), Padang 35.162 rumah tangga (21,07%) dan Payakumbuh 4.250 rumah tangga (17,12%).

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 9,50 persen atau sekitar 430.024 jiwa. Tahun 2011, angka itu turun menjadi 9,04 persen dengan jumlah penduduk miskin 442.085 jiwa. Kemudian pada tahun 2012 lalu, jumlah penduduk miskin berjumlah 404.736 jiwa atau kembali turun menjadi 8,19 persen. Lalu sampai pertengahan tahun 2013 ini, persentase penduduk miskin di Sumbar menurun menjadi 8,14 persen atau sekitar 407.470 jiwa. Berdasarkan data dari BPS tersebut, dibandingkan dengan daerah perkotaan, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat lebih banyak di daerah kabupaten. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni 18,85 persen. Dan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Sawahlunto sebesar 2,34 persen. Meskipun tinggi, namun angka kemiskinan Sumbar masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 11,37 persen. Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2011 lalu, hanya 7 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan 12 kabupaten/kota lainnya berada di atas rata-rata provinsi.

Kemiskinan di Sumatera Barat jika dikaitkan dengan pekerjaan dan pendapatan perorangan atau rumah tangga, terdiri dari buruh tani, nelayan yang tidak punya alat tangkap, buruh dan pedagang kecil. Dalam istilah lokal, ditemukan beberapa sebutan orang miskin, yaitu *urang indak bapunyo* (orang tidak punya), *urang indak mampu* (orang tidak mampu), *urang susah* (orang susah), *urang sulit* (orang sulit). Orang miskin sebagai keadaan negatif, selalu dikaitkan dengan pekerjaan dan pendapatan perorangan atau rumah tangga. Orang sangat miskin disebut juga *urang bangsaik* (orang bangsat) atau *urang ino* (orang hina). Mereka yang tergolong rumah tangga miskin pada umumnya tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian pokok sebagai petani di lahan kering atau perladangan yang penyebabnya antara lain adalah (a) tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas, (b) produktivitas rendah karena hama babi dan kera yang susah ditanggulangi masyarakat setempat, (c) kesuburan tanah dan ketersediaan air rendah, dan (d) areal sawah sangat sedikit, sehingga mereka harus membeli beras.

Sementara di perkotaan angka yang tinggi karena tingginya jumlah penduduk. Diantaranya nelayan yang tergolong miskin yang dilihat dari kepemilikan alat tangkap. Nelayan terbagi tiga kelompok yaitu; *pertama*, nelayan miskin yang terdiri dari buruh angkut; *kedua*, nelayan sedang yang memiliki kapal dan bermotor tempel; *ketiga*, nelayan kaya yang memiliki alat tangkap lengkap dan kapal bermotor. Pada daerah yang berbasis pertanian sawah, golongan miskin biasanya menunjuk pada rumah tangga yang mengandalkan pendapatannya dari pekerjaan buruh tani. Ini terjadi karena tidak memiliki lahan sendiri atau lahan sempit seperti petani penggarap

yang tidak mempunyai lahan pertanian. Pada tipologi yang berbasis nelayan, golongan miskin menunjuk pada rumah tangga buruh nelayan yang tidak memiliki sarana penangkap ikan yang lengkap. Biasanya buruh nelayan hanya memiliki sampan saja atau perahu tidak bermotor.

Adapun tipologi daerah perkotaan, golongan miskin biasanya menunjuk pada rumah tangga yang mengandalkan pendapatan dari buruh dan sektor informal. Khususnya sektor informal sangat bervariasi seperti buruh kasar, pedagang yang tidak bermodal atau bermodal kecil. Kebanyakan orang miskin melakukan pekerjaan ganda. Misalnya daerah perdesaan seseorang sebagai petani sawah dapat saja menjadi buruh tani, tukang dan buruh lainnya. Di kalangan nelayan, seorang buruh nelayan dapat saja merangkap pekerjaan sebagai tukang atau buruh angkat. Demikian juga daerah perkotaan, seorang pegawai rendahan merangkap sebagai tukang ojek atau buruh serabutan. Karakteristik sosialnya kebanyakan rumah tangga yang dikepalai perempuan termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin memiliki jumlah anak yang lebih banyak dan sebagian besar menjadi tanggungan keluarga karena masih bayi, usia sekolah, belum bekerja atau belum menikah.

Di tengah banyaknya program anti kemiskinan, ternyata ekonomi rumah tangga miskin banyak yang merasa pesimis melihat perbaikan ekonominya. Penyebab kemiskinan antara lain;

1. Alternatif pekerjaan di daerahnya terbatas dan berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro. Apabila ingin memperbaiki ekonomi, maka perlu mengakses peluang. Namun mereka tidak mampu karena terbatas pengetahuan dan keterampilan.
2. Ketiadaan alternatif dan tidak mampu mengkreasi peluang baru, maka orang miskin bergantung pada pekerjaan yang tidak memberi pendapatan yang mencukupi.
3. Produktivitas rendah karena orang miskin tidak memiliki aset lahan yang memadai. Pertumbuhan penduduk terus berlangsung, sementara luas lahan tetap dan dipengaruhi sistem pemilikan lahan secara adat.
4. Orang miskin tidak mampu mengakses sumber daya karena ketiadaan teknologi dan minimnya modal.

Orang miskin atau rumah tangga miskin dalam menghadapi kemiskinan yang dialami melakukan upaya adaptasi. Strategi yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidupnya secara sosial dan ekonomi. Strategi tersebut antara lain adalah pertama, orang miskin yang memiliki pekerjaan tetap, mereka tidak berusaha pindah pekerjaan. Ini menunjukkan mereka bertahan dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang Alasannya tidak tahu alternatif yang tersedia dan pekerjaan yang dilakukan saat ini tetap lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan lain dengan resiko pilihannya. Kedua, anggota rumah tangga miskin

yang cenderung memperbanyak jumlah anggota rumah tangga ikut bekerja untuk memecahkan kesulitan hidup. Pola ini merupakan bagian dari strategi adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi kemiskinan. Tujuannya untuk bertahan hidup (*survival strategy*). Pilihan diversifikasi pekerjaan dan pendapatan melalui pola nafkah ganda. Cara lain yang mendorong orang miskin memecahkan masalah keuangan rumah tangganya yaitu berhutang kepada tetangga, berhutang kepada anggota keluarga, menerima bantuan dari anggota keluarga,

Secara umum penyebab kemiskinan disumatera barat disebabkan antara lain oleh:

1. Lokalitas ekosistem yang dialami oleh para petani. Di kalangan petani perdesaan atau lahan kering ketergantungan terhadap lahan secara mutlak, tetapi lahan terbatas. Sedangkan petani sawah ketersediaan air mutlak. Akan tetapi tidak ada irigasi yang baik atau sumber air terbatas, sehingga produksi lahan sawah rendah. Daerah perladangan dengan tanaman tua yang diusahakan membutuhkan lahan yang luas, tetapi lahan yang ada sangat terbatas. Selain itu status tanahnya sebagai tanah adat atau ulayat atau hutan lindung tidak dapat digunakan sembarangan karena pengaturannya yang berbeda. Pengaruh ekologis sangat dirasakan di kalangan nelayan sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang tidak selalu sama atau tergantung iklim, musim angin dan bulan.
2. Rendahnya akses terhadap lahan pertanian. Terdapat keluarga yang kekurangan lahan, disebabkan tanah ulayat hanya digunakan oleh anak kemenakan pemilik ulayat. Banyak orang miskin di nagari dari kalangan pendatang, sehingga tidak dapat menggunakan lahan yang ada. Tanah telah dibagi habis, sedangkan anggota kaum bertambah. Ada golongan keluarga atau masyarakat yang hidup turun-temurun dalam kekurangan aset ekonomi atau rendah aksesnya terhadap sumber daya setempat. Selain itu, di kalangan komunitas nelayan miskin, rendahnya akses kepemilikan alat tangkap ikan seperti perahu motor menjadi sebab utama kemiskinan mereka.
3. Krisis ekonomi yang diikuti oleh kenaikan harga berbagai alat produksi dan kebutuhan konsumsi telah menyebabkan semakin beratnya kehidupan masyarakat. Termasuk kenaikan harga BBM membuat ongkos produksi naik. Pada masyarakat petani ladang yang terjadi meningkatnya biaya produksi seperti bibit dan pupuk. Sementara pendapatan tidak seimbang dengan biaya pengeluaran yang dibutuhkan untuk pangan dan konsumsi rumah tangga. Ada pula di perkotaan yang dahulu merantau, terkena PHK dan usahanya bangkrut, kini kembali ke kampung. Secara umum yang paling dirasakan yaitu kenaikan harga kebutuhan dasar dan membiayai modal usaha.

bermotor dapat menjangkau desa, ternyata daerah penerima bantuan tetap saja menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Ketidak berhasilan itu, juga didukung oleh kegagalan pengembangan keuangan mikro non perbankan. Terutama dalam bentuk simpan pinjam tidak bermanfaat dalam waktu jangka panjang. Hal tersebut disebabkan kelompok simpan pinjam tidak bertahan lama dan kelompok cepat bubar. Penyebab lain kemacetan tinggi karena antara lain cicilan terlalu besar dan anggapan uang pemerintah tidak perlu dikembalikan. Termasuk didalamnya, bantuan bergulir yang kurang berhasil, seperti sapi, misalnya yang dijual warga sebelum berkembang biak. Gagalnya program anti kemiskinan disebabkan oleh *pertama*, program-program tersebut tidak ada yang mendorong lembaga lokal untuk aktif terlibat dan bertanggung jawab terhadap program anti kemiskinan. Lembaga nagari/kelurahan tidak aktif memantau dan membenahi program yang ada. *Kedua*, komunitas perdesaan beranggapan penanggulangan kemiskinan merupakan tugas pemerintah. Dengan demikian, penyebab gagalnya program antara lain adalah:

1. Bantuan yang diberikan menyelesaikan kebutuhan sesaat karena bersifat karitatif dan parsial, hanya menyentuh sebagian rumah tangga, sehingga tidak memberdayakan penerimanya.
2. Program bantuan tidak berkelanjutan dan kelompok yang dibentuk tidak efektif.
3. Partisipasi organisasi sosial dan tokoh lokal rendah karena mereka tidak melakukan langkah-langkah untuk melanjutkan program. Hal itu dianggap bukan menjadi urusan mereka dan tidak ada mekanisme pertanggung jawabannya. Pemerintah nagari/kelurahan diperlakukan sebagai ujung tombak yang tumpul karena program-program tidak memberdayakan organisasi lokal.

Di Sumatera Barat terdapat institusi formal lokal dalam pemerintah kabupaten (*Nagari*), yaitu Wali Nagari, Badan Perwakilan Adat Nagari (BPAN) atau Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN). Kantor tidak tiap hari dibuka, hanya kalau ada keperluan atau pekerjaan tertentu barulah diadakan kegiatan dari kecamatan atau instansi pemerintah lainnya. Sedangkan dalam pemerintah kota (Kelurahan) ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga tersebut banyak berhubungan dengan warga setempat dibandingkan dengan lembaga pimpinan adat (*nini mamak*). Namun dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari belum dapat mengeluarkan aturan-aturan bagi nagarinya. Sudah dilakukan terbatas pada penetapan anggaran pendapatan dan belanja nagari/kelurahan. Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan belum peduli terhadap program kemiskinan dan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Lembaga informal yang ada merupakan

lembaga yang tidak terkait dengan pemerintah seperti Kerapatan/Lembaga Adat Nagari (K/LAN), Badan Musyawarah Adat dan Syara' (BMAS), organisasi berbasis agama dan kekerabatan. Khususnya organisasi yang berbasis keagamaan seperti majlis taklim dan kelompok yasinan. Perannya muncul ketika perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Lembaga tersebut mempunyai tugas mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah untuk dibagikan kepada keluarga miskin.

Demikian pula dengan kebutuhan anggota kerabat atau keluarga yang dialami selalu dikaitkan dengan fungsi keluarga luas matrilineal. Bantuan sosial ekonomi diberikan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukan. Terutama berkaitan dengan keperluan yang sifatnya mendadak seperti sakit, kebakaran, meninggal dan musibah lainnya. Unsur matrilineal menjadi pokok perhatian yaitu; *pertama*, harta pusaka sebagai sumber ekonomi keluarga luas matrilineal; *kedua*, pola tempat tinggal keluarga luas matrilineal dalam menjalankan perannya; *ketiga*, aktualisasi adat.

Hubungan sosial ekonomi dimulai dari hubungan timbal balik. Semangat akan timbul saat membantu dalam pelaksanaan perkawinan. Bantuan yang diberikan biasanya dalam bentuk uang dan tenaga. Sedangkan dalam biaya pendidikan tidak karena menjadi urusan masing-masing. Bantuan terhadap orang miskin, lanjut usia dan yatim piatu menjadi urusan *paruiknya*. Mereka lebih baik dipelihara oleh *paruik* dan masyarakat setempat yang telah saling mengenal dan dijamin lebih baik. Masyarakat tidak mau dan merasa malu menempatkan lanjut usia dan anak yatim ke panti asuhan. Peran tokoh lokal membantu orang miskin dalam bentuk memberikan fasilitas atau modal usaha.

Nilai-nilai dan solidaritas lokal tumbuh dan berkembang dalam masyarakat didasarkan rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan. Tujuannya untuk membantu seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Pepatah Minangkabau; *bakampungmamagakampung, tagakbasukumamagasuku, tagakbanagarimamaga nagari, sandar menyandar bagaikan aur dengan tebing*. Nilai yang terkandung dalam pepatah tersebut mencerminkan kehidupan keluarga yang saling tolong menolong dan saling bekerja sama. Namun, dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut tidak lagi dijalankan. Masyarakat menggunakan kata individualis untuk menyebut perilaku dari sebagian masyarakat yang tidak lagi memikirkan sanak saudara dan para tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi sosial yang sangat dikenal yaitu Kelompok simpan pinjam, Kongsi dan Julu-julo. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok simpan pinjam terdiri dari beberapa orang yang mengelompokkan diri yang mengandalkan tenaga untuk kepentingan anggota atau kelompoknya. Ada kelompok laki-laki atau kelompok perempuan. Kelompok juga yang berhubungan dengan pihak luar atau

organisasi sosial untuk memperoleh pinjaman. Kelompok simpan pinjam sering cepat bubar karena antara lain menjadi pengurus tidak semuanya disenangi masyarakat, kecurigaan anggota terhadap pengurus sangat tinggi.

2. Kongsi suatu istilah yang dimulai dari individu yang menjual jasa dalam pengolahan lahan pertanian terhadap anggotanya. Kegiatannya bertujuan untuk mengatasi kesulitan mereka dalam membayar tenaga kerja. Biasanya, awal kegiatan kongsi berjalan baik dan selanjutnya sering anggota kongsi malas dengan berbagai alasan. Upah yang dibayarkan berbeda berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebesar Rp20.000,- per hari dan perempuan sebesar Rp10.000,- per hari.
3. Julo-julo (Arisan) yang merupakan kelompok penabung, dimotori ibu-ibu. Setiap anggota akan menabung sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan waktu penarikan yang ditentukan. Biasanya terdiri dari 10 orang, tiap orang akan menerima bagian sesuai dengan jumlah uang yang ditabung dan paling murah Rp5.000,-. Keberadaan kelompok ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan terutama untuk biaya pendidikan dan modal kerja.

BAB VII

PENUTUP

Sejauh ini, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan, di bidang pendidikan, misalnya, pemerintah meluncurkan pemberantasan buta huruf yang tidak terbatas di sekolah formal saja, tetapi juga secara nonformal. Di era Orde Lama, anak-anak usia sekolah bahkan “dikejar” agar mau masuk sekolah. Di era Orde Baru, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa, yang ditunjukkan oleh peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973 menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1983. Meskipun demikian tingkat buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9 juta orang yang berumur antara 10–44 tahun.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa, yang kemudian dibentuk pula Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa. Disamping itu, penempatan bidan di desa yang kemudian mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin Posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Melalui *Small Enterprise Development Project* (SEDP I–III) dari Bank Dunia dilaksanakanlah program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada tahun 1974 sampai awal 1990-an. Pola kredit usaha kecil kemudian diwujudkan dalam Kredit Usaha Kecil yang merupakan kredit komersial, yang ditetapkan sebesar 20 persen dari portofolio kredit bank. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989, BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 persen labanya bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah kredit usaha tani (KUT) yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan diluncurkan berbagai program Inpres, antara lain Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, termasuk Inpres Desa Tertinggal (IDT). Disamping itu, terdapat program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya, sampai program yang saat ini masih berjalan PNPM Mandiri.

Program-program pemberdayaan tersebut terus berjalan sampai hari ini, yang tingkat keberhasilannya tidak selalu ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau organisasi pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dan penghargaan kebijakan terhadap individu juga memainkan peranan penting. Keberhasilan pengembangan masyarakat tampak pada pelibatan anggota masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan adanya konsensus bersama tentang tujuan pengembangan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang akan dicapai dalam tujuan tersebut. Oleh karena itu pengembangan masyarakat mengutamakan tujuan-tujuan yang bersifat non-material dibandingkan dengan yang material. Dalam konteks ini perubahan pada nilai-nilai, sikap dan aspirasi individu atau masyarakat merupakan syarat pokok bagi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, didalam mengukur keberhasilan suatu program pembangunan, para ahli pengembangan masyarakat lebih mengutamakan proses dari pada hasil suatu program, khususnya yang menyangkut perubahan cara berfikir dan bersikap dalam pembangunan.

Baik secara empiris maupun praktis, sesungguhnya tidak ada struktur sosial yang terpisah dari dan berdiri diatas individu-individu yang bertindak dengan satu tujuan. Individu atau aktor, tindakannya tidak sepenuhnya bebas atau sepenuhnya dapat memilih. Pada taraf tertentu, aktor atau individu mengalami hambatan (*constraints*) dari struktur sosial dan kultural yang ada, karena menurut Fukuyama (1995: 51), struktur sosial, meskipun bervariasi, senantiasa berusaha membatasi sifat mementingkan diri sendiri dalam diri manusia dengan berbagai cara melalui penetapan aturan-aturan moral yang tidak tertulis. Modal sosial terdapat di dalam komunitas yang harmonis, sehingga terbuka peluang bagi anggota komunitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui interaksi sosial yang sehat dan bermanfaat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan memiliki tiga pilar utama yaitu: pertama mengembangkan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin; kedua memberdayakan kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat miskin

dan ketiga, meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin. Oleh karena itu, persoalan pokoknya adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal ini dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama ini? Sejauh ini pemerintah memang telah mengembangkan program penanggulangan kemiskinan perkotaan, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan ini perlu diperkuat dengan mengedepankan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal, sebagai salah satu alternatif penanganan kemiskinan perkotaan.

Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, dengan memanfaatkan kearifan lokal, yang dapat ditumbuhkembangkan untuk memberdayakan masyarakat. Kearifan lokal dengan berbagai manifestasinya inilah yang diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat yang didasarkan, tidak hanya pada inisiatif dan swadaya masyarakat, melainkan juga nilai kearifan lokal, merupakan aspek yang sangat penting. Dalam hubungannya dengan pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat, kearifan lokal diperlukan untuk menggerakkan partisipasi anggota masyarakat serta untuk kelangsungan suatu proyek pengembangan. Untuk itu diperlukan kebijakan sosial yang bersis kearifan lokal yang bersifat praktis agar dapat mengikutsertakan seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar *community development* yang dapat diterapkan dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Program ditetapkan 'dari bawah oleh dan bersama masyarakat setempat' (prakarsa/inisiatif masyarakat) yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan program akan berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat.
2. Program yang akan dilaksanakan sesuai dengan 'kemampuan masyarakat setempat' (swadaya masyarakat), sehingga diharapkan program itu dapat berhasil dengan baik karena program tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan seberapa jauh sumber-sumber daya dan dana yang ada di masyarakat setempat dapat mendukung berjalannya suatu program.
3. 'Peranan masyarakat' (partisipasi masyarakat) didalam pelaksanaan program sangat diperlukan untuk membantu kelancaran dan keberhasilan program, karena didalam kerja sama diantara masyarakat tersebut akan mendorong terbentuknya 'gotong royong dan saling tolong menolong.'

Keberhasilan penerapan ketiga prinsip tersebut, terutama dalam usaha-usaha pengembangan masyarakat, diperlukan pemahaman lebih lanjut

terhadap beberapa konsep yang dapat melibatkan kearifan lokal. Pengetahuan masyarakat tentang kondisi masyarakat dan manfaat program pembangunan sangat diperlukan pada awal pelaksanaan program pembangunan. Hal ini penting, agar masyarakat tergerak untuk memperbaiki kondisi kehidupannya dan berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut. Oleh karena itu, langkah awal di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat adalah pemberian informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan serta mempelajari kondisi kehidupan masyarakat. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat bisa di-*leverage* menjadi *social enterprise*? Suatu kelompok masyarakat bisa dikatakan *social enterprise* apabila mereka menjaga tatanan hidup dan alam yang ada sehingga hasilnya akan dinikmati kita semua. Karakteristik *social enterprise* yang diharapkan adalah: (1) tujuan utamanya adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain; (2) keuntungannya diinvestasikan lagi untuk pengembangan usaha; (3) ada yang mendirikan *third sector organization*, bentuknya yayasan, perkumpulan, koperasi, serikat buruh (serikat pekerja), organisasi masa atau badan hukum pendidikan; (4) membentuk komunitas sosial yang bertujuan untuk memelihara sumber daya manusianya dan mereplikasi model bisnisnya; (5) memiliki pertautan yang kuat dengan komunitas; (6) memiliki kepemimpinan yang kuat; (7) jiwa kewirausahaannya kuat; (8) memiliki kemampuan mengubah pola pikir komunitas; dan (9) ada modal intelektual yang berkembang.

Pemberdayaan kearifan lokal dalam masyarakat tradisional suku sangat erat kaitannya dengan kegiatan budaya manusia sebagai suatu proses dan hasil budaya melalui upaya pewarisan dan pemberdayaannya. Proses dan hasil pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dapat diartikan pula sebagai bentuk pendidikan guna transformasi nilai-nilai berkearifan secara luas yang semakna dengan kegiatan kebudayaan Sedyawati (2007: 381-382) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'lokal' dalam bentangan dimensi kebudayaan selama ini mestinya lebih tepat disebut 'sub bangsa' atau 'suku bangsa,' sehingga 'kearifan lokal' dapat diartikan sebagai 'kearifan dalam kebudayaan tradisional suku bangsa'. Kata 'kearifan' juga dimengerti dalam arti luasnya, tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika. Dengan pengertian tersebut, maka yang termasuk sebagai penjabaran 'kearifan lokal' adalah juga berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya, baik yang *tangible* maupun *intangible*. Masyarakat tradisional dalam konteks Indonesia adalah komunitas manusia suku-suku bangsa yang masih memegang teguh kaidah nilai dan perwujudan hidup yang dipandangnyaberkearifan lokal secara turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, B. 2006. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing
- Apgar, Mahlon 1976. *New Perspectif on Community Development*. England: McGraw Hill Book Company (UK) Limited.
- Astone, N., C. Nathanson, R. Schoen, & Y. Kim. 1999. Family, *Demography, Social Theory, and Investment in Social Capital*. *Population and Development Review*, 25(1), p. 1-31.
- Bappeda DKI Jakarta dan P3WK ITB. 2001. *Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan*. Jakarta: Bappeda.
- Barker, Chris. 2004. Multiculturalism, *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 127—128. London: SAGE Publications.
- Barker, Chris. 2004. Popular Culture, *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 236. London: SAGE Publications.
- Basu, Kaushik (ed). 2002. *Reading in Political Economy*, New York, Cornell University: Willey-Blackwell.
- Becker, G. 1974. *A Theory of Social Interactions*, in *Journal of Political Economy*, 82, n. 6, pp. 1063-1093.
- Berger, Peter L., Neuhaus, Richard John. 1977. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Blau, Peter M. 1974. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley.
- Blum, L.A. 2001. Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, L. May, S. Collins-Chobanian, K. Wong (eds.), a.b. Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Braudel, Fernand, 1993, *A History of Civilizations*, translated by Richard Mayne. New York: Penguin Books.
- Bryson, John M. 1991. *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations*. San Fransisco, Oxford: Jossey-Bass Publishers.
- Cardoso, F. H. 1982. *Dependency and Development in Latin America in Introduction to The Sociology of Developing Countries*. New York: Monthly Review Express.
- Cary, Lee J. 1970. *Community Development as a Process*. Columbia: University of Missouri Press.
- Cemea, Michael M. dan Basilius, B. T. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan, Variabel-Variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan* (terjemahan). Jakarta: Oxford University Press dan Universitas Indonesia: U.I. Press.
- Chambers, Robert. 1992. *Participation Rural Appraisal-Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chekki, Dan A. 1979. *Community Development: Theory and Method of Planned Change*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD.
- Coclanis, Peter A. dan Tilak Doshi. 2000. *Globalization in Southeast Asia*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of Globalization, (July), hlm. 49-64
- Coleman, James S. 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
- Coleman, James S. 1987. Norms as Social Capital, in G. Radnitzky and P. Bernholz, eds. *Economic Imperialism: The Economic Method Applied Outside the Field of Economics*. New York: Paragon House Publishers.
- Coleman, James S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
- Coleman, James S. 1993. *The Rational Reconstruction of Society*. American Sociological Review 58:1-15.
- Coleman, James S. 1994. *Social Capital, Human Capital, and Investment in Youth*, in Anne C. Peterson and Jeylan T. Mortimer, eds. *Youth Unemployment and Society*. New York: Cambridge University Press.
- Colleta, Nat J., Michelle, L. C. 2000. *Violent Conflict and The Transformation of Social Capital*. Washington, D.C.: World Bank.

- Conyers, Diana 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Cox, M. Fred, Jack Rothman. 2001. *Strategies of Community Organization*, Itasca, Illinois: F. E. Peacock Publishers, Inc.
- Cristiano, T. 2004. *Authority*. Retrieved from Stanford Encyclopedia Of Philosophy: <http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/authority>
- Dasgupta, P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Denemark, Robert. A. et. al. 2000. *World System History: The Social Science of Long Term Change*. London: Routledge.
- Desa Pakraman Kapal Badung, 2004, Awig-Awig Desa Adat Kapal
- Diamond, Larry,. 1995. *Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Dove, Michael R. ed. 1988. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dube, S. C. 1988. *Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms*. London: Zed Books Ltd.
- Dun Jr, Edgar S. 1971. *Economic and Social Development: A Process of Social Learning*. Baltimore: The John Hopkins University Pres.
- Dunham, Arthur. 1962. *The Outlook for Community Development—An International Symposium*. International Review of Community Development, 5. United Nations, Document E/CN/5/291, 1965.
- Eriksen, T.H,. 2004. *What is Anthropology?* London: Pluto Press.
- Eriksen, T.H. 2002. *Ethnicity and Nationalism: anthropological perspectives*. (second edition). London: Pluto Press.
- Evers, Hans-Dieter and Rudiger Korff, 2000. *Southeast Urbanism: The Meaning and Power of Social Space*, Jerman: LIT Verlag.
- Evers, Hans-Dieter and Rudiger Korff, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Evers, Hans-Dieter. 1982. *Sosiologi Perkotaan. Urbanisasi dan Sengketa Tanah Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: LP3ES

- Frank, A. G. 1969. *The Development of Underdevelopment in Latin America: Underdevelopment or Revolution*. New York: Monthly Review Express.
- Frank, A. G. 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Friedman, John. 1981. *Planning As Social Learning*. Philadelphia: Rodale Press, Inc.
- Friedman, John. 1991. *Empowerment; The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital*. George Mason University: Institute of Public Policy.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Values and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, F., L. Omer and N. Hirst. 1997. *Social Capital: The Great Disruption*. The 1997 Tanner Lectures. Oxford: Brasenose College.
- Fukuyama, Francis. 1996. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press Paperbacks.
- Galtung, J. 1980. *A Structural Theory of Imperialism in Dialectics of third World Development*. New York: Montelair.
- Geertz, Clifford. 1963 [1968]. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Comparative Studies of New Nations). Chicago: University of Chicago Press.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gilbert, A. dan Gugler, J., 1982, *Cities, Poverty, and Development: Urbanization in the Third World*, Oxford
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy - Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press. pp. 15-23
- Gran, Guy. 1983. *Development by People: Citizen Construction of a Just World*. New York: Praeger.
- Haba, John. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIP dan Eropean Commision.
- Hauser, Philip M. and Daniel B. Suits. 1985. *Urbanization and Migration in Asean Development*, Hawaii University Press
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt, 1990, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.

- Ife, Jim, 1995, *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*, Australia, Longman Pty Ltd.
- Institut Hindu Dharma, 1996, Keputusan Seminar XII Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu, Proyek Daerah Tingkat I Bali
- Iskandar, Jusman. 1994. Seri Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat, Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Israel, Arturo. 1990. Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. Jakarta: LP3ES.
- Jelinek, Lea. 1991. *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*. Sydney NSW: Allen & Unwin Australia Pty Ltd.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1986) Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
- Kenneth, J. Dawey. 1993. *Urban Management Programe: Elements of Urban Management*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Killerby, Paul. 2003. *Social Capital, Participation and Sustainable Development in International Community Development Conference*. New Zealand: Rotorda
- Korten, C. David. 1984. *People-Centered Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. New Hartfold, Conn.: Kumarian Press.
- Korten, C. David dan Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, C. David dan Uphoff, Norman T. 1980. *Bureaucratic Reorientation for Participatory Rural Development*, National Association of Schools of Public Affairs and Administration Working Paper No. 1, Washington D.C.: NASPAA.
- Korten, David, C., 2002, *Menuju abad ke-21, tindakan sukarela dan agenda global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowibisono, 1993, Arti Perkembangan: Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lin, N. 2001, *Social capital. A theory of social structure and action*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Meier, Gerald M. and Joseph E. Stiglitz, eds, 2000, *Frontiers of Development Economics*. New York: Oxford University Press and the World Bank.
- Micklethwait, John, dan Adrian Wooldridge, 2000, *A Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization*, New York: Crown Business.
- Midgley, James (1986). *Community Participation, Social Development and The State*. London: Methuen.
- Morris, Robert, dan Binstock, Robert H. (1966). *Feasible Planning for Social Change*. New York: Columbia University Press.
- Murniatmo, G., 2000. Khasanah Budaya Lokal: Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara. Yogyakarta: Adicita
- Murniatmo, G., Sumintarsih, Sukari, Ariani, C., dan Nurwanti, Y. H. 2000. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa Di Kalangan Generasi Muda DI Yogyakarta. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional. Jakarta: Depdikbud.
- Narayan, D. 1999. *Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty*. Washington D.C.: World Bank.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neufeldt, V., Guralnik, D. B. 1988. *Webster's New World Dictionary of American English*. New York: Webster's New World.
- Orr, M. 1999. *Black Social Capital*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.
- Payne, Malcolm 2005. *Modern Social Work Theory*. 3rd Edition. New York:
- Pitana, I, 1993, Subak, Sistem Irigasi Tradisional Bali. Denpasar: Upasadasastra
- Ponsioen, J. A. 1963. *Social Welfare Policy*, Second Collection. The Hague: Mouton & Co. Publishers.
- Poston, Richard W. 1962. *Democracy Speaks Many Tongues*. New York: Harper & Row Publishers.
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Prijono, Onny S., Pranarka, A. M. N. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijaksanaan & Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Richard T. La Piere, 1965, *Social Change*, Mc Graw Hill Book, New York.

- Robert A. Nisbet, 1968, *Social Change and History*, Oxford University Press, Oxford.
- Roberts, B. R., 1991 *Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanisation in the Third World*. London: Routledge
- Roxborough, Ian, 1979 *Theories of Underdevelopment* (London: Macmillan Press.
- Roxborough, I. 1986. *Teori-Teori Keterbelakangan*. Jakarta: LP3ES.
- Sajogyo. 1982. *Modernization Without Development*. Bacca, Bangladesh: The Journal of Social Studies.
- Sanders, Irwin T. 1958. *The Community: Introduction to a Social System 2nd Edition*. New York: The Ronald Press Company.
- Santos, T. D. 1970. *The Structure of Dependence*. American Economic Review, Volume 60, Nomor 2.
- Schoorl, J. W. 1988. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Damono. 1982. *Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sedyawati, Edi. 2008. *Eksistensi Budaya Daerah Di Antara Budaya Nasional dan Global. Keindonesiaan Dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya.
- Seers, Dudley (1969) *The Meaning of Development*. International Development Review. 11(4):3-4.
- Sen, Amartya. 1999 , *Development as Freedom*. New York: Random House.
- Serageldin, I. 1996. *Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital*. Brown Journal of World Affairs 3(2).
- Serageldin, I. and C. Grootaert. 2000. "Defining Social Capital: An Integrating View." Paper presented at Operations Evaluation Department Conference on Evaluation and Development: The Institutional Dimension. Washington, DC: The World Bank.
- Serageldin, I. and P. Dasgupta., eds. 1997. *Social Capital: Integrating the Economist's and the Sociologist's Perspective*. Washington, DC: The World Bank.
- Simmel, G. 1964. *The sociology of Georg Simmel* (ed.) K. Wolff. New York: The Free Press

- Smith, David A. 2001. *Globalization and Social Problems an Editor's Introduction*, Social Problems, Vol. 48, No. 4, Special Issue on Globalization and Social Problems, (Nov., 2001), hlm. 429-434.
- So, Alvin Y., Suwarsono (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia.
- Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetrisno, Kh. Dan Johnson, Mary. 1987. *Membina Masyarakat Membangun, Kumpulan Kasus-Kasus Pengembangan Masyarakat*. Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetrisno, Loekman, 1997, *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spencer, Herbert. 1963. *The Evolution of Societies*. Dalam Etzioni, A. dan Eva Etzioni Halevy. eds. *Social Changes: Sources, Patterns and Consequences*. New York: Basic Books.
- Steve Bruce and Steven Yearle. 2006. *Social Institution. The SAGE Dictionary of Sociology*. London: SAGE Publications.
- Sudantra, I Ketut, 2001, *Pola Penyelesaian Persoalan-Persoalan Hukum Oleh Desa Adat, Dinamika Kebudayaan III (1)*. Denpasar: Lembaga Penelitian Universitas Udayana ,
- Sunaryo dan L. Joshi. 2003. *Peranan pengetahuan ekologi lokal dalam sistem agroforestri*. Bahan Ajaran 7. World Agroforestry Centre (ICRAF), Southeast Asia Regional Office, Bogor, Indonesia
- Suparlan, Parsudi. 2003. *Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*, *Antropologi Indonesia*, 71, <http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/jurnal/2003/71/>
- Suparlan, Parsudi. 2000. *Hak Budaya Komuniti dan Integrasi Kebangsaan*. Makalah Diskusi Gandhi Afternoon Forum Nasionalisme Dalam Kesetaraan Warga Negara Memperkokoh Integrasi Kebangsaan, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (Gandi) Jakarta , 26 Oktober 2000
- Suriasumantri, Jujun S. 1983. *Ilmu Dalam Perspektif*. Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Leknas-LIPI.

- Suriasumantri, Jujun S. 1999. *Filsafat Ilmu. Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutawan, N., 2002, *Subak System in Bali: Its Multifunctional Roles, Problems and Challenges*, Seminar World Water Forum, Japan, 20-21 Agustus 2002.
- Szreter, S. 2000. *Social Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective*. in Schuller, T. S. Baron, & J. Field (eds). *Social Capital*. Oxford: Oxford University Press.
- Thut, I.N. dan Don Adams. 2005. *Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Studi Dampak PAATP, 2005, *Studi Dampak Pengembangan Teknologi di BPTP Binaan PAATP, Proyek Pengembangan Teknologi Pertanian Parsitipatif*, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Tomo, Frans Wiryanto. 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung: ALUMNI.
- Twelvetrees, Alan. 1991. *Community Work*, Macmillan Education, Pennsylvania State University
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development: An Alatical Sourcebook*. West Hartford: Kumarian Press.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van den Berghe, P.L. 1970. *Pluralism*. *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honig-mann (ed.) New York: MacMillan.
- Wallerstein, Immanuel. 1982. *The Rise and Future Demise of World Capitalist System; Concepts for Comparative Analysis*. dalam Alavi, Hamza dan Shanin, Theodor. *Introduction to the Sociology of Developing Societies*. Palgrave: Macmillan
- Warren, Roland L. 1963. *The Community in America*. Chicago: Rand McNally & Company.
- Wordhona, Fitri Indra 2001. *Himpunan Makalah Perencanaan Kota*. Jakarta: Jakarta Konsultindo.

INDEKS

A

Abdullah, 61
Aceh, 66, 71, 90, 91
Aceh Besar, 71, 91
adat, 2, 3, 5, 22, 35, 59, 66, 67, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 107, 108,
118, 119, 120, 121, 122, 126, 129,
130, 132, 133
adat istiadat, 2, 3, 5, 22, 35, 59, 78, 89
agama, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 35, 61, 71, 78, 86,
90, 91, 100, 108, 120, 121, 133
Alang Tulung, 62
Amartya Sen, 10, 13, 97
Ambon, 85, 86, 89
Amerika Serikat, 13, 73
Amerika Utara, 17
Ana-ana karaeng, 77
Arthur Dunham, 33
Astone, 56
AUSAID, 74
awig-awig, 77, 78, 79, 88, 118, 120, 121,
122

B

Baduy, 92, 93
bahasa, 5, 50, 53, 99, 104, 108, 113, 122,
126
baileu, 89
Bali, 60, 65, 66, 67, 70, 77, 78, 86, 87, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
bangsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 20, 21,
23, 26, 31, 32, 58, 73, 85, 90, 115,
138
banjar, 67, 68, 77, 78, 79, 87, 120
Banjur, 89

Bank Dunia, 74, 75, 101, 102, 106, 135
basiru, 63
Batak Toba, 79, 80, 81
bawon, 69, 70
Becker, 56
Belanda, 85
Belubur, 89
bhinneka tunggal ika, 1, 4
Bodi caniago, 79
Braudel, 53
budaya, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 21, 22, 23, 25, 31,
50, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 74,
75, 76, 77, 92, 107, 108, 109, 110,
112, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 137, 138
Bugis, 80, 126, 127

C

Campiri, 90
Cardoso, 17,
Cary, 32
Chekki, 28
Chester L. Hunt, 9
civil society, 12
Coleman, 6, 54, 56, 57,
Colleman, 56
Colleta, 76
Conyers, 49

D

Dalihan na tolu, 79, 80
Datuek Poropatiek nan Sabatang, 79
David C. Korten, 25
David Korten, 27
Dayak, 90

demokratis, 4, 10, 11, 13, 38, 42, 43, 79,
117, 126
dependensi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57
deyah, 90
disparitas, 19
Dove, 21
Dube, 15, 16

E

ekonomi, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 29, 30, 31, 33, 36, 45, 47, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 73, 74, 75, 95, 96, 97,
98, 101, 102, 104, 105, 106, 113,
116, 119, 123, 124, 126, 127, 129,
130, 131, 133, 136
Eropa, 17, 45, 49, 119
etnik, 3, 4, 6, 53, 58
etnis, 5, 13, 100, 119

F

fasilitator, 29, 104, 125
Ford Foundation, 75
Frank, 16, 17, 18
Fukuyama, 53, 54, 58, 113, 136
fungsional, 6, 9, 32, 44, 53

G

Galtung, 17
Gatut Murniatmo, 62, 77
Gejala sosial, 1, 15
gender, 3, 8, 62, 103
globalisasi, 8, 10, 22, 23, 27, 74
Gorontalo, 82
gotong royong, 33, 34, 59, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 81, 84, 86, 87, 108,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 137
Grotaert, 57
gugur gunung, 63, 64

H

Haba, 61
Herakleitos, 9
Hindu, 78, 119, 120, 122
hiras, 64

historis, 16, 17, 20, 21, 46

I

ideologi, 1, 2, 4, 10, 21, 23, 36, 45, 95
lfe, 49
Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 21, 26, 29,
46, 53, 57, 58, 62, 74, 76, 77, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 107, 124, 126,
135, 138
iptek, 16
Islam, 71, 81, 86, 90, 91, 133
Israel, 75, 76

J

Jailalo, 84
Jakarta, 9, 56
Jambi, 68, 89
Jan Tinbergen, 10
jasmani, 31
Jawa, 63, 64, 69, 70, 72, 90, 91, 92, 97,
107, 108, 110, 111, 112
jender, 30
John Nash, 10

K

Kalimantan Barat, 62
Kalimantan Selatan, 81
Kalimantan Tengah, 90
kapital, 12, 13, 56, 105
kapitalisme, 13, 17, 18, 19, 20, 73
Kaushik Basu, 11
kearifan lokal, 7, 8, 22, 46, 53, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 69, 108, 113, 117, 122,
137, 138
kelayan, 40, 41
kemiskinan, 4, 11, 12, 18, 26, 30, 47, 95,
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 114, 115, 116, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 135,
136, 137
Kenneth Boulding, 25
kesejahteraan, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 17, 23, 25,
27, 34, 36, 56, 57, 73, 81, 87, 97, 100,
101, 102, 104, 105, 111, 113, 114,

117, 119, 122, 123, 125, 135, 136
 Kimam, 83
 Kliwon, 91
 koersif, 6
 kolenjer, 92, 93
 komunitas, 4, 8, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
 36, 38, 39, 40, 48, 49, 53, 54, 56, 57,
 58, 60, 61, 62, 77, 78, 95, 98, 99, 113,
 118, 120, 130, 130, 136, 138
 konflik, 2, 6, 7, 9, 13, 54, 57, 97, 103, 118
 konglomerasi, 26
 konsensus, 6, 7, 35, 36, 38, 42, 136
 konstitusional, 2, 5, 121
 konvesional, 27

L

Lampung, 91
 Legi, 91
 Lin, 55
 lingkungan, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 25, 27, 29,
 34, 42, 58, 60, 62, 74, 87, 97, 98, 100,
 103, 104, 114, 116, 121, 122, 126
local wisdom, 22, 58, 61
 Lombok, 72
 LSM, 39, 51, 62, 75
 lumbung, 90, 91

M

Majapahit, 63
 Makassar, 77, 77, 80, 125, 126, 127
 Makian, 84
 Maluku, 84, 85, 86, 89
 mapalus, 64, 65
 marong, 84
 Marshal Plan, 13, 73
 Marsitaloho, 81
 Marx, 9, 17
 Masyarakat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,
 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102,
 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131,
 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

mata gawe, 88, 89

Meier, 13

Mesilih bahu, 65

Meslisi, 65, 66

Meuawee, 66

meurup, 71

Meuseuraya, 66

Minahasa, 64

Minangkabau, 79, 89, 133

miskin, 18, 19, 26, 30, 46, 47, 50, 55, 56,
 57, 71, 72, 96, 98, 101, 102, 103,
 104, 105, 106, 113, 114, 116, 123,
 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131,
 133, 136, 137

modal sosial, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 76,
 113, 117, 119, 136

modernisasi, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
 22, 23, 26, 57, 73, 74

modernisme, 73

Moeljarto, 49

mopoa huta, 82

Moyali, 82

multikulturalisme, 4

Musi, 63

Myrdal, 28

N

Narayan, 54, 55, 56

Nasrani, 86

Nathanson, 56

ndambu, 83

negara pinggir, 17, 18, 19, 20, 21

negara semipinggiran, 19, 20, 21

negara sentral, 17, 18, 19, 21

ngayah, 67, 68

ngrombo, 66

Nobel, 10
 normatif, 6, 27
 Nusa Tenggara, 60, 72
 Nusantara, 2, 3, 62, 76, 77

O

oportunistik, 54
 Orde Baru, 4, 95, 97, 101, 135
 organisasi, 1, 7, 14, 15, 16, 32, 33, 39, 43,
 45, 49, 50, 59, 74, 75, 76, 77, 84, 85,
 86, 87, 89, 117, 118, 127, 132, 133,
 134, 136, 138
 Orr, 55

P

Pahing, 91, 92
 pakava, 82
 Panngaderreng, 80
 Papua, 60, 83
 partisipasi, 8, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32,
 33, 34, 36, 37, 43, 46, 47, 50, 54, 61,
 62, 98, 103, 114, 120, 132, 136, 137
 patasiwa, 85
 Payne, 30, 49
 pekerja sosial, 38, 39, 41, 42, 43
 pela, 86
 pelarian, 668
 pemberdayaan, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 22, 45,
 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 58, 59,
 60, 61, 62, 76, 101, 102, 112, 113,
 114, 116, 120, 123, 124, 125, 131,
 132, 135, 136, 137, 138
 pemerintah, 8, 12, 14, 27, 28, 30, 31, 32,
 33, 34, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
 62, 74, 75, 77, 97, 98, 101, 102, 104,
 105, 106, 108, 116, 118, 121, 124,
 125, 126, 131, 132, 133, 135, 137
 pengadas, 72
 Peter M. Blau, 34
 Pinati, 77
 politik, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 19, 20,
 22, 23, 45, 47, 53, 55, 57, 74, 85, 98,
 101, 107
 Pon, 91, 92

Poso, 82
 Pranarka, 49
 Prijono, 45, 46
 primordial, 1, 6

R

rakyat, 2, 4, 5, 6, 11, 25, 26, 27, 31, 33, 45,
 88, 95, 101, 102, 107, 120, 126, 132,
 135, 136
 Rapang, 80
 reformasi, 6
 renaissance, 45
 Robert Chambers, 27
 Robert Gilpin, 10
 Rockfeller, 75
 rohani, 31, 122
 Roxborough, 14, 17

S

Saku, 84
 Sambas, 62
 Sanders, 32
 Santos, 17, 18
 Schoen, 56
 Schoorl, 14, 15
 Seka, 67, 71, 77, 86, 87, 120
 Serageldin, 57
 Seram, 85
 Simmel, 6
 Simon Kuznets, 10
 sosial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55,
 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69,
 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
 84, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111,
 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120,
 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131,
 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
 sosialisme, 56
 sosiologis, 3
 Spencer, 9, 14

stakeholder, 74

Stiglitz, 13

subak, 60, 77, 87, 88, 116, 118, 119

suku bangsa, 1, 2, 4, 5, 6, 58, 85, 90, 138

Sulawesi Tengah, 82, 90

Sumatra Barat, 79, 89

Sumatra Selatan, 63, 68

Sumbawa, 63, 68

Sunaryo, 58

Sunda, 64

Suparlan, 1, 4, 5

Sutrisno, 49

Szreter, 147

T

Taliziduhu, 29, 33

Taliziduhu Ndraha, 29

Talizuduhu Ndraha, 30

tanah boital may, 71

tanah boitay may, 71, 91

teknologi, 1, 10, 16, 18, 19, 22, 23, 44, 74,
108, 116, 118, 129, 138

Ternate, 85

Tidore, 84, 85

Toba, 79, 80, 81

Tolaki, 66

Twelvetreets, 30

U

Ujung Pandang, 77

Uphoff, 74, 76

urban, 55, 56

UUD 1945, 2, 3, 4, 121

W

Wage, 91, 92

Walai, 91

Wallerstein, 20

Wari', 81

Wawasan Nusantara, 2, 3

Weleng, 84

Y

Y. Kim, 56

Yunani, 9